



KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

INDONESIA

ISSN 1693-0231



WIRA

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN



Kemandirian Industri Pertahanan

EDISI OKTOBER - NOVEMBER 2020 NOMOR 3

7.8.9.10
APRIL 2021

**JIEXPO KEMAYORAN
JAKARTA-INDONESIA**



INDO DEFENCE
2021 EXPO & FORUM

INCORPORATING WITH

INDO
AEROSPACE
2021 EXPO & FORUM

INDOMARINE
2021 EXPO & FORUM

THE 9th INDONESIA'S OFFICIAL TRI-SERVICE DEFENCE, AEROSPACE, MARITIME, AND SECURITY EVENT

*"Building Peace, Stability, and Prosperity Through Defence
Industry Cooperation"*



www.indodefence.com

f Indo Defence Expo & Forum

t @IndoDefence

ig @Indo_Defence

For further information, please contact

Ms. Lisa Rusli

Senior Project Manager
Mobile : +62 815-1822-716
E-mail : yulisa@napindo.com

Ms. Lizananda Prihutami

Senior Project Executive
Mobile : +62 852-8287-8868
E-mail : nanda@napindo.com

Official And Exclusive
Show Daily



Organised by

Showing The Way!



PT Napindo Media Ashatama

Telp. : +6221 8644756/85 8650962
Fax : +6221 8650963
Email : info@napindo.com

DEWAN REDAKSI

Pelindung/Penasihat:

Sekjen Kemhan/Marsdya TNI Donny Ermawan T., M.D.S.

Pemimpin Umum:

Karo Humas Setjen Kemhan/Brigjen TNI I.E. Djoko Purwanto, S.E., M.M.

Pemimpin Redaksi:

Kabag Infopublikta Biro Humas/Kol Laut (P) Hadi Prayitno

Redaksi:

M. Adi Wibowo, M.Si./Kapten Cku Lindu Baliyanto-

Desain Grafis:

Imam Rosyadi/Mandiri Triadi, S.Sos.

Foto:

Fotografer Biro Humas

Percetakan & Distribusi:

Nadia Maretti, M.M.

Diterbitkan oleh:

Biro Humas Setjen Kemhan - Jl. Merdeka Barat No. 13-14, Jakarta -Telp. 021-3829151, Fax. 3452457



Para pembaca WIRA yang budiman,

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin-Nya-lah Majalah Wira Kemhan kembali menyapa para pembaca WIRA melalui Edisi bulan Oktober-November Tahun 2020, Nomor 3. Pada edisi ini redaksi akan menyajikan beberapa informasi dan artikel yang layak untuk disimak oleh pembaca WIRA.

Informasi yang kami berikan terkait dengan kegiatan pimpinan Kementerian Pertahanan yang terangkum dalam rubrik Fokus Pimpinan mulai dari Menhan, Wamenhan, Sekjen Kemhan dan Irjen Kemhan. Disamping itu pada edisi ini, kami juga menampilkan serba serbi berita pertahanan.

Adapun beberapa artikel yang redaksi sajikan yakni, Kepedulian Menhan Kepada Penyandang Disabilitas, Siswa SD Dari Kupang Melalui Pusrehab Kemhan, Peran Kebudayaan Dalam Mewujudkan Kemandirian Industri Pertahanan, Peran Penting Keberadaan Kapal Udara (*Flying Boat*) Terhadap Aspek Kondisi Wilayah Geografi Indonesia Dan Aspek Pertahanan, dan Peningkatan Industri Pertahanan dan Pemberdayaan Nelayan Yang Tangguh Guna Menghadapi Krisis Natuna.

Sedangkan pada kolom serba serbi berita pertahanan, redaksi menayangkan tentang Wamenhan Raker Dengan Komisi I DPR RI Bahas Laporan Keuangan Kemhan TA.2019, Sekjen Kemhan Hadiri Rool Out Ceremony Pesawat F-16 *Falcon Star* eMLU, Menhan Pimpin Sertijab Enam Pejabat Eselon I di lingkungan Kemhan, Wamenhan dan Jajaran Kemhan Ikuti Upacara HUT ke-75 TNI Secara Virtual, Menhan Memeriksa Kesiapan Penyerahan Rantis Maung Produksi PT. Pindad, Korpri Kemhan Mendukung Kesuksesan Program dan Kebijakan Kemhan.

Dengan kerendahan hati, semoga informasi dan artikel yang kami sajikan dalam Majalah WIRA edisi Oktober-November 2020 kali ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta manfaat bagi para pembaca setia WIRA dimanapun berada dan bertugas.

Untuk memperkaya artikel majalah WIRA ini, kami senantiasa mengharapkan partisipasi pembaca untuk mengirimkan tulisan, baik berupa artikel, opini, informasi, tanggapan ataupun kritik dan saran, melalui email redaksi.wira@kemhan.go.id. Majalah WIRA juga dapat diakses dalam jaringan online di laman www.kemhan.go.id.

Selamat membaca....!!!

Kepala Biro Humas,

Brigjen TNI I.E. Djoko Purwanto, S.E., M.M.

Fokus Pimpinan>>

Giat **MENHAN**

6-13

Menhan RI Terima Kunjungan Kehormatan Menhan RRT

Pernyataan Bersama Terkait Pertemuan Menteri Pertahanan Dr. Mark T. Esper dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto

Menhan RI Bertemu Menhan Austria Bahas Kerja Sama Pertahanan

Menhan RI dan Menhan Prancis Bahas Kemitraan Industri Pertahanan Nasional

Giat **WAMENHAN**

14-21

Wamenhan Beri Arah PT DI Untuk Kemajuan Industri Pertahanan

Wamenhan Tinjau Kesiapan PT Pindad dalam Program Ketahanan Pangan

Wamenhan RI Tinjau Lokasi Potensial Untuk *Food Estate* di Jabar

Kemhan Bangun Sistem Pengarsipan Dokumen Secara Digital

Giat **SEKJEN**

22-27

Sekjen Kemhan Memimpin Sosialisasi Pembentukan *Holding* BUMN Industri Pertahanan

Sekjen Kemhan: Kemandirian Indhan Penting Dalam Mewujudkan Sistem Pertahanan Negara yang Kuat

Sekjen Kemhan RI : Semangat Pemuda Berprestasi Melalui Profesi Untuk Bela Negara



Rantis Maung Produk PT. Pindad

Sumber foto : PT. Pindad

ARTIKEL



28-31

Kepedulian Menhan Kepada Penyandang Disabilitas, Siswa SD dari Kupang Melalui Pusrehab Kemhan (Penulis: Erlin Sudarwati, SKM,MM)



32-37

Peran Kebudayaan Dalam Mewujudkan Kemandirian Industri Pertahanan (Penulis: Dr. Ernalem Bangun, M.A.)

38-46

Peran Penting Keberadaan Kapal Udara (Flying Boat) Terhadap Aspek Kondisi Wilayah Geografi Indonesia Dan Aspek Pertahanan (Penulis : Brigjen TNI W. Jati Wahono).

48-54

Peningkatan Industri Pertahanan dan Pemberdayaan Nelayan Yang Tangguh Guna Menghadapi Krisis Natuna (Penulis: Kolonel Kav. Darwin Saputra S.IP., M.Han).

Serba-Serbi BERITA

55-56

Wamenhan Raker Dengan Komisi I DPR RI Bahas Laporan Keuangan Kemhan TA. 2019.

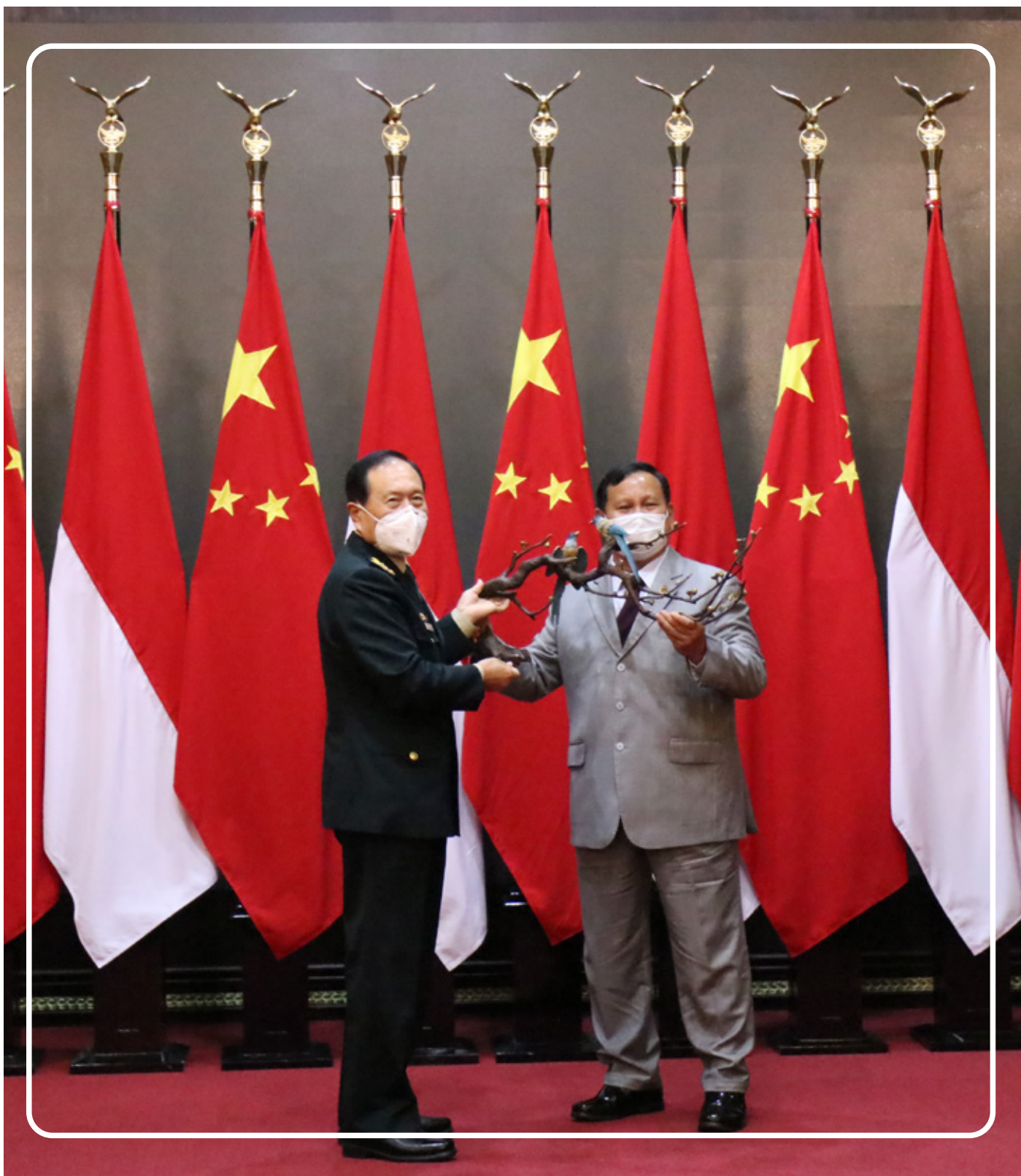
Sekjen Kemhan Hadiri Roll Out Ceremony Pesawat F-16 Falcon Star eMLU

Menteri Pertahanan RI Memimpin Sertijab Enam Pejabat Eselon I di Lingkungan Kemhan

Wamenhan dan Jajaran Kemhan Ikuti Upacara HUT ke-75 TNI Secara Virtual

Menhan Memeriksa Kesiapan Penyerahan Rantis Maung Produksi PT. Pindad

Korpri Kemhan Mendukung Kesuksesan Program dan Kebijakan Kemhan



MENHAN RI TERIMA KUNJUNGAN KEHORMATAN MENHAN RRT



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan *Chinese State Councilor and Defense Minister* H.E. General Wei Fenghe, Selasa (8/9), di Kantor Menhan, Kemhan, Jakarta. Saat menerima kunjungan Menhan RRT beserta rombongan, Menhan RI didampingi oleh Wakil Menhan RI Sakti Wahyu Trenggono beserta Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Wakil Kepala Staf TNI AD Letnan Jenderal TNI Moch. Fachrudin, Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Yudo Margono, dan Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Sedangkan Menhan RRT didampingi oleh Duta Besar RRT untuk Indonesia H.E. Xiao Qian, *Deputy Commander of the Southern Theater Command Lieutenant General (Air Force)* Jia Zhigang, *Deputy Chief of the Office for International Military Cooperation of Central Military Commission (OIMC) Major General Song Yanchao, Director General of Research Bureau of General Office of Central Military Commission Major General Liu Yantong.*

Menhan RRT beserta delegasinya tiba di Indonesia pada Selasa, 8 September 2020 di Bandara Internasional Halim Perdanakusuma dengan menggunakan pesawat khusus AU PLA dari Beijing untuk melakukan beberapa pertemuan dengan Menhan RI. Pertemuan Menteri Pertahanan kedua negara ini terdiri dari pertemuan bilateral di Aula Bhineka Tunggal Ika yang didahului pertemuan

pendahuluan dengan Menhan RI, Panglima TNI, dan para Kepala Staf Angkatan.

Dalam pertemuan bilateral antara Kementerian Pertahanan kedua negara ini dibahas mengenai berbagai hal penting yang berhubungan dengan pertahanan negara antara lain; Strategi Pemerintah Indonesia dalam mencegah penyebaran/penularan Covid-19 di masyarakat dan strategi Kemhan RI dalam menghadapinya, perkembangan Kerja sama penanganan Covid-19 antara RI dan RRT, kerja sama Industri Pertahanan RI dan RRT, kerjasama pendidikan dan isu-isu terbaru di Kawasan Asia Pasifik. Selanjutnya, juga dilaksanakan pertemuan antara Menteri Pertahanan kedua negara dengan Menko Kemaritiman di Ruang Kerja Menhan RI, yang dilanjutkan dengan makan malam.

Hadir pula dalam pertemuan ini Sekjen Kemhan RI Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., Irjen Kemhan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana S.I.P., M.M., Rektor Unhan Laksdya TNI Dr. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., DESD., Asisten Khusus Menhan Bid. Jemenhan Sjafrie Sjamsoeddin, Asisten Khusus Menhan Bid. Lingstra dan Hubtarlem Marsda TNI (Purn) Bambang Eko Suhariyanto, S.H., M.H., dan pejabat Eselon I Kemhan. ***

Pernyataan Bersama Terkait Pertemuan Menteri Pertahanan AS Dr. Mark T. Esper dengan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto





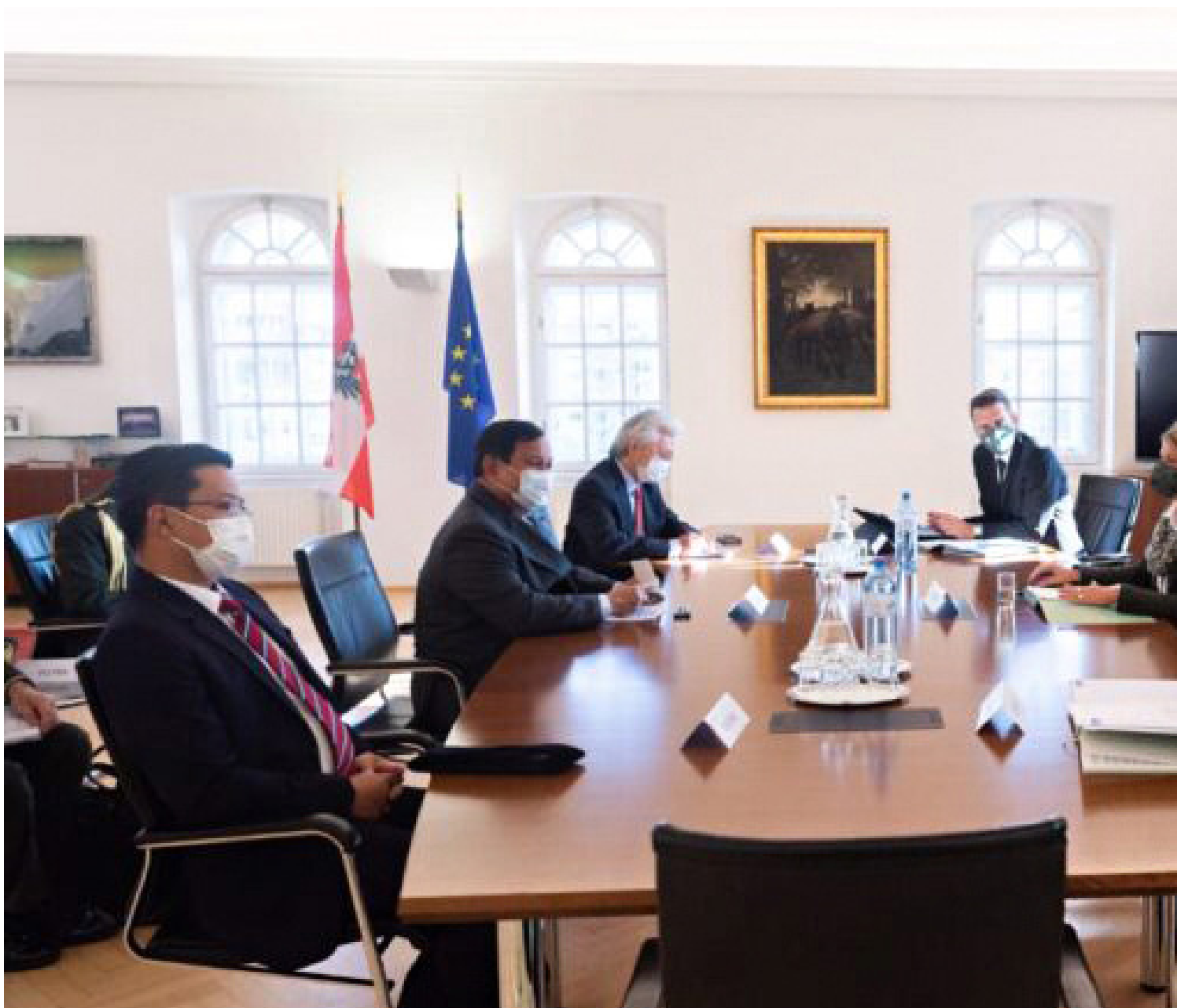
Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Menteri Pertahanan AS, Dr. Mark T. Esper bertemu dengan Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, di Pentagon, Washington, D.C., Amerika Serikat, untuk membahas keamanan regional, prioritas pertahanan bilateral, dan akuisisi pertahanan.

Menhan Esper menyampaikan pentingnya menegakkan hak asasi manusia, supremasi hukum, dan profesionalisasi saat kedua negara memperluas kerjasamanya. Menhan Prabowo menyatakan pentingnya keterlibatan militer di semua tingkatan, dan menyampaikan apresiasinya atas dukungan Amerika Serikat untuk modernisasi pertahanan Indonesia.

Kedua pemimpin berbagi keinginan untuk meningkatkan kegiatan militer-ke-militer bilateral dan bekerja sama dalam keamanan maritim. Menhan Esper dan Menhan Prabowo menandatangani Memorandum of Intent untuk memajukan upaya Defense Prisoner of War / Missing in Action Accounting Agency untuk memulai kembali pekerjaannya di Indonesia untuk merepatriasi jenazah personel AS yang hilang di Indonesia selama Perang Dunia II.

Kedua Menhan menyatakan simpati kepada mereka yang terdampak COVID-19 di Amerika Serikat dan Indonesia. ***



Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, Selasa (20/10), melaksanakan kunjungan ke Wina, Austria, untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan Austria, Klaudia Tanner. Kunjungan Menhan RI tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan kerja sama bilateral di bidang pertahanan antara kedua negara.

Kedatangan Delegasi Menhan RI yang didampingi oleh Duta Besar RI untuk Austria, Dr. Darmansjah Djumala, anggota DPR RI Komisi I, Sugiono, dan,

Atase Pertahanan Berlin, Kol. Kav. Rio Hendrawan Alin Putra, di Kantor Kementerian Pertahanan Austria disambut dengan upacara penghormatan militer oleh Pasukan Kehormatan Angkatan Bersenjata Austria.

Pada kesempatan pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut, kedua Menteri Pertahanan membahas peluang peningkatan kerja sama bilateral di bidang pertahanan yang dapat dijabaki lebih lanjut melalui pembentukan *Memorandum of Understanding* (MoU) sebagai payung (*umbrella agreement*) kerja



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

MENHAN RI BERTEMU MENHAN AUSTRIA BAHAS KERJA SAMA PERTAHANAN

sama pertahanan kedua negara di masa yang akan datang.

Selain membahas isu-isu pertahanan, kedua Menteri juga saling memberikan informasi perkembangan penanganan pandemi Covid-19 di masing-masing negara.***

MENHAN RI DAN MENHAN PRANCIS BAHAS KEMITRAAN INDUSTRI PERTAHANAN NASIONAL



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan



Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Rabu (21/10) melaksanakan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan Prancis, Florence Parly, di Kantor Kementerian Pertahanan Prancis di Paris, Prancis. Pada pertemuan tersebut, Menhan RI didampingi Dubes RI Arrmanatha Nasir, Asisten Khusus Menhan RI, dan Atase Pertahanan RI.

Dalam pertemuan, kedua Menhan membahas perkembangan situasi dan dinamika kawasan Indo-Pasifik. Dalam hal ini Prancis menaruh perhatian khusus terhadap kawasan Indo-Pasifik, mengingat selain memiliki teritori, sekitar 1.6 juta warganya berada di Kawasan Indo-Pasifik. Dalam konteks ini, kedua Menteri menegaskan pentingnya untuk terus berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan keamanan Kawasan.

Kedua Menhan secara khusus membahas kerangka kerja sama pertahanan ke depan. Berbagai kemajuan yang telah dicapai dalam mempererat kerja sama pertahanan kedua negara tahun ini, termasuk dalam upaya memajukan industri pertahanan Indonesia, disambut baik oleh kedua Menhan.

“Saya mencatat kemajuan yang cukup pesat dari kemitraan strategis Indonesia-Prancis di bidang pertahanan dalam setahun ini. Indonesia ingin terus mengembangkan kerja sama dengan Prancis di berbagai sektor pertahanan termasuk dalam memperkuat alutsista TNI dan memajukan kapasitas industri pertahanan Indonesia sebagai bagian dari *global production chain* produk alutsista,” sebut Menhan Prabowo dalam pertemuan tersebut.

Seperti diketahui, dalam pertemuan bulan Januari lalu, kedua Menhan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama Bidang Pertahanan (Defense Cooperation Agreement/ DCA). Perjanjian tersebut, akan memayungi kerja sama pertahanan secara komprehensif seperti kerja sama bidang pendidikan dan latihan militer, keamanan maritim, pemberantasan terorisme, pengembangan industri pertahanan hingga penguatan kapasitas dalam penanganan bencana seperti pandemi Covid-19 yang saat ini melanda kedua negara. Dalam kaitan ini, kedua Menhan meminta agar tim perunding dapat segera

menyelesaikan DCA, untuk dapat ditanda tangani oleh kedua Menteri pada akhir tahun ini, sebagai bagian dari peringatan HUT 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara.

Pertemuan kedua Menteri Pertahanan yang kedua kalinya tahun ini, menunjukkan semakin intensifnya komunikasi dan kerja sama pertahanan kedua negara. “Di tengah pandemi Covid-19, yang mengharuskan berbagai kegiatan tertunda, kerja sama Indonesia-Prancis dibidang pertahanan semakin erat, tidak saja terlihat dari intensitas komunikasi kedua Menhan namun juga dengan kegiatan kelompok kerja *Strategic Defense Equipment Cooperation* yang sudah dua kali bertemu tahun ini,” tutup Dubes RI, Arrmanatha Nasir.

Kerja sama Indonesia-Prancis dibidang pertahanan selama ini dilandaskan kesepakatan kedua negara pada tahun 2017 melalui Letter of Intent (LoI) atau Pernyataan Kehendak untuk peningkatan kerja sama pertahanan termasuk kerja sama kelautan dan keamanan maritim. Setiap tahunnya sejak tahun 2013, kerja sama pertahanan bilateral di beberapa bidang seperti pelatihan dan pendidikan, saling kunjung, dan pemberantasan terorisme dibahas melalui forum Dialog Pertahanan Indonesia-Prancis (*Indonesia-France Defense Dialogue/IFDD*).***

WAMENHAN BERI KEMAJUAN INDUSTRI



ARAHAN PT DI UNTUK PERTAHANAN



Wamenhan RI Sakti Wahyu Trenggono, Jumat (28/8), melakukan kunjungan kerja ke Industri Pertahanan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) yang berlokasi di Bandung Jawa Barat. Kunjungan Wamenhan yang pertama kalinya ke PT DI ini adalah untuk memberi pengarahan demi kemajuan PT DI kedepannya yang dilanjutkan dengan paparan serta diskusi dan tanya jawab.

Dalam arahannya, Wamenhan berharap PT DI dapat melakukan kontribusi secara aktif dalam pemenuhan alutsista TNI serta melakukan perbaikan sarana dan prasarana dalam empat tahun kedepan, setelah berakhirnya Renstra tahun 2024.

Kepada jajaran PT DI, Wamenhan mengingatkan untuk memperkuat atau mensupport industri-industri mikro yang terkait didalamnya guna mewujudkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri.

Dalam paparannya, Dirut PT DI Elfen Goentoro menyampaikan kesiapan PT DI untuk memenuhi kebutuhan Kemhan/TNI dalam mewujudkan kemandirian alutsista dalam negeri. PT. DI berharap dapat diberikan kesempatan terhadap pemenuhan Renstra Kemhan RI tahun 2020-2024 yang kemudian bisa dijadikan sebagai landasan dalam membangun kapabilitas PT

DI melalui *strategic partners* untuk memperoleh alih teknologi lebih awal.

PTDI berharap ada optimalisasi implementasi kandungan lokal dan/atau offset sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012.

Keberadaan PTDI akan sangat berarti jika setiap produk serta jasa yang dihasilkannya dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh instansi dan lembaga negara di Indonesia termasuk oleh Kemhan/TNI yang selama ini telah menjadi customer terbesar PTDI.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenhan yang didampingi Dirjen Kuathan dan Kabarahan berkesempatan meninjau fasilitas produksi pesawat terbang, seperti CN235, NC212i dan N219 serta helikopter.

Wamenhan juga menyaksikan beberapa produk yang dihasilkan anak bangsa diantaranya display ground control station PTTA Wulung dan produk hasil konsorsium Kemhan, BPPT, TNI AU, Lapan, PT DI, LEN dan ITB. Setelah melakukan kunjungan ke PT DI, pada hari yang sama, Wamenhan melanjutkan kunjungan ke PT Pindad.***

WAMENHAN TINJAU KESIAPAN PT PINDAD DALAM PROGRAM KETAHANAN PANGAN



Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono melakukan kunjungan kerja ke PT Pindad di Bandung, Jumat (28/8). Kunjungan Wamenhan kali ini untuk melihat kesiapan PT Pindad dalam mendukung program pemerintah khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan dimana Kemhan sebagai *leading sector*.

Rencana pengembangan kawasan “Food Estate” di Kalimantan Tengah yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo merupakan kerjasama antara Kemhan, Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian LHK dan Kementerian BUMN.

Untuk menyukseskan program tersebut, Wamenhan melihat secara langsung kesiapan PT.



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Pindad dalam memproduksi Alat Sistem Pertanian Excava dan pendukung lainnya.

Saat tiba di PT. Pindad Wamenhan diterima oleh Direktur Utama PT. Pindad Abraham Mose, dilanjutkan dengan melakukan *visit factory* atau *plant tour*.

Plant tour Wamenhan beserta rombongan diawali dengan meninjau agro inovasi alat sistem pertanian traktor multiguna (excava), ruang Assy dan testing, ruang sub Assy mekanikal dan lini produksi maung 4x4, Komodo, Medium Tank, panzer 6x6 Canon 20 mm dan panzer anoa 6x6 *logistic type fuel*.

Setelah melakukan peninjauan ke berbagai divisi, Wamenhan berkesempatan melakukan uji coba kendaraan produksi terbaru Pindad Maung dengan didampingi Dirut PT Pindad. Hadir juga dalam kesempatan tersebut Kabaranahan Kemhan Mayjen TNI Budi Prijono, S.T., M M dan Dirjen Kuathan Marsda TNI N. Ponang Djawoto. (Biro Humas Setjem Kemhan)***

WAMENHAN RI TINJAU LOKASI POTENSIAL UNTUK *FOOD ESTATE* DI JABAR

Kementerian Pertahanan (Kemhan) serius mengembangkan Program *Food Estate* dengan meninjau beberapa lokasi calon lahan potensial untuk ditanami komoditi strategis.

Hal itu ditunjukkan dengan kunjungan kerja dari Wakil Menteri Pertahanan RI Sakti Wahyu Trenggono yang didampingi Irjen Kemhan Letnan Jenderal TNI Ida Bagus Purwalaksana, S.I.P., M.M dan jajaran Kemhan untuk meninjau salah satu calon lahan Food Estate di wilayah Gombor Kecamatan Subang, Jawa Barat, Senin (19/10).

Kegiatan diawali dengan peninjauan udara menggunakan Helikopter milik Angkatan Udara untuk melihat situasi dan kondisi lahan yang potensial diantaranya Desa Manyingsal Kec. Cipunagara Kab. Subang, Desa Sumurbarang Kec. Cibogo Kab. Subang, Desa Kiarasari Kec. Compreng Kab. Subang, Desa Bojongkeding Kec. Tambakdahan Kab. Subang, Desa Cikamurang Kec. Terisi Kab. Indramayu, Desa Ujungjaya Kec. Ujungjaya Kab. Sumedang, dan Desa Mekarjaya Kec. Kertajati Kab. Majalengka.





Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Berikutnya ada juga lokasi di Kabupaten Karawang yang terdapat di beberapa desa di Kecamatan Pangkalan, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kecamatan Tegal Waru, dan Kecamatan Ciampel.

Wakil Menteri Pertahanan RI Sakti Wahyu Trenggono usai melakukan kunjungan mengaku gembira dengan respons positif dari masyarakat dan swasta dalam mendukung *Food Estate*.

"Saya senang dengan antusiasme dari pihak swasta dan masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam program *Food Estate*," katanya di Hanggar Skadron Udara 7 Subang Jawa Barat.

Trenggono menyarankan bagi pihak swasta yang ingin bersama masyarakat ikut dalam program *Food Estate* ada beberapa hal yang harus diperhatikan terutama masalah pendataan kepemilikan lahan. "Harus didata pemilik lahannya, lalu diajak mengelola lahannya bersama. Setelah itu kita beri asistensi teknis, cara bertanam, dan lainnya agar menjalankan *Modern Farming* dimana ujungnya itu corporate farming. Kita harus bisa yakinkan haknya (lahan) tetap milik mereka, dan mereka tetap bisa memenuhi kehidupannya selama perawatan lahan," tegasnya. Seperti diketahui, Kemhan dipercaya untuk mengembangkan komoditi strategis seperti singkong untuk program *Food Estate*.***

Wakil Menteri Pertahanan Sakti
Wahyu Trenggono membuka
Sistem Pengarsipan Dokumen
secara Digital



KEMHAN BANGUN SISTEM PENGARSIPAN DOKUMEN SECARA DIGITAL



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Kementerian Pertahanan melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemhan membangun dan mengimplementasikan sistem Digitalisasi Tata Naskah (Takah) Kemhan. Dengan sistem tersebut, maka proses pengarsipan dokumen di lingkungan Kemhan telah dilakukan secara digital.

Implementasi sistem tersebut diawali dengan kegiatan Sosialisasi Digitalisasi Tata Naskah Kemhan yang dilaksanakan secara virtual dan dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono, Selasa (3/11) di Jakarta.

Wamenhan dalam sambutannya yang disampaikan secara virtual, menyambut baik atas dibangunnya Digitalisasi Tata Naskah Kemhan. Menurutnya, proses pengarsipan dokumen secara digital dapat digunakan untuk otoritas penggunaan dokumen dan dapat didistribusikan secara cepat ke beberapa pihak tertentu.

Dengan sistem Digitalisasi Tata Naskah, maka aliran data dokumen surat masuk dan surat keluar secara digital dipilah berdasarkan jenis surat untuk ditakahkan dan didistribusikan dari manajemen puncak mengalir secara berjenjang ke staf untuk dilaksanakan sesuai dengan disposisi.

“Dengan adanya sistem ini, Kemhan memiliki database arsip dokumen yang terpusat dan terintegrasi, serta dapat mendukung penilaian SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik) Kemhan, karena telah mempunyai suatu sistem yang dapat berbagi pakai dengan satu sistem yang sama”, tambah Wamenhan.

Turut hadir secara virtual pada acara sosialisasi Digitalisasi Tata Naskah Kemhan antara lain Irjen Kemhan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana, S.I.P., M.M. dan segenap pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemhan.***

SEKJEN KEMHAN MEMIMPIN SOSIALISASI PEMBENTUKAN *HOLDING* BUMN INDUSTRI PERTAHANAN



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, M.D.S memimpin acara Sosialisasi Pembentukan *Holding BUMN Industri Pertahanan TA. 2020*, Rabu (21/10) di Gedung Urip Sumohardjo Kemhan Jakarta.

BUMN Industri Strategis yang beranggotakan PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, PT LEN, PT Dahana dan PT PAL Indonesia turut berperan serta dalam kegiatan Sosialisasi Pembentukan Holding BUMN Industri Pertahanan di Kementerian Pertahanan RI Jakarta. Pembentukan Holding BUMN Industri Pertahanan dalam *Branding Defence Industri Indonesia (DEFEND ID)* merupakan wujud dari kolaborasi antar BUMN di lingkup BUMN Sub-Klaster Industri Pertahanan untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan.

Sekjen Kemhan dalam sambutannya menyampaikan bahwa Grand Design dari pembentukan Holding BUMN adalah menjadi Top 50 Industri Pertahanan (Indhan) pada level global oleh karena itu penyatuan langkah strategis harus dimulai pada proses perencanaan yang komprehensif sampai dengan produksi yang laik.

Bila dihadapkan dengan kemampuan Indhan yang ada sekarang, salah satu tantangan yang harus kita jawab kedepan adalah dengan meningkatkan profesionalitas SDM Indhan guna mendukung inovasi-inovasi yang dapat bersaing pada level internasional. Lebih lanjut Sekjen menyampaikan sosialisasi ini tentunya telah memberikan pemahaman serta gambaran yang sangat penting dan krusial berkaitan dengan industri pertahanan.

Masing-masing komponen yaitu pemerintah, pengguna khususnya TNI serta Industri Pertahanan memiliki peran fundamental dan aktif.

Sesuai dengan visi, misi dan tujuan pembentukannya Holding BUMN Indhan memiliki kapabilitas untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian industri pertahanan dalam negeri agar menjadi lebih maju, kuat, mandiri dan berdaya saing. Sekjen Kemhan juga menekankan agar PT LEN Industri selaku Lead Integrator pihak-pihak yang berkepentingan untuk fokus dan memberikan masukan pada rencana pembentukan Holding BUMN Industri Pertahanan tersebut guna memberikan manfaat yang lebih maksimal bagi kemajuan industri pertahanan dalam negeri.

Kepada BUMN Industri Pertahanan agar dapat memberikan masukan yang sehat dan relevan tentang kondisi di lapangan terkait implementasi aturan pelaksanaan industri pertahanan sehingga tercipta persaingan yang baik serta kesehatan keuangan pada industri pertahanan.

Hadir dalam acara tersebut Dirjen Renhan Kemhan Mayjen TNI Budi Prijono, Dirjen Kuathan Kemhan Marsda TNI N Ponang Djawoto, Dirut PT LEN Bpk. Zakky Gamal Yasin, Dirut PT Pindad Bpk. Abraham Mose, Dirut PT Dahana Bpk. Budi Antono, Dirut PT DI Bpk. Elfien Goentono, Dirut PT PAL Bpk. Budiman Saleh, Staf Khusus Menhan Bid. Kerjasama Kelembagaan, Staf Khusus Wamenhan Bid. Analisa Pembiayaan Indhan, Asrenum Panglima TNI, Aslog Panglima TNI, Aslog Kasad, Waaslog Kasal dan Waasrena Kasau.***

Sekjen Kemhan: Kemandirian Indhan Penting Dalam Mewujudkan Sistem Pertahanan Negara yang Kuat



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan



Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsdya TNI Donny Ermawan T, M.D.S., Kamis (22/10), melaksanakan kunjungan kerja ke PT. Dahana (Persero), Subang, Jawa Barat, untuk menghadiri peringatan HUT PT. Dahana Ke-54.

Dalam sambutannya, Sekjen menekankan bahwa kemandirian industri pertahanan merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan sistem pertahanan negara yang kuat, maju dan mandiri. Industri yang kuat diharapkan mampu memberikan multiplier effect baik terhadap pembangunan ekonomi maupun penguasaan teknologi bagi bangsa Indonesia. Kemandirian Industri Pertahanan juga diharapkan dapat mewujudkan pergeseran pemahaman dari belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan seperti arahan Presiden RI pada HUT TNI yang ditujukan kepada Kemhan dan Industri Pertahanan. Sekjen Kemhan melanjutkan, PT Dahana (persero) merupakan salah satu industri strategis Indonesia, khususnya dalam memproduksi industri propelan dalam menunjang kemandirian industri pertahanan.

“Peningkatan kemampuan industri pertahanan nasional sangatlah diperlukan guna memenuhi dan

mendukung kebutuhan serta menunjang kemandirian Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) TNI. Semakin pesat kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh langsung terhadap peningkatan kemampuan Industri pertahanan yang dibutuhkan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan”. Kunjungan Sekjen Kemhan ini diharapkan dapat semakin memperteguh komitmen Kemhan dalam memberdayakan industri dalam negeri untuk penguatan pertahanan negara.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Dahana (Persero) Budi Antono dalam sambutannya mengatakan, selama ini Kemhan RI telah sangat mendorong kemajuan industri pertahanan dalam negeri, dimasa mendatang diharapkan dukungan ini dapat terus dilanjutkan karena industri propelan diharapkan dapat terus dikerjakan oleh Industri Pertahanan Dalam Negeri.

Tema HUT PT Dahana (Persero) ke-54 tahun 2020 kali ini adalah “Bangkit Bersama AKHLAK untuk Indonesia Maju”. Tema ini bermakna bahwa PT Dahana (Persero) sebagai perusahaan BUMN akan serius dalam menjalankan AKHLAK untuk memajukan Indonesia, yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Hal ini diimplementasikan dalam bentuk pemasukan bagi negara dan melayani negeri ini dengan lebih baik serta menjadi mitra pemerintah dalam pengembangan industri pertahanan di tanah air.

Sekjen Kemhan dalam rangkaian kunjungan ini juga melaksanakan plant tour atau berkunjung ke bangunan-bangunan PT Dahana tempat melaksanakan produksinya.

Turut hadir dan memberikan sambutannya pada acara ini, Komisaris Utama PT Dahana Laksdya TNI (Purn) Dr. Agus Setiadji. Sedangkan pejabat Kemhan yang mendampingi Sekjen Kemhan dalam kunjungan ini Dirjen Pothan Kemhan Brigjen TNI Dadang Hendrayudha, Kabaranahan Kemhan Marsma TNI Yusuf Jauhari, S.Sos., M.Eng, Ses Balitbang Kemhan Brigjen TNI Abdullah Sani, Karohumas Setjen Kemhan Brigjen TNI I.E. Djoko Purwanto., S.E. M.M.***



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Sekjen Kemhan RI Marsdya TNI
Donny Ermawan Taufanto, M.D.S
menjadi Narasumber pada acara
Talk Show di INews TV

Sekjen Kemhan RI : Semangat Pemuda Berprestasi Melalui Profesi Untuk Bela Negara

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI menegaskan bahwa masa depan suatu bangsa ditentukan oleh generasi muda, karena generasi muda merupakan ujung tombak kemajuan dan pembangunan sebuah bangsa. Generasi muda memiliki fisik yang kuat, pengetahuan yang inovatif dan kreatifitas yang tinggi bisa disebut sebagai aktor pembangunan.

Penegasan tersebut disampaikan Sekjen Kemhan RI Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, M.D.S saat menjadi Narasumber pada acara Talk Show “Semangat Pemuda Berprestasi Melalui Profesi Untuk Bela Negara” dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020 di Studio INews TV Jakarta, Selasa (27/10).

Selain itu Sekjen juga menjelaskan bahwa Bela Negara merupakan salah satu upaya pertahanan dan pembelaan negara serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara baik dalam menghadapi serangan fisik maupun non fisik yang dapat mengancam kedaulatan negara dan kemajuan bangsa.

Kesadaran Bela Negara bagi generasi muda dimaksudkan menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Peningkatan kesadaran Bela Negara harus mengkristal dalam jiwa seluruh Bangsa Indonesia termasuk generasi muda.

Lebih lanjut Sekjen menjelaskan bahwa generasi muda harus mampu bersaing dengan generasi muda negara lain, memiliki soft skills yang baik, memiliki kepribadian yang kreatif, aktif dan inovatif sehingga mampu menghadapi dinamika persaingan global yang semakin ketat.

“Generasi Muda yang saat ini memiliki keahlian dan prestasi di bidangnya itu adalah juga salah satu bentuk dari Bela Negara” jelasnya.

Sekjen Kemhan juga menyampaikan pesan kepada generasi muda agar hendaknya berfikir terbuka, kuasai teknologi dan peradaban dunia, perlebar jaringan dan wawasan global, berprestasi maksimal sesuai bidangnya dengan tidak meninggalkan jati diri bangsa, karena kedepan siapa saja yang mampu menguasai ketiga hal tersebut maka akan menjadikan sebagai pemenang menguasai dunia.

Turut mendampingi dalam acara tersebut Dirut MNG TV Hendri Suparman, Dir Corporate Secretary Syafril Nasution, Dir Bela Negara Ditjen Potan Kemhan Brigjen TNI Jubei Levianto, S.sos., M.M, Karo Humas Setjen Kemhan Brigjen TNI I.E. Djoko Purwanto, S.E, M.M, Host Ichsan Akbar, CO Host Chica Jessica, Bintang Tamu Thomas Djorghi dan Selfi Yamma.***



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

KEPEDULIAN MENHAN KEPADA DISABILITAS, SISWA SD DARI PUSREHAB KEMHAN



PENYANDANG KUPANG MELALUI

Erlin Sudarwati, SKM,MM

Kasubbid OPD Bid. Rehabmedik Pusrehab Kemhan



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan (Pusrehab Kemhan) mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantive kepada seluruh UO di lingkungan Kemhan di bidang rehabilitasi medik, rehabilitasi vokasional, rehabilitasi sosial, dan perumahsakitan. Pada bidang rehabilitasi medik ini, salah satu pelayanan yang diberikan yaitu membuat kaki dan atau tangan palsu, yang biasa disebut Protosa (alat ganti tubuh). Lebih tepatnya di Unit OP (Ototik Prostetik) yang memberikan pelayanan pemberian dan atau pembuatan Ortosa (alat bantu tubuh) dan Protosa (alat ganti tubuh) oleh tenaga Ortosis Prostetik yang ahli di bidangnya.

Pelayanan Rehabilitasi Medik rutin diberikan kepada penyandang disabilitas personel TNI dan PNS Kemhan sebagai peserta Rehabilitasi Terpadu bersama dengan pelayanan Rehabilitasi Vokasional, Rehabilitasi Sosial dan Perumahsakitan. Namun pelayanan Rehabilitasi Medik khususnya pemberian Ortosa Protosa juga diberikan kepada penyandang disabilitas umum. Salah satu contohnya adalah Stenly Yessi Ndun yang merupakan seorang anak penyandang disabilitas berusia 6 tahun siswa Sekolah Dasar di Kupang Nusa Tenggara Timur yang memiliki kaki tidak sempurna dari lahir. Stenly Yessi Ndun sehari-harinya selama ini berjalan ke sekolah dengan menggunakan alat bantu jalan tongkat. Karena semangatnya ke sekolah dengan berjalan kaki menggunakan tongkat kayu sejauh kurang lebih satu kilometer, Yessi menjadi perhatian publik dan viral di media sosial.

Pemberitaan Viralnya Yessi Ndun di media sosial tersebut juga terdengar dan menjadi atensi Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto untuk memberikan bantuan berupa alat bantu kaki palsu kepada Yessi Ndun.

Dengan tidak menunggu waktu yang lama Bapak Menhan langsung memerintahkan Tim Pusrehab Kemhan untuk melakukan proses pembuatan kaki palsu bagi Yessi. Hal ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Menhan terhadap penyandang disabilitas yang haknya sama sebagai warga negara untuk mendapatkan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menuntut ilmu.

Atas Perintah Menhan, selanjutnya Tim Pusrehab Kemhan melakukan koordinasi dengan Satuan TNI setempat untuk dapat berkomunikasi dengan pihak keluarga Yessi yang merupakan siswa SDN Bijaesahan, Dortiana Karice Mau Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan alamat tempat tinggal di Desa Tuapanaf, Takari, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya Yessi yang didampingi keluarga bersama rombongan Pusrehab Kemhan difasilitasi menuju Pusrehab Kemhan, Jakarta.

Pada tanggal 9 Oktober 2020, Yessi tiba di Pusrehab Kemhan, Bintaro Jakarta Selatan, dengan harapan

memperoleh kaki palsu yang berkualitas. Selama di Pusrehab Kemhan, Yessi mendapatkan pelayanan yang sangat baik dari Tim Pusrehab Kemhan. Terkait rencana pembuatan kaki palsu ini diawali dengan dilakukannya assessment / pemeriksaan fisik oleh Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi (dr. Rifqi Averrouza Hasbiandra, Sp.KFR) yang didampingi oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Medik (Kolonel Kes dr. Budi Satriyo Utomo, Sp.KFR., MARS) dan Kepala Pusat Rehabilitasi Kemhan (Brigadir Jenderal TNI dr. Budiman, SpBP-RE(K), MARS.). Selanjutnya proses pembuatan protesa/kaki palsu dimulai dari pengukuran, pencetakan, modifikasi, fabrikasi, fitting berdiri, fitting berjalan, sampai dengan finishing dilakukan oleh Tim Ortosis Prostetis.

Sambil menunggu proses pembuatan, Yessi diberikan double custom axillar crutches (tongkat ketiak) untuk aktivitas sehari-hari sebelum memakai kaki palsunya. Selain itu, Yessi juga mendapatkan bimbingan dan motivasi psikologis dari Tim Psikososial Bidang Rehabilitasi Sosial, serta pendampingan dari Tim lainnya. Untuk meningkatkan motivasi dan sekaligus membangkitkan semangat Yessi, Tim Pusrehab juga mengajak dirinya mengenal lebih dekat tentang Kota Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia dengan mengunjungi Monumen Nasional (Monas), TMII dan sekitarnya.



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Akhirnya pada hari Selasa tanggal 3 November 2020, Yessi dengan didampingi oleh Kabid Rehab Medik dan Kapusrehab Kemhan berkesempatan untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto. Pada kesempatan pertemuannya dengan Bapak Prabowo Subianto, Yessi menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga atas bantuan pemberian kaki palsu. Kini Yessi merasa lebih percaya diri dan akan lebih bersemangat belajar untuk meraih cita-citanya.

Rangkaian perjalanan Yessi untuk mendapatkan bantuan Kaki Palsu selesai pada tanggal 5 November 2020. Yessi dengan didampingi oleh Tenaga Ortotis Prostetis dan Kabid Rehabmedik Pusrehab Kemhan kembali ke Kupang, untuk menuju tempat tinggalnya. Setibanya

di Kupang Yessi Ndun disambut dan diberikan apresiasi serta motivasi oleh Danlanud El Tari Kupang, Dan Lantamal VII Kupang, dan juga Dandenkesyah Kupang, sebelum akhirnya diantar kembali ke tengah keluarganya.

Komandan Pangkalan Udara El Tari, Kolonel Pnb Bambang Juniar D.,S.Sos.,MM., didampingi Karumkit Lanud El Tari kapten Kes dr. Hendra dan Kadiskesal Lantamal VII Kupang Letkol Kes Haris Benu, menyambut kedatangan Stenly Yessi Ndun di Bandara El Tari Kupang.

Pada kesempatan itu Danlanud El Tari berpesan kepada Yessi agar harus tetap semangat dan teruskan menggapai cita-cita untuk tetap bersekolah seperti teman-teman yang lainnya, serta terus berjuang jangan menyerah karena Tuhan telah bersama kita dan telah mengatur kehidupan umatnya untuk diberikan jalan yang terbaik.

Disamping itu Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) VII Laksamana Pertama TNI IG. Kompiang Aribawa dan didampingi Wadan Lantamal VII beserta para Asisten Danlantamal VII dan anggota Jalasenastri turut menyambut kedatangan Stenly Yessi Ndun, bertempat di VIP Room Mako Lantamal.

Saat penyambutan kedatangan tersebut, Yessi juga dikenalkan tentang kebaharian, Yessi diajak untuk berkeliling di perairan sekitar Dermaga Lantamal VII dengan menggunakan KAL Kembang.

Dalam kesempatan itu, Danlantamal VII mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pertahanan yang telah memberikan perhatian dalam

bentuk bantuan kaki palsu bagi Yessi, dan selama di Kupang pihak Lantamal VII akan terus memantau perkembangan kesehatan dari Stenly Yessi Ndun.

Selama kegiatan di Kupang, Tim Pusrehab Kemhan juga ikut didukung dan difasilitasi oleh Komandan Detasemen Kesehatan Wilayah (Dan Denkesyah) Kupang Letnan Kolonel Ckm. Agus Saptiady, Sp.An, khususnya dalam menjalin proses koordinasi yang sangat baik sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Akhirnya Yessi diserahkan secara resmi kepada pihak keluarga oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Medik Pusrehab Kemhan, Kolonel Kes dr. Budi Satriyo Utomo, Sp.KFR., MARS. Namun Yessi kedepannya akan terus dipantau hingga mampu beradaptasi betul dengan kaki barunya tersebut.

Program pemberian bantuan kaki palsu kepada Yessi ini adalah salah satu bentuk nyata kepedulian Menhan terhadap penyandang disabilitas, yang mana tidak hanya kepada penyandang disabilitas personel TNI dan PNS Kemhan, namun juga terhadap penyandang disabilitas umum. Seperti halnya Yessi seorang anak yang membutuhkan kaki palsu dari daerah Kupang Nusa Tenggara Timur juga tidak luput dari perhatian seorang Menteri Pertahanan, Bapak Prabowo Subianto.

Harapan kita semua, semoga Yessy akan sukses ke depannya dalam meraih cita-cita dan dapat berprestasi yang membaggakan bagi keluarga, masyarakat Kupang, bangsa dan negara. Selanjutnya Tim Pusrehab Kemhan akan terus memonitor perkembangan fisik terkait kaki palsunya.***



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Peran Kebudayaan Dalam Mewujudkan Kemandirian Industri Pertahanan

Dr. Ernalem Bangun, M.A.

Dosen Universitas Pertahanan



Berbicara tentang industri pertahanan layaklah kita melihat sejenak Negara Korea Selatan dalam membangun industri pertahanan mereka. Seperti diketahui, industri pertahanan Seoul kini telah menjadi kompetitor industri serupa dari Eropa yang telah lebih dahulu mapan. Bahkan tak jarang industri pertahanan asal Eropa tersungkur dalam tender internasional karena kalah bersaing dengan pesaingnya dari Negeri Ginseng. Pertanyaannya, mengapa industri pertahanan Korea Selatan mampu bersaing di dunia internasional?

Samuel P. Huntington dalam bukunya “Kebangkitan Peran Budaya, Bagaimana Nilai-Nilai Membentuk Kemajuan Manusia” menempatkan budaya sebagai peran utama yang membentuk kemajuan suatu masyarakat yang disebut sebagai kebangkitan peran budaya. Samuel P. Huntington, salah seorang ilmuwan terkemuka dunia, memberikan penghormatan yang tinggi terhadap peran budaya,

ketika membandingkan Ghana dan Korea Selatan, yang dilanjutkan dengan pertanyaan, “Bagaimana menjelaskan perbedaan yang luar biasa dalam perkembangan ini?”. Lalu dijawabnya sendiri, “Tidak diragukan lagi banyak faktor yang berperan, tetapi menurut hemat saya, budaya memainkan peran besar. Orang Korea Selatan menghargai hidup hemat, investasi, kerja keras, pendidikan, organisasi, dan disiplin. Orang Ghana mempunyai nilai-nilai yang berbeda. Pendeknya, budaya mempunyai andil”.

Huntington mengkisahkan betapa miripnya data ekonomi Ghana dan Korea Selatan pada tahun 1960-an awal. Dua negara ini memiliki tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita yang setara; porsi ekonomi mereka yang serupa antara produk, manufaktur, dan jasa primer; serta berlimpahnya ekspor produk primer, dengan Korea Selatan memproduksi sejumlah kecil barang manufaktur. Mereka juga menerima bantuan ekonomi dalam jumlah yang seimbang. Tiga puluh tahun kemudian, Korea Selatan menjadi raksasa industri ekonomi terbesar nomor ke-14 dunia, perusahaan-perusahaan multinasional, ekspor mobil, alat elektronik, dan barang canggih hasil pabrik lainnya dalam jumlah besar, serta pendapatan perkapita yang mendekati Yunani (saat ini sudah jauh melampaui Yunani, red.). Tidak ada perubahan seperti ini di Ghana, yang PDB per kapitanya sekarang sekitar seperlimabelas dari Korea Selatan”.

Korea Selatan (Korsel) saat ini tumbuh sebagai negara dengan ekonomi maju, khususnya di sektor industri. Inovasi di sektor teknologi jadi kunci Korsel menjadi negara maju. Walaupun Korsel bukan negara besar, namun bisa jadi eksportir terbesar nomor 6 di dunia. Transformasi pembangunan ekonomi telah mengubah Korea Selatan menjadi negara dengan inovasi teknologi.

Korea Selatan memiliki budaya yang menunjang inovasi untuk kemajuan negaranya dimana elemen utamanya adalah fondasi pendidikan. Menurut *Economist Intelligence Unit* tahun 2014, Korea Selatan berada di peringkat pertama sebagai negara terbaik dalam sistem pendidikan di dunia.

Pada tahun 2017, Korea Selatan memiliki lebih dari 400 ribu peneliti, meningkat 2,5 kali lipat jumlahnya dibandingkan pada tahun 1997 dan menjadi salah satu negara dengan komitmen tinggi terhadap riset yaitu sebesar 4,55%. Pada tahun 2009 Korea Selatan tercatat memiliki 38.651 buah tesis, meningkat dua kali lipat dibandingkan jumlah tesis yang diselesaikan di tahun 1997. Di samping itu, masyarakat Korea Selatan dikenal memiliki etos kerja yang sangat tinggi.



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Di tahun 2012, negara ini dikenal mempunyai waktu kerja terpanjang di antara Negara OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*). Budaya kerja keras tersebut disertai pula dengan budaya inovasi. Korea Selatan dikenal memiliki tendensi untuk menjadi World Pioneer dibandingkan menjadi Fast Follower. Dalam skala 0-100, Korea Selatan memiliki nilai 76,5 dalam hal tingkat teknologi industrinya. Secara makro Korea Selatan menghabiskan sekitar 4,1% dari PDB-nya untuk kegiatan penelitian dan pengembangan.”

Korea Selatan juga dikenal dengan nasionalisme yang kuat. Pemerintah Korea Selatan memiliki andil besar dalam membentuk jiwa nasionalisme rakyatnya dan jiwa kewirausahaan yang tinggi. Hal ini memungkinkan beberapa kelompok bisnis Korea Selatan untuk bertahan dalam persaingan global untuk periode waktu yang cukup lama”.

Mochtar Lubis dalam bukunya “Transformasi Budaya Untuk Masa Depan” juga melihat bahwa dalam proses industrialisasi rumpun budaya Cina unggul dibandingkan dengan rumpun budaya Melayu. Budaya Cina mengandung nilai kerja keras, pandai dan gigih menyimpan, bersedia menjalani penderitaan untuk menggapai kesuksesan, penghormatan terhadap nenek moyang dan orangtua yang memberikan kemantapan identifikasi diri dan hubungan sosial.

Sekarang kita menoleh sejenak ke Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, terdiri dari 17.508 pulau, dengan luas 1.922.570 km² dan dihuni oleh lebih dari 260 juta jiwa dari berbagai suku bangsa, agama dan latar belakang yang berbeda pula. Negara seperti ini membutuhkan satu upaya pertahanan yang sangat tangguh untuk melindungi rakyat, wilayah dan kedaulatannya dengan mengerahkan segenap kemampuan agar tidak jatuh ke dalam penguasaan dan pendudukan negara lain.

Untuk memenuhi kewajiban ini, Negara memerlukan alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang cukup baik dari segi kuantitas dan juga kualitasnya, karena alutsista adalah salah satu pilar dari kemampuan angkatan bersenjata. Namun dari realita yang ada, kondisi alutsista yang dimiliki TNI ditinjau dari kualitas sebagian besar sudah melewati batas maksimum operasional dan jumlahnya pun terbatas. Oleh karena itu peran industri pertahanan dalam negeri sangat penting.

Indonesia telah bertekad mandiri dalam industri pertahanan nasional dengan memproduksi sendiri kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Dalam berbagai kesempatan Presiden Joko Widodo memberikan arahan untuk melakukan pembenahan ekosistem industri pertahanan secara menyeluruh. Jokowi ingin, program pengembangan alutsista dapat memperkuat industri pertahanan Indonesia.



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Jokowi memandang, perbaikan ekosistem industri pertahanan perlu dilakukan, demi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap barang-barang impor untuk alat persenjataan yang dimiliki Indonesia.

Apabila kita dalam tentang kemandirian industri pertahanan ini, maka akan tampaklah betapa banyaknya manfaat yang diperoleh jika kemandirian industri pertahanan dapat tercapai. Salah satunya akan dapat meningkatkan posisi daya tawar Indonesia di dunia internasional, kerahasiaan alutsista terjaga, dan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Mengapa demikian, karena dengan kemajuan industri pertahanan akan mampu menyerap tenaga kerja, mampu memenuhi kebutuhan alutsista secara internal, bahkan dimungkinkan untuk mengeksport ke luar negeri. Hal ini juga dapat memberikan manfaat efisiensi penggunaan anggaran belanja negara, bahkan dapat meningkatkan devisa negara.

Secara teknis, dengan menggunakan alutsista produk dalam negeri akan memungkinkan untuk secara terus menerus dan berkesinambungan meningkatkan produk sehingga semakin hari semakin sempurna.

Disisi lain yang tidak kalah pentingnya adalah ketersediaan suku cadang yang mudah dan cepat diperoleh. Ditambah pula kecepatan dalam melakukan perbaikan jika ada alutsista yang rusak. Yang paling menonjol adalah terhindarnya kita dari kebijakan embargo oleh negara produsen.

Melengkapi semua manfaat yang telah disebutkan, kemandirian industri pertahanan secara tidak langsung meningkatkan rasa nasionalisme, karena akan tampak kemampuan negara dalam menyiapkan kebutuhan untuk menjaga negaranya. Ini akan memberi kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan diberlakukannya UU No. 16/2012 maka secara formal sudah ada panduan untuk mewujudkan industri pertahanan yang mandiri. KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan) bersama 3 stake holder yaitu Pembuat Kebijakan, Industri dan Pengguna diharapkan mampu membangun sinergitas yang mampu membawa industri pertahanan ke arah yang dicita-citakan, yaitu industri yang mampu memenuhi kebutuhan alutsista dalam negeri bahkan juga mampu memenuhi kebutuhan dunia.

Konsep di atas merupakan hubungan kemitraan yang terpadu dan terkonsentrasi dalam pengembangan industri pertahanan, dimana Industri pertahanan merupakan suatu sistem dengan unsur-unsur yang saling terkait dan mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Unsur-unsur tersebut, yakni antara Perguruan Tinggi dan komunitas Litbang

yang memiliki potensi untuk mengembangkan iptek pertahanan dari dalam. Disamping itu Industri yang mempunyai potensi untuk mendayagunakan iptek oleh BUMNIP, yaitu PT PAL yang bergelut di bidang alutsista Matra (medan) Laut, PT Pindad di bidang alutsista Matra Darat, PT DI menangani burung besi tempur dan segala macam pendukungnya, PT Krakatau Steel yang menangani logam dan bahan kimia, PT LEN Industri menangani komponen elektronik khusus alat tempur, dan PT Dahana mengurus soal bahan peledak dan hulu ledak. Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) ini tentunya juga didukung oleh beberapa perusahaan swasta yang bergerak di bidang pertahanan.

Berdasarkan prinsip kemitraan antara pengguna, industri dan pemerintah, TNI (Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara) sebagai pengguna juga turut serta dalam pengembangan desain sampai menghasilkan prototipe.

Dengan demikian TNI tidak hanya berfungsi sebagai pemberi proyek, melainkan turut serta mengembangkan produk sesuai kebutuhan. Hal ini berarti masalah ergonomi dapat diterapkan serta melekat pada setiap desain produk.

Pada sisi lain, Pemerintah sebagai pembuat kebijakan juga telah membuat road map alat utama sistem senjata (alutsista) yang disebut 7 program prioritas Alutsista yaitu pesawat tempur, tank, kapal selam, propelan, roket, radar dan peluru kendali.

Undang-undang Nomor 16/2012 tentang Industri Pertahanan secara eksplisit menuntut Indonesia harus siap memproduksi sendiri alutsista di dalam negeri. Proses impor hanya dapat dilakukan khusus untuk senjata dan alutsista yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri, dan itupun harus ada syarat adanya alih teknologi agar dalam waktu tertentu semuanya bisa diproduksi di dalam negeri.

Kemandirian industri pertahanan nasional ini akan mewujudkan kemampuan menjamin ketersediaan Alutsista sehingga kemandirian pertahanan negara dan keutuhan kedaulatan NKRI akan terjaga. Selain itu terdapat tiga hal yang dapat dicapai ketika Indonesia sudah mandiri dalam industri pertahanan, yakni kemampuan dalam membuat/mengintegrasikan Alutsista, kebebasan dalam memilih Sumber Material/Sistem/Teknologi, dan ketidaktergantungan terhadap berbagai ikatan.

Peran Nilai-Nilai Budaya Dapat Mendukung Perwujudan Kemandirian

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012 maka perwujudan kemandirian industri

pertahanan tinggal menunggu waktunya. Masalahnya sekarang terletak pada budaya yang dikembangkan oleh masing-masing *stake holder*.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Huntington yang melihat betapa besarnya peran budaya dalam mencapai suatu keberhasilan. Korea Selatan dengan budayanya membuatnya unggul dibandingkan Ghana. Demikian juga Mochtar Lubis melihat bagaimana rumpun budaya Cina mampu membawa negaranya unggul dalam proses industrialisasi dibandingkan dengan rumpun Melayu.

Budaya yang perlu dikembangkan yang dapat mendukung perwujudan kemandirian industri pertahanan harus digali dan direvitalisasi. Unsur industri pertahanan yang terdiri dari BUMNIP dan didukung oleh perusahaan swasta, perlu mengembangkan budaya “gotong royong” yang sebenarnya merupakan nilai budaya bangsa Indonesia yang ada sejak dahulu kala, namun saat ini mengalami degradasi, menuju ke arah individualistik.

Dengan kerja sama yang diawali keterbukaan dan kejujuran akan menciptakan relasi simbiosis mutualistik antar BUMNIP dan perusahaan swasta.

Pada tataran nilai budaya “kerja keras” dan “kerja cerdas” adalah nilai yang juga harus dipegang teguh dan terus dipelihara dan dikembangkan. Karena, dengan kerja keras dan kerja cerdas, industri pertahanan akan mampu meningkatkan produktifitasnya baik dari kuantitas maupun kualitas secara efektif dan efisien.

Dengan adanya nilai-nilai tersebut akan mampu pula meningkatkan hingga 70% kapasitas teknologi, finansial dan produksi sistem senjata, sehingga secara keseluruhan kemandirian dapat terwujud.

Demikian pula akademisi dan pranata Litbang, harus meninggalkan budaya “nerabas” yang sedang menggejala. Budaya yang perlu dibangun adalah budaya yang “berorientasi pada kualitas” sehingga pranata litbang melakukan penelitian dengan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah baik dari segi metodologi dan kompetensi peneliti.

Sumber daya litbang senantiasa dipenuhi rasa ingin tahu yang tinggi, yang memampukannya melakukan analisa yang tepat terhadap fenomena yang ada di lingkungan strategis baik nasional, regional maupun internasional. Pengetahuan teoritis diperdalam terus untuk memampukannya memiliki pisau analisa yang tepat. “Belajar sampai ke negeri Cina” adalah ungkapan yang mendukung nilai “terus belajar” yang memampukan peneliti menggali ilmu dan berupaya untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk bangsa dan negara.

Unsur lain yang tidak kalah pentingnya adalah Pembuat Kebijakan. Bagaimana pembuat kebijakan, dalam hal ini Kemku membuat kebijakan fiskal dan moneter yang dapat membantu penyediaan anggaran dan meminimalisir biaya produksi sehingga tercipta produk berbiaya rendah (ekonomis). Begitu juga dengan Kementerian perindustrian yang memberikan kemungkinan melakukan promosi dan pemasaran, serta Kemhan dengan kebijakannya

untuk melaksanakan kerja sama dengan negara lain, membuat kebijakan penggunaan oleh TNI (Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara).

Nilai budaya “saling menolong” dapat dikembangkan sehingga setiap aparatur yang terlibat dalam kegiatan ini selalu digerakkan oleh nilai budaya yang merupakan pola pikir yang menjadi pedoman ketika berperilaku. Demikian pula nilai “bangga akan produk Indonesia” harus diyakini dan dikembangkan, sehingga walaupun saat ini secara finansial tidak ekonomis, namun harapan bahwa itu adalah proses menuju hasil yang lebih baik, memampukannya untuk membuat kebijakan yang pro akan produk industri pertahanan dalam negeri.



Sumber foto : mik-newsblogspot.co.id

Unsur ketiga adalah pengguna yaitu TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Jika selama ini kita dengar “*western minded*” yang merasa bangga dengan produk asing (Barat), maka saatnya kita bangkit untuk “bangga dengan Produk Indonesia”. Hal ini sesungguhnya tidak sulit di negara yang bersifat paternalistik dan berorientasi ke atas. Para pemimpin, orang-orang yang dituakan menjadi panutan dan pusat orientasi. Jika para pemimpin menggunakan produk tersebut, strata yang ada di bawahnya dengan tanpa pikir panjang mengikutinya. Itu berarti para pemimpin di lingkungan TNI harus yakin bahwa menggunakan Alutsista produk dalam negeri adalah baik.

Mungkin dari segi kualitas produk yang digunakan masih kurang dibandingkan dengan produk luar negeri. Namun dengan keyakinan bahwa melalui penggunaan produk tersebut, akan dapat diketahui kelemahannya untuk selanjutnya dapat dilakukan perbaikan menuju kesempurnaan produk tersebut sampai memberi manfaat yang optimal.

Nilai “sabar” yang sering dianggap sudah ketinggalan jaman, memungkinkan pengguna untuk melihat secara seksama kelemahan-kelemahannya dan berupaya secara teoritis dan teknis memberikan masukan-masukan kepada industri dan pranata litbang untuk melakukan perbaikan-perbaikan.

Dengan dasar nilai “bangga produk Indonesia” menghindarkan para pejabat penentu kebijakan pembelian dari vested interest, kepentingan pribadi baik berupa materil maupun non materil.

Dengan melihat mekanisme kerja dari industri pertahanan dibutuhkan proses revitalisasi dan pembudayaan nilai-nilai budaya yang dianggap mampu mendukung perwujudan kemandirian industri pertahanan.

Penulis dalam hal ini menyebutkannya sebagai revitalisasi, karena sesungguhnya nilai-nilai itu sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia, namun sudah mengalami penurunan. Sedangkan nilai-nilai yang dianggap baru seperti “kerja keras dan kerja cerdas” dibutuhkan pembudayaan sehingga setiap individu yang terlibat dalam mekanisme industri pertahanan memiliki nilai-nilai itu, yang akan memandunya dalam bertindak dan berkarya.

Proses revitalisasi dan pembudayaan (enkulturasi) dapat dilakukan dengan berbagai cara. Sosialisasi dengan berbagai media, pendidikan formal dan informal, keteladanan, pemberlakuan sistem dan norma kerja. Kesemua hal tersebut dapat berfungsi sebagai sarana dalam menciptakan

dan mengembangkan budaya yang akan mampu mencapai apa yang diharapkan.

Karena sesungguhnya dari 3 unsur kebudayaan (sistem nilai, sistem perilaku dan sistem karya), yang mempengaruhi perilaku dan karya manusia serta yang paling lama bertahan adalah sistem nilai. Dengan demikian jika nilai-nilai yang telah disebutkan di atas dijadikan sebagai pedoman untuk mendorong perwujudan kemandirian industri pertahanan, maka UU Nomor 16 tahun 2012 (yang merupakan norma panduan dalam menjalankan kemandirian industri pertahanan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah) dapat dilaksanakan dengan baik oleh setiap pemangku kepentingan dengan kesadaran dan keyakinan. Jika sesuatu dilakukan berdasarkan kesadaran dan keyakinan, niscaya akan memberikan hasil yang optimal.***

Daftar Pustaka

- Huntington, Samuel P.
2006 Kebangkitan Peran Budaya. Bagaimana Nilai-Nilai Membentuk Kemajuan Masyarakat.
- Keontjaringanrat,
1974 Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, Jakarta, Gramedia
- 1988 Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Jakarta, Djambatan.
- Lubis, Mochtar
1988 Transformasi Budaya Untuk Masa Depan, Jakarta, CV Haji Masagung.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan

Makalah:

- Dedy, Arfians. 2013. Aktivitas R & D pertahanan dan implementasinya terhadap kemandirian industri pertahanan.
- Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. 2017. Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045.

Brigjen TNI W. Jati Wahono

PERAN PENTING KEBERADAAN KAPAL UDARA (*FLYING BOAT*)

TERHADAP ASPEK KONDISI WILAYAH GEOGRAFI INDONESIA DAN ASPEK PERTAHANAN

Pendahuluan

Wilayah Geografi Indonesia.

Secara umum telah dipahami, setelah menunggu tiga tahun, Indonesia akhirnya memiliki data rujukan terbaru wilayah kelautan Indonesia. Data tersebut menjadi pembaruan untuk data kelautan yang ada di Nusantara. Pengerjaannya dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sejak 2015 dengan melibatkan Badan Informasi Geo Spasial (BIG) dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi (Pushidros) TNI Angkatan Laut.

Bahwa kondisi geografis negara Indonesia termasuk negara kepulauan (*Archipelago state*) yang memiliki sekitar 17.504 pulau besar dan kecil (yang sudah dibakukan dan disubmisi ke PBB adalah sejumlah 16.056 pulau) dengan luas wilayah NKRI (darat dan perairan) adalah 8.300.000 km² dan total luas perairan Indonesia adalah 6.400.000 km².

Dalam Deklarasi Djuanda yang diresmikan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia, menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (*Archipelago State*) yang pada saat itu mendapat pertentangan besar dari beberapa negara, sehingga laut-laut antar pulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas. Akibatnya luas wilayah Republik Indonesia berganda 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km² dengan pengecualian Irian Jaya yang walaupun wilayah Indonesia, tapi waktu itu belum diakui secara internasional. Berdasarkan perhitungan 196 garis batas lurus (*straight baselines*) dari titik pulau terluar (kecuali Irian Jaya), terciptalah garis maya batas mengelilingi RI sepanjang 8.069,8 mil laut.

Deklarasi Juanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Djuanda

Kartawidjaja, menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, diantara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Yang mana sebelum deklarasi Djuanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu *Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939* (TZMKO 1939). Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut disekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai.

Setelah melalui perjuangan yang panjang, deklarasi ini pada tahun 1982 akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB ke-III Tahun 1982 (*United Nations Convention On The Law of The Sea / UNCLOS 1982*). Selanjutnya

deklarasi ini dipertegas kembali dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.

Pada tahun 1999, Presiden Soeharto mencanangkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara. Penetapan hari ini dipertegas dengan terbitnya Keputusan Presiden RI Nomor 126 Tahun 2001, sehingga tanggal 13 Desember resmi menjadi hari perayaan nasional, dimana Isi dari Deklarasi Juanda, 13 Desember 1957: 1) Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri, 2) Bahwa sejak dahulu kala kepulauan nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan, 3) Ketentuan

Ordonansi 1939 tentang Ordonansi, dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan : (a) Untuk mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat, (b) Untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI, sesuai dengan azas negara Kepulauan, dan (c) Untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI .

Melihat pada jumlah pulau Indonesia sebanyak 92 pulau terluar yang terdiri dari 31 pulau berpenduduk dan 61 pulau tidak berpenduduk. Posisi ini Juga menempatkan Indonesia berbatasan langsung dengan Negara lain seperti Malaysia, Singapura, Papua New Guinea, Timor Leste, Filipina, Palau, Vietnam, Australia. (Direktur



Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan /KKP).

Kondisi tersebut menjadikan tingginya kerawanan angka kriminalitas, stabilitas keamanan dan keutuhan wilayah NKRI. Sehubungan dengan hal itu, dalam rangka memelihara dan mempertahankan keutuhan wilayah perbatasan perlu dilakukan pengelolaan dan pengembangan pulau-pulau kecil terluar dengan memperhatikan keterpaduan pembangunan sarana dan prasarana di bidang

sosial, ekonomi, budaya, hukum, sumberdaya manusia, pertahanan dan keamanan.

Eksistensi Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh kondisi dan letak geografis Indonesia itu sendiri, sehingga pengelolaan sumber daya alam sangat diperlukan di Indonesia untuk dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan kelestarian dan perlindungan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Dalam amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) yang menyebutkan bahwa "Bumi, air, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Oleh karena itu, upaya mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam memang perlu ditingkatkan secara strategis.

Namun kini yang menjadi persoalannya adalah sarana dan prasarana, seperti sarana telekomunikasi, perdagangan, pelabuhan laut, dan udara khususnya di wilayah pulau-pulau terluar dan terpencil masih belum memadai.

Oleh karena itu yang menjadi perhatian dan perlu dicermati adalah bentuk ancaman,

pelanggaran, konflik maupun illegal eksploitasi terhadap sumber daya alam (SDA) yang berpotensi terjadi di dalam maupun disekitar pulau-pulau tersebut oleh pihak luar.

Pertahanan Negara.

Perwujudan Pertahanan Negara yang kuat merupakan jawaban untuk membentuk suatu kondisi bangsa dan negara yang dibutuhkan. Sebagai bentuk hakikinya Pertahanan Negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 2).

Sehubungan dengan hal tersebut didalam pengelolaan sistem pertahanan negara diorientasikan pada keterpaduan antara pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter sebagai wujud kesemestaan dalam sistem pertahanan negara dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan pertahanan negara. (Naskah lampiran Keputusan Menhan Nomor : KEP/104/M/I/2020 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2020).



Sementara itu berkaitan dengan sasaran strategis pertahanan negara terdapat beberapa aspek yang harus dicapai, salah satunya, tetap terjaganya kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta terlindunginya keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman melalui tetap terjaganya kedaulatan negara di wilayah darat, laut dan udara termasuk di daerah perbatasan (Naskah lampiran Keputusan Menhan Nomor : KEP/104/M/I/2020 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2020 Bab II Jakhanneq Tahun 2020 Point huruf a angka 1).

Disamping itu terdapat aspek yang berkaitan dengan terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk pertahanan negara, dengan mewujudkan industri pertahanan nasional yang kuat, mandiri, dan berdaya saing guna mendukung kebutuhan pertahanan negara. Aspek sasaran strategis lainnya yaitu terselenggaranya pengelolaan wilayah pertahanan dengan mewujudkan penguatan pertahanan di wilayah-wilayah *choke points* atau selat-selat strategis. (Naskah lampiran Keputusan Menhan Nomor : KEP/104/M/I/2020 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2020 Bab II Jakhanneq Tahun 2020 point huruf c angka 4 dan point huruf d angka 4).

Bentuk Implementasi dari upaya pencapaian sasaran-sasaran strategis tersebut salah satunya dapat melalui peningkatan profesionalisme pasukan TNI yang didukung dengan kelengkapan peralatan sesuai dengan kondisi, mulai dari penanganan bencana alam, bantuan kemanusiaan dan tugas misi perdamaian dunia serta keadaan darurat lainnya.

Disamping itu bentuk implementasi lainnya melalui peningkatan daya guna industri pertahanan nasional. Hal ini tentunya memerlukan wujud komitmen Kementerian Pertahanan dan TNI untuk memprioritaskan penggunaan produk industri pertahanan dalam negeri.

Paradigma Nasional dan Internasional

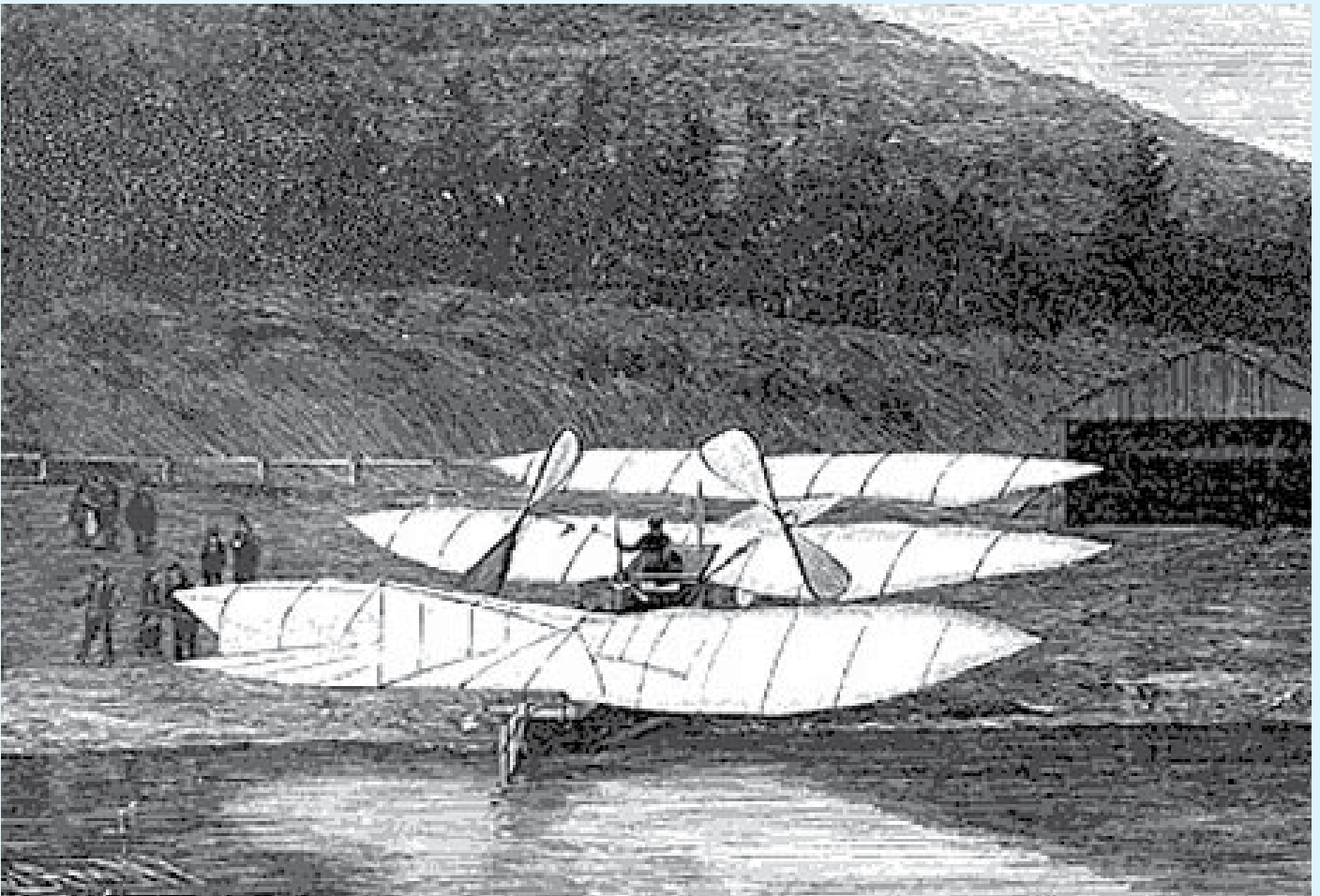
Berbagai paradigma nasional dan internasional, termasuk pergeseran paradigma ancaman serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dampak pengaruh dari Revolusi Industri 4.0 telah menyentuh pada seluruh aspek kehidupan termasuk masalah pertahanan dan keamanan.

Paradigma ini nyata-nyata membawa dampak, baik positif maupun negatif yang sangat signifikan. Disamping memudahkan interaksi antar negara, Revolusi Industri 4.0 juga menghadirkan tantangan multidimensional, yaitu munculnya berbagai ancaman baru. Salah satu diantaranya melalui dunia siber (*cyber space*) yang dapat dilakukan oleh aktor negara maupun non negara, yang sulit diantisipasi, sulit diprediksi (*unpredictable*), dinamis, dan cepat berubah, serta penuh dengan ketidakpastian, karena sifatnya yang nonkonvensional, tidak mengenal front dan dimensi sasaran sangat luas.

Disisi lain, konstelasi letak geografis Indonesia yang berada pada persilangan dua benua menjadikan perairan Indonesia sebagai jalur navigasi dan transportasi laut dan udara bagi dunia internasional. Selain itu juga posisi Indonesia yang berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara tetangga di Asia Tenggara, sehingga rentan timbul potensi sengketa perbatasan dan ancaman keamanan terhadap eksistensi



Sumber foto : militermeter.com



Sumber foto : civilianmilitaryintelligencegroup.com

keselamatan bangsa, keutuhan wilayah serta keselamatan segenap bangsa.

Terkait dengan adanya fenomena ini, TNI sebagai pilar utama pertahanan negara tentunya dibutuhkan kesiapsiagaan operasional. Baik kesiapsiagaan dari lingkup Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam menjaga keselamatan bangsa, keutuhan wilayah serta keselamatan segenap bangsa. Tugas-tugas TNI tersebut merupakan amanat Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 dalam pasal 7. Pada ayat (2) angka 12, angka 13 dan angka 14 didalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan tugas perbantuan TNI tentang penanganan bencana alam, bantuan kemanusiaan dan keadaan darurat lainnya. Maka sudah sangat diperlukan kelengkapan sarana alat/alutsista pendukung sehingga diharapkan dalam menjalankan tupoksi dapat dilaksanakan secara optimal.

Sejarah Keberadaan Kapal Udara (*Flying Boat*)

Flying Boat (Kapal Udara) adalah pesawat amfibi bersayap tetap dengan lambung kapal, yang memungkinkannya untuk mendarat di atas air, yang biasanya tidak memiliki jenis roda pendaratan untuk memungkinkan operasi di darat ini berbeda dari pesawat terbang karena menggunakan pesawat yang dirancang khusus yang dapat mengapung, memberikan daya apung pesawat.

Sejarah *Flying Boat* termaksud salah satu jenis pesawat terbesar dari paruh pertama abad ke-20, dikembangkan selama Perang Dunia II. Pada abad ke-21, dikembangkan type float atau flying boat, yakni pesawat amfibi yang dikonversi tempat mode pendaratan atau mode pengapungannya sehingga dapat digunakan untuk mendarat dan lepas landas.

Pelopop pertama pada tahun 1876 adalah orang Prancis Alphonse Pénard yang mengajukan paten pertama untuk mesin terbang dengan lambung kapal dan peralatan pendaratan yang dapat ditarik. Tetapi Austria Wilhelm Kress dikreditkan dengan membangun pesawat amfibi *Drachenflieger* pertama pada tahun 1898. Pada 6 Juni 1905 Gabriel Voisin lepas landas dan mendarat di Sungai Seine dengan layang-layang yang ditarik di atas kendaraan hias. Pada tanggal 28 Maret 1910, orang Prancis Henri Fabre telah berhasil menerbangkan pesawat amfibi pertama, yaitu *Hydravion* bertenaga Gnome Omega, dan pada tahun 1911-1912 François Denhaut membangun pesawat amfibi pertama dengan badan pesawat yang membentuk lambung.

Dalam perjalanannya, model *Flying Boat* terus dikembangkan di berbagai negara. Salah satunya seperti di Inggris, Kapten Edward Wakefield dan Oscar Gnosspelius mulai mengeksplorasi kelayakan penerbangan dari air pada tahun 1908 dengan menggunakan *Windermere* di Lake District (danau terbesar di Inggris). Di Swiss, Emile Taddéoli melengkapi *biplane Dufaux 4* dengan perenang dan berhasil lepas landas pada tahun 1912.

Sementara itu kelahiran dari sektor industri *Flying Boat* sejak tahun 1913 *Curtiss Airplane and Motor Company* merancang dan membangun pesawat yang mampu melakukan penerbangan. John Cyril Porte, yang merupakan pensiunan Letnan Angkatan Laut Kerajaan Inggris seorang perancang pesawat sekaligus sebagai pilot uji yang akan menjadi pelopor penerbangan Inggris, menyadari bahwa banyak terjadi kecelakaan awal yang disebabkan oleh pemahaman yang buruk tentang penanganan sementara dalam kontak dengan air.

Pada saat yang sama perusahaan pembangunan Kapal Inggris J. Samuel White dari Cowes di *Isle of Wight* mendirikan divisi pesawat baru dan menghasilkan kapal terbang di Inggris. Ini ditampilkan di *London Air Show* di Olympia pada tahun 1913. Di tahun yang sama, sebuah kolaborasi antara kalangan

kapal SE Saunders East Cowes dan Sopwith Aviation Company menghasilkan “Bat Boat”, sebuah pesawat dengan lambung berlubang konsuta yang bisa beroperasi dari darat atau di atas air, yang hari ini kita sebut pesawat amfibi (<https://en.wikipedia.org>, pada 25 Feb 2020).

Sementara itu di Indonesia, *Flying Boat* berhasil dirancang oleh Indonesia Maritim Institute (IMI) dan menjadikannya *Flying Boat* yang pertama di Indonesia. Erid Rizky (Dewan Pakar IMI), mengatakan, *Flying Boat* bisa terbang setinggi 150 meter di atas permukaan laut, sehingga bisa mempermudah arus transportasi angkutan laut yang ada di Indonesia (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/719647/salut-indonesia-mampu-buat-flying-boat-karya-anak-bangsa?p>, pada 14 Oktober 2013)

Peran Keberadaan *Flying Boat* Bagi Kepentingan Nasional

Dengan melihat kondisi wilayah geografis Indonesia yang merupakan kepulauan dan disandarkan kepada beberapa persoalan atau bentuk ancaman berskala nasional yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat maupun keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI maka sangatlah diperlukan suatu sarana atau prasarana sebagai alat penghubung atau penyambung. Sarana prasarana tersebut mencakup peralatan transportasi yang memenuhi aspek kecepatan, keefektifan serta memiliki multi fungsi lainnya.

Disini penulis ingin memberikan gambaran beberapa peran penting dari keberadaan Kapal Udara yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan sarana prasarana transportasi untuk mendukung kepentingan nasional. Adapun berbagai peran penting yang dimiliki dari *Flying Boat* dapat diutarakan sebagai berikut :

Pertama, sebagai Alat Transportasi. Sebaran pulau-pulau kecil, terpencil dan terluar terkandung nilai-nilai kekayaan alam yang melimpah, sehingga perlu dikelola dan dapat digunakan sebagai pemenuhan akan kesejahteraan masyarakat. Namun adanya keterbatasan

prasarana pendukung transportasi menjadikan persoalan tersendiri dalam mewujudkan akan pengelolaan sumber kekayaan alam tersebut.

Oleh karena itu Alat Transportasi *Flying Boat* (Kapal udara) dapat dijadikan alternatif solusi dalam membantu memperlancar arus transportasi antar pulau-pulau kecil dan terpencil dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan sumber kekayaan alam untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, dapat difungsikan sebagai alat pertahanan negara guna mendukung TNI dalam melaksanakan kegiatan Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Sebagai salah satu contoh kegiatan TNI sebagai komponen utama dalam mengatasi bentuk ancaman, pelanggaran, konflik maupun illegal eksploitasi SDA dan penanganan kerawanan terhadap bencana alam secara cepat dan tepat. Untuk itu dibutuhkan suatu alat/alutsista pendukung untuk menjalankan tugas tersebut.

Fungsi lain pada penanganan bencana, jenis alutsista berupa *Flying Boat* digunakan untuk

menjatuhkan air pada kebakaran hutan. Atau bisa juga berguna sebagai transportasi udara, yang dapat mengakses ke daerah-daerah di sekitar kepulauan kecil yang belum berkembang guna proses pendistribusian logistik.

Sedangkan dari pandangan kalangan militer, *Flying Boat* diakui memiliki nilai yang baik untuk melakukan tugas-tugas OMP. Beberapa negara yang berbatasan dengan air mengoperasikannya dalam kapasitas militer. Mereka digunakan mulai dari patroli anti-kapal selam hingga penyelamatan udara-laut serta penembakan senjata untuk kapal perang.

Ketiga, Sebagai alat transportasi dukungan logistik maupun penghubung bagi kepentingan satuan atau unit TNI sebagai komponen utama pertahanan negara. Melalui kebijakan pembangunan postur TNI di wilayah perbatasan yang mempunyai kesiapsiagaan operasional OMP maupun OMSP—secara optimal, maka *Flying Boat* dapat dijadikan alat/alutsista bagi TNI dalam mendukung pendistribusian logistik atau pengangkutan personel serta menjadi media penghubung antar satuan atau unit yang ditugaskan di wilayah-wilayah pulau terpencil



Sumber foto : youtube.com

dan terluar.

Karena saat ini sarana transportasi untuk mendukung logistik bagi satuan yang ditugaskan di wilayah perbatasan, pulau-pulau terluar dan terpencil masih tergantung pada transportasi laut yang rentan cuaca ekstrims.

Dari uraian berupa data maupun fakta di atas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan alat transportasi antar pulau sangatlah diperlukan baik untuk kepentingan kesejahteraan maupun alat pertahanan.

Oleh karena itu maka sangatlah ideal apabila alat transportasi kapal udara (*flying boat*) diwadahi dan dikembangkan sehingga terpenuhinya aspek kepentingan kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan pada aspek pertahanan negara dapat dijadikan sebagai alat/alutsista bagi TNI untuk menjalankan tupoksi secara optimal.

Kewenangan K/L Menyikapi *Flying Boat*

Dari sederet penjelasan sebelumnya, maka yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah: "Menjadi kewenangan Kementerian/Lembaga mana dan bagaimana peran Industri Pertahanan Nasional dalam menyikapi sarana alat transportasi *Flying Boat* (Kapal udara) ?

Bersandar kepada beberapa peran yang dimilikinya, maka sudah sepantasnya *Flying Boat* tersebut dapat diwadahi. Namun apabila ditinjau dari aspek asas manfaat, peran, tugas dan fungsinya serta teknis operasional *Flying Boat* maka lingkungan Kementerian /Lembaga yang paling tepat dan ideal untuk menyikapinya adalah di Kementerian Pertahanan (dalam hal ini di organisasi TNI).

Hal ini dikarenakan, jika berbicara soal keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI pastinya tidak terlepas dari peran Kementerian Pertahanan (Kemhan) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu Kemhan juga terus tengah membenahi, menata dan memodernisasi Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista), Alat Utama (Alut) serta melengkapi peralatan lain bagi personel TNI sebagai kekuatan

inti pertahanan dalam menjaga dan mengawal keutuhan NKRI.

Adapun tinjauan dan pertimbangan lain yang dapat digambarkan, adalah sebagai berikut :

a) Aspek manfaat dan kegunaan dapat diimplementasikan untuk mendukung pelaksanaan tugas – tugas TNI dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI maupun berbagai penangkal bentuk pelanggaran yang terjadi di wilayah Indonesia.

b) Aspek strategis, mempunyai kecepatan dan dapat didaratkan di wilayah perairan maupun landasan rumput dan sempit, sehingga lebih efektif untuk mencegah dan penangkal awal terjadinya pelanggaran atau ancaman batas wilayah Indonesia. Atau bisa juga berguna pada penanganan bencana alam maupun pencarian serta pertolongan pada kecelakaan.

c) Aspek kerawanan pelanggaran, disadari atau tidak bentuk pengawasan dalam menjaga kedaulatan NKRI masih mengoptimalkan armada TNI yang terbatas. Selain itu untuk kepulauan kecil dan terluar dengan perairan dangkal tidak jarang terabaikan dan tidak jarang pula terjadinya eksploitasi SDA secara illegal .

Mewujudkan *Flying Boat* di Indonesia Melalui Industri Pertahanan

Memang diperlukan suatu design khusus tentang keberadaan *Flying Boat* (Kapal udara) yang dapat mengakomodir peran, tugas dan fungsi TNI dalam menjalankan Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Sebagai langkah untuk mewujudkan dalam perancangan, pembangunan, dan pengadaan dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan beberapa instansi / lembaga lain. Yang pada akhirnya *Flying Boat* dapat mewadahi sesuai dengan kondisi wilayah geografis Indonesia, kondisi aspek manfaat/kegunaannya, serta mampu mengakomodir implementasi tugas OMP maupun OMSP TNI secara optimal.

Saat ini yang menjadi hal terpenting adalah bentuk komitmen dan perhatian dalam mendukung mewujudkan pemenuhan kebutuhan alat perlengkapan pertahanan dan keamanan dengan memprioritaskan produk industri pertahanan nasional. Sehubungan dengan hal itu maka dalam mengimplementasikan keberadaan kapal udara dapat mengoptimalkan serta mendayagunakan keberadaan industri pertahanan nasional.

Mengapa harus melibatkan Industri Pertahanan nasional ?. Karena Industri pertahanan dalam negeri menjadi salah satu ujung tombak upaya sebuah negara dalam mengembangkan sistem pertahanan secara mandiri. Hal ini terkait dengan terpenuhinya kebutuhan, baik dalam konteks penyediaan kualitas maupun kuantitas alutsista yang sesuai dengan karakteristik kewilayahan. Selain itu industri pertahanan mampu menyesuaikan kebutuhan dengan karakteristik dari pengguna (user) alutsista yaitu TNI, khususnya pengguna Flying Boat tersebut. Tidak kalah pentingnya, pemberdayaan dari industri pertahanan nasional ini bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan kebutuhan suku cadang atau konten alutsistanya secara politis terhadap negara lain.

Pembinaan industri pertahanan domestik telah terbukti dapat menjadi tulang punggung bagi pembangunan sistem pertahanan dan modernisasi alutsista China dan India yang saat ini tumbuh menjadi kekuatan militer besar di Asia. Berkaca kepada hal tersebut, Indonesia juga tengah akselerasi program untuk memenuhi kebutuhan minimum kekuatan militernya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Rachmat, 2014).

Dari beberapa penjelasan cukuplah jelas persoalan kelengkapan dari *Flying Boat* menjadi urgensi dan membutuhkan pertimbangan khusus. Oleh karena itu juga diperlukan adanya kebijakan strategis untuk mewujudkan realisasi sebagai implementasi kesiapsiagaan operasional TNI dalam menjalankan tupoksinya secara optimal.

Maka kembali disampaikan, bahwa keberadaan *Flying Boat* (Kapal udara) sebagai alutsista di tubuh organisasi TNI dipandang sangatlah vital dan urgensi. Khususnya, guna mewujudkan tujuan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta untuk menjaga integritas kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. ***

REFERENSI

- Angga Nurdin Rachmat. 2014. Tantangan dan Peluang Perkembangan Teknologi Pertahanan Global Bagi Pembangunan Kekuatan Pertahanan Indonesia. Adalah Dosen pada Jurusan Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani dengan bidang Kajian Keamanan Global dan Diplomasi Publik. H.199-212
- Surat Keputusan Menhan Nomor: KEP/104/M/I/2020 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2020

WEBSITE

- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/719647/salut-indonesia-mampu-buat-flying-boat-karya-anak-bangsa>.
- https://en.wikipedia.org/wiki/Flying_boat
- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/719647/salut-indonesia-mampu-buat-flying-boat-karya-anak-bangsa?page=2>

KENDARAAN TAKTIS MAUNG



KRI SEMARANG-594



PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)



Defence - Gunnery Firing Range (GFR)

Defence - Target Drone



Peningkatan Industri Pertahanan dan Pemberdayaan Nelayan Yang Tangguh Guna Menghadapi Krisis Natuna

Kolonel Kav. Darwin Saputra S.IP., M.Han.

Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Madya Puspalpalhan Baranahan Kemhan

Pendahuluan

Wilayah bagi sebuah negara merupakan salah satu aspek penting karena merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki batas wilayah yaitu 12 Mil dari garis pantai pulau-pulau terluar. Berdasarkan hasil identifikasi Indonesia memiliki 17.508 pulau, dimana 67 pulau berbatasan langsung dengan negara tetangga. Pulau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Hal ini dikarenakan batas negara merupakan salah satu sumber persengketaan antar negara. Salah satu pulau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan sering memicu persengketaan adalah Pulau Natuna di Kepulauan Riau.

Persengketaan seringkali muncul akibat penerapan prinsip yang berbeda terhadap penetapan batas-batas Landas Kontinen di antara negara-negara bertetangga sehingga menimbulkan wilayah “tumpang tindih”. Seperti halnya China yang memiliki perbedaan pandangan tentang batas-batas perairan. Pada tanggal 25 Februari 1992, pemerintah China telah mengumumkan Hukum Laut Teritorial dan

Zona Tambahannya, dimana Kepulauan Natuna dimasukkan ke dalam wilayah Yuridiksi Teritorialnya. Kepentingan China di kawasan Laut China Selatan juga merambah sampai kawasan perikanan di Kepulauan Natuna (Tampi, 2017). Hal ini tentu membuat Indonesia merugi dan mengancam keamanan maritim Indonesia.

Ancaman keamanan maritim Indonesia sebagai negara kepulauan yang wilayah lautnya berbatasan langsung dengan negara lain yaitu *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU Fishing)*. Ancaman ini telah menjadi permasalahan internasional bahkan telah diklasifikasikan sebagai kejahatan lintas negara yang biasa disebut sebagai *transnational organized crime* karena melibatkan banyak pelaku dari berbagai macam negara. IUU Fishing adalah penyebutan resmi yang dikeluarkan oleh *Food and Agriculture Organization (FAO)* melalui *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*. Illegal fishing secara ringkas dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang dilakukan dengan tidak sah, yang tidak diatur oleh peraturan, dan aktivitas perikanan yang tidak dilaporkan kepada institusi berwenang yang mengelola dunia perikanan (A.Sinulingga, 2009).



Sumber foto : cmp.com

Berdasarkan data dari TNI AL, dari Januari hingga Oktober tahun 2017 terdapat 64 Kapal Ikan Asing (KIA) yang melakukan IUU Fishing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Asops, 2017) Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap para pelaku IUU Fishing baik dari negara lain maupun dari dalam Indonesia, hingga akhir tahun 2017 berlandaskan UU 45 Tahun 2009, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menenggelamkan 317 kapal ikan ilegal terdiri dari 304 KIA dan 13 kapal ikan Indonesia (Kosatgas, 2017).

Pelanggaran batas wilayah yang terjadi harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dan masyarakat Indonesia. Dewasa ini, permasalahan di Natuna semakin memanas dikarenakan keberadaan Coast Guard China di perairan Natuna. Permasalahan yang terjadi adalah keberadaan Coast Guard China di perairan Natuna bukan sekedar untuk melintasi wilayah perbatasan melainkan untuk mengawal kapal-kapal nelayan China yang hendak melakukan pencurian terhadap Sumber Daya Alam Indonesia di Natuna (*illegal fishing*).

Keberadaan *Coast Guard* China di perairan Natuna membuat nelayan Indonesia takut melaut di Natuna. Nelayan Indonesia merasa takut bahkan diusir oleh kapal nelayan asing di laut Natuna yang notabeneanya berada di ZEE Indonesia. Bahkan beberapa nelayan mengaku tidak berani beristirahat karena khawatir kapalnya akan ditabrak nelayan asing. Ketakutan para nelayan lokal ini bukan merupakan hal yang tidak berdasar, mengingat kapal yang digunakan nelayan asing untuk mencuri ikan tersebut lebih canggih jika dibandingkan kapal yang dimiliki nelayan lokal (Detiknews, 2020).

Keadaan tersebut tentunya mencerminkan keamanan maritim Indonesia yang sangat terancam. Nelayan lokal yang seharusnya berjaya di laut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) justru merasa terusir dan takut akan ancaman dari luar. Bahkan para nelayan berharap dikawal oleh Coast Guard Indonesia atau paling tidak dapat dilengkapi dengan alat komunikasi khusus ketika sedang melaut agar terpantau oleh aparat penegak hukum dan merasa aman. Hal ini tentunya merupakan kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia seperti yang diamanatkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebuah peribahasa Latin yang konon dikutip dari penulis militer Romawi, Publius Flavius Vegetius Renatus "*Si Vis Pacem Para Bellum*," artinya "Jika kau mendambakan perdamaian, bersiap-siaplah menghadapi perang" disampaikan Menhan Prabowo Subianto pada rapat perdana dengan Komisi I DPR RI pada Senin (11/11/2019). Untuk memelihara dan menciptakan perdamaian, bersiaplah untuk perang, Demikian juga Doktrin HANKAMNEG bersifat *Defensive* bukan *Offensive*. Yang mana artinya adalah tidak berniat mengganggu negara lain tapi juga tidak akan membiarkan wilayah kita diganggu. Disamping itu Pertahanan adalah Investasi dalam mencapai kemakmuran. Karena, tanpa suatu perdamaian tidak akan ada stabilitas, tanpa stabilitas tidak akan ada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, tanpa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tidak ada kemakmuran dan kemakmuran akan berbanding lurus dengan Pertahanan suatu negara. (Prabowo S, 2019)

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah harus memberdayakan dan membangun ketangguhan nelayan Indonesia melalui peningkatan kapasitas nelayan berupa pelatihan dan perbekalan alat pertahanan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2019 salah satu upaya dalam Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) adalah dengan penataan Komponen Pendukung dan pembentukan Komponen Cadangan. Nelayan di wilayah perbatasan Indonesia sangat potensial untuk menjadi Komponen Cadangan dalam menjaga perbatasan laut Indonesia. Industri Pertahanan Nasional juga dapat dikembangkan untuk mendukung pemberdayaan militer yang tangguh. Oleh karena itu penulis akan membahas mengenai pengembangan dan peningkatan industri pertahanan dalam rangka menghadapi krisis perbatasan di perairan natuna dengan pemberdayaan nelayan yang tangguh.

Peran Industri Pertahanan Indonesia Mendukung Komponen Cadangan

Industri pertahanan dalam negeri menjadi salah satu ujung tombak upaya sebuah negara dalam mengembangkan sistem pertahanan secara mandiri. Hal ini terkait dengan terpenuhinya kebutuhan baik dalam konteks penyediaan kualitas maupun kuantitas alutsista yang sesuai dengan karakteristik kewilayahan serta menghilangkan ketergantungan secara politis terhadap negara lain. Pembinaan

industri pertahanan domestik telah terbukti dapat menjadi tulang punggung bagi pembangunan sistem pertahanan dan modernisasi alutsista China dan India yang saat ini tumbuh menjadi kekuatan militer besar di Asia. Berkaca kepada hal tersebut, Indonesia juga tengah mengakselerasi program untuk memenuhi kebutuhan minimum kekuatan militernya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Rachmat, 2014)

Industri pertahanan adalah industri baik milik negara maupun swasta nasional, yang mampu atau berpotensi, secara sendiri-sendiri atau berkelompok untuk sebagian dan seluruhnya, menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan serta jasa pemeliharaan guna memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan (Kina, 2012). Indonesia memiliki Industri Pertahanan yang dibagi dua yaitu bersumber dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).

BUMN yang memproduksi produk Industri Pertahanan yaitu:

1. PT PAL sebagai instansi penjuror terutama dalam rekayasa kapal perang

2. PT Dirgantara Indonesia mendukung pembuatan roket/rudal, helikopter, dan *fix wing aircraft*
3. PT PINDAD memenuhi kebutuhan senjata, meriam, amunisi, dan panzer
4. PT Dahana mengembangkan Amonium Nitrat dan Propelan untuk bahan peledak
5. PT Krakatau Steel menyiapkan plat baja sesuai spesifikasi yang dibutuhkan untuk produksi Alutsista *platform* kendaraan tempur.

Industri Pertahanan Indonesia yang saat ini ada di Indonesia belum berfungsi secara optimal karena kurangnya perhatian dan kepercayaan dari pemerintah Indonesia sendiri terhadap kemampuan dari industri-industri tersebut.

Embargo persenjataan yang diterapkan oleh AS pada awal tahun 1990-an telah membuka mata pemerintah Indonesia akan pentingnya keberadaan berbagai industri strategis tersebut bagi sistem pertahanan. Padahal, sejak lama produk industri pertahanan Indonesia telah diakui kehandalannya



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

oleh negara lain, seperti contohnya PT DI yang telah memproduksi pesawat intai maritim bagi beberapa negara. Kehandalan produk industri pertahanan dalam negeri mulai diakui dengan penggunaan varian senapan SS yang diproduksi oleh PT. Pindad sebagai senapan organik di lingkungan TNI dan Polri (Rachmat, 2014).

Sejak kesadaran akan pentingnya industri pertahanan domestik muncul, PT. Pindad telah banyak menghasilkan beberapa inovasi. Salah satunya adalah keberhasilan memproduksi kendaraan tempur berupa panzer yang diberi nama Anoa. Hal ini menjadi salah satu titik awal perkembangan PT. Pindad dimasa yang akan datang untuk mampu memproduksi alutsista yang dibutuhkan oleh TNI seperti tank maupun teknologi persenjataan lainnya. Saat ini PT. Pindad terus melakukan inovasi dalam mengembangkan senapan SS ke dalam beberapa tipe untuk kepentingan-kepentingan TNI. Panzer Anoa dan senapan SS buatan PT. Pindad telah mencuri perhatian dari beberapa negara yang kemudian memberikan kontrak untuk pengadaan panzer serta senapan dari perusahaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan angkatan bersenjata mereka (Rachmat, 2014).

PT. PAL pun tidak kalah dengan keberhasilan memproduksi beberapa kapal patroli yang digunakan oleh jajaran TNI-AL. Selain itu, PT. PAL juga berhasil mengembangkan kapal perang dengan teknologi stealth kelas Sigma yang diberi nama KRI Klewang. Meskipun pada sesi uji coba kapal buatan PT. PAL ini terbakar dan masih terdapat beberapa item yang masih harus didatangkan dari luar negeri, namun ini tidak menyurutkan pengembangan kapal baru tersebut yang kelak akan memperkuat jajaran TNI-AL. (Rachmat, 2014).

Sederet keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Industri Pertahanan Indonesia sebenarnya memadai untuk memperkuat pertahanan Indonesia. Mengingat krisis perbatasan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia saat ini, pengembangan industri pertahanan khususnya terkait matra laut sangat diperlukan. PT. PAL dalam hal ini harus terus di dorong untuk memproduksi dan mengembangkan persenjataan laut. PT PAL memiliki potensi untuk menciptakan kapal yang akan mendukung komponen cadangan untuk turut berkontribusi dalam pertahanan laut Indonesia.

Komponen cadangan yang paling berpotensi untuk membantu tugas TNI AL dalam menegakkan kedaulatan laut Indonesia adalah nelayan. Hal ini dikarenakan nelayan telah mengetahui geografis laut Indonesia. PT PAL sebagai industri pertahanan nasional dibidang perkapalan sangat berpotensi menciptakan kapal nelayan yang sekaligus dapat difungsikan menjadi alat pertahanan laut Indonesia. Kapal tersebut dapat dilengkapi dengan alat-alat pertahanan yang dapat difungsikan nelayan sebagai komponen cadangan yang telah tersertifikasi dan mendapatkan pelatihan. Hal ini juga dapat menjadi solusi terhadap permasalahan krisis perbatasan laut Indonesia. Selain dapat menambah kekuatan pertahanan laut Indonesia, nelayan yang dilengkapi dengan kapal pertahanan dapat melaut dengan lebih produktif tanpa takut ancaman dari kapal asing.

Pembentukan Komponen Cadangan Melalui Nelayan Pulau Natuna

Saat ini TNI-AL tidak memiliki cukup armada untuk mengamankan wilayah perairan Indonesia. Alusista TNI-AL masih memberi tempat kepada kapal-kapal perang produksi lama eks Jerman Timur dan Belanda. Bahkan untuk negara maritim seperti Indonesia, TNI-AL hanya memiliki empat unit kapal selam yang tentu saja belum memadai untuk membentengi wilayah laut Indonesia. Kondisi ini jelas membuat wilayah laut Indonesia sangat rentan akan penyusup baik yang bermotif ekonomi seperti pencurian ikan dan perompakan maupun yang terkait dengan misi intelejen asing.

Menurut Profesor Hasjim Djalal, saat ini kelemahan *lawenforcement* di laut sudah menjadi masalah nasional bagi Indonesia seperti halnya IUU *Fishing*, segala bentuk penyelundupan, perompakan, keselamatan pelayaran dan lain sebagainya. Permasalahan tersebut bukan hanya sebatas tanggung jawab law enforcement tapi juga melibatkan pengelolaan laut yang baik. Salah satu langkah yang bisa dilakukan dalam melakukan pengelolaan laut yang baik adalah dengan mengikutsertakan peran nelayan (Nasution, 2018).

Jika mengacu pada hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ke-2 dalam pasal 30 dijelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib untuk ikut serta dalam usaha

pertahanan dan keamanan negara, dimana rakyat dapat ditempatkan menjadi komponen cadangan jika telah mendapatkan pelatihan kemiliteran dan mendaftarkan diri menjadi komponen cadangan ditempatkan sebagai komponen pendukung. Jika lebih dikhususkan pada pertahanan dan keamanan laut maka nelayan adalah masyarakat yang paling sesuai untuk menjadi komponen cadangan bagi instansi penegak hukum laut.

Sedangkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara disebutkan bahwa Komponen Cadangan merupakan Sumber Daya Nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Salah satu usaha Pengelolaan Sumber Daya Nasional adalah dengan pembentukan komponen Cadangan. Komponen Cadangan terdiri dari Warga Negara, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan Sarana dan Prasarana Nasional. Komponen Cadangan warga negara terdiri dari komponen cadangan matra darat, matra laut, dan matra udara. Perekrutan Komponen cadangan terdiri dari pendaftaran, seleksi, pelatihan dasar kemiliteran, dan penetapan. Pelatihan dasar kemiliteran dilakukan selama 3 bulan. Setelah lulus dari sebagai komponen cadangan, masa pengabdian komponen cadangan dibagi menjadi dua yaitu masa aktif (saat mengikuti pelatihan dan penyegaran serta mobilisasi) maupun masa tidak aktif (bisa kembali sesuai dengan profesinya).

Sementara itu khusus profesi tentang Nelayan berdasarkan UU No. 45 tahun 2009 adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Sudah tentu nelayan lebih mengenal laut daripada masyarakat yang hidup di darat. Sehingga peran nelayan untuk mencegah ancaman pertahanan laut menjadi potensi besar untuk mewujudkan kedaulatan laut Indonesia.

Pelibatan nelayan untuk mempertahankan wilayah laut NKRI sebagai komponen cadangan TNI AL ini merupakan solusi yang menguntungkan di semua pihak. Hal ini mengingat armada laut Indonesia belum mencukupi untuk menjaga keamanan maritim ditambah pelanggaran batas laut yang terjadi oleh China membuat nelayan lokal menjadi takut untuk melaut. Dengan menjadikan nelayan sebagai komponen cadangan membuat nelayan lokal menjadi lebih tangguh.

Pelatihan kemiliteran yang diberikan selama 3 bulan kepada komponen cadangan dapat meningkatkan kapasitas nelayan dalam menjaga perbatasan laut Indonesia. Selain itu, sebagai komponen cadangan, nelayan juga harus dibekali dengan peralatan berupa kapal yang memiliki kapasitas untuk pertahanan sehingga dapat mengatasi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maupun dapat berkoordinasi langsung dengan penegak hukum laut. Kapal tersebut dapat dikembangkan dari industri pertahanan dalam negeri seperti PT. PAL sehingga desain dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan nelayan menjaga keamanan



Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

maritim Indonesia. Peningkatan kapasitas diri dan peralatan tersebut dapat mewujudkan nelayan Indonesia yang tangguh.

Ketangguhan dari nelayan Indonesia yang telah memiliki kapasitas berupa kemampuan dan alat tentunya dapat memberikan *deterrence effect* bagi negara-negara lain. Hal ini tentunya juga membuat kapal-kapal asing dan kapal pencuri ikan menjadi segan dengan pertahanan Indonesia.

Jika berkaca dari China yang notabennya juga sebagai negara kontinental sudah lebih dahulu melibatkan peran nelayan untuk membantu instansi penegak hukum lautnya. China membentuk Milisi Maritim yang beranggotakan nelayan yang sudah terlatih dan terorganisasi secara rapi. Mereka juga disebut sebagai *hybrid civilian-naval force* karena secara tidak langsung ikut terintegrasi sebagai penegak hukum yang tidak resmi dan komponen pembantu angkatan laut. Selain China, Jepang juga sudah berencana melibatkan nelayannya untuk ikut berpatroli bersama penjaga pantai demi menjaga sumberdaya ikannya yang sering diambil secara ilegal oleh nelayan Korea Utara.

Penutup

Pemberdayaan nelayan dalam upaya menjaga keamanan maritim Indonesia merupakan solusi yang menguntungkan semua pihak. Krisis perbatasan yang terjadi membuat nelayan menjadi takut melaut di wilayah NKRI. Pembentukan nelayan sebagai komponen cadangan dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia merupakan salah satu wujud bela negara.

Begitu juga dengan sektor Industri pertahanan Indonesia dalam hal ini PT PAL dirasa mampu menciptakan kapal yang dapat menunjang nelayan Indonesia sebagai komponen cadangan dalam melaksanakan tugasnya menjaga kedaulatan laut Indonesia. Peningkatan kapasitas kapal-kapal nelayan yang dirancang untuk pertahanan laut Indonesia dapat memberikan *deterrence effect* kepada kapal-kapal asing yang ingin masuk ke perairan Indonesia sekaligus dapat memberikan rasa aman bagi nelayan ketika sedang melaut di wilayah NKRI. Hal ini merupakan wujud dari ketangguhan nelayan Indonesia. Ketangguhan nelayan merupakan cerminan dari ketangguhan rakyat Indonesia dan ketangguhan bangsa Indonesia.***

DAFTAR PUSTAKA

- Angga Nurdin Rachmat. 2014. Tantangan dan Peluang Perkembangan Teknologi Pertahanan Global Bagi Pembangunan Kekuatan Pertahanan Indonesia. Adalah Dosen pada Jurusan Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani dengan bidang Kajian Keamanan Global dan Diplomasi Publik. H.199-212.
- Detiknews. 2020. Nelayan Natuna Takut Melaut Sejak Coast Guard China Masuk Perairan RI. Diakses pada 07 Februari 2020 dari <https://m.detik.com/news/berita/d-4846035/nelayan-natuna-takut-melaut-sejak-coast-guard-china-masuk-perairan-ri>.
- Kementerian Perikanan Jepang Anggarkan 12 Miliar Yen Bantu Nelayan Hadapi Korea Utara, 12 Desember 2017, dalam <http://www.tribunnews.com>, diakses pada 20 Februari 2018.
- Kerugian yang ditanggung mencapai Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan 2016 dalam Orasi Ilmiah Menteri Kelautan dan Perikanan, 10 November 2017, Universitas Airlangga. bikin grafik pencurian ikan.
- Nasution, Anta. 2018. Peran Nelayan Dalam Membantu Instansi Penegak Hukum Laut Untuk Mencegah Ancaman Keamanan Maritim. Jurnal Pertahanan & Bela Negara April 2018, Volume 8 Nomor 1.
- Presentasi Asops Kasal pada Seminar "Penegakan Hukum Pada Penangkapan Ikan Illegal Oleh Kapal Asing Di ZEEI", 24 Oktober 2017, Universitas Indonesia.
- Presentasi Koordinator Satgas 115 pada Seminar "Penegakan Hukum Pada Penangkapan Ikan Illegal Oleh Kapal Asing Di ZEEI", 24 Oktober 2017, Universitas Indonesia.
- Sinulingga, "Penanganan *Illegal Fishing* di Perairan Indonesia, Studi Kasus : *Illegal Fishing* Periode 2009-2014", Tesis, Program Pascasarjana, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia, 2016.
- Tampi, Butje. 2017. Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia dengan China (suatu Kajian Yuridis). Jurnal Hukum Unsrat. Vol. 23/No. 10/ Juli-Desember/2017.
- Artikel ini telah tayang di [Tribunnews.com](https://www.tribunnews.com) dengan judul "Si Vis Pacem Para Bellum", <https://www.tribunnews.com/tribunners/2018/11/28/si-vis-pacem-para-bellum>. Editor: Hasanudin Aco
- Menhan Prabowo Subianto pada Rapat rapat perdana dengan Komisi I DPR pada Senin (11/11/2019).

Wamenhan Raker Dengan Komisi I DPR RI Bahas Laporan Keuangan Kemhan TA. 2019.

(Rabu, 2 September 2020)

Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono dengan didampingi Sekjen Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., Irjen Kemhan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana, S.I.P., M.M beserta jajaran Kemhan, melakukan Raker dengan Komisi I DPR RI, Rabu (02/9), di Komplek DPR RI. Raker kali ini membahas Laporan Keuangan Kemhan TA. 2019.

Pada kesempatan tersebut Wamenhan menyampaikan Laporan Keuangan Kemhan TA. 2019 berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019. Laporan ini merupakan penyajian manajemen Kementerian Pertahanan berdasarkan Pelaporan Transaksi dan Standar Akuntansi Pemerintah serta Sistem Pengendalian Internal yang memadai.



Dok Foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Sekjen Kemhan Hadiri Roll Out Ceremony Pesawat F-16 Falcon Star eMLU.

(Jumat, 28 September 2020)

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, M.D.S menghadiri acara Roll Out Ceremony Pesawat F-16 Falcon Star eMLU, Jumat (28/9) bertempat di Hanggar Skadron 3 Lanud Iswahjudi Madiun Jawa Timur.

Dua Pesawat Tempur F-16 A/B yang telah di Upgrade melalui program Falcon Star –eMLU menambah kekuatan Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi. Kedua pesawat ini resmi di operasionalkan di Skadron Udara 3 setelah penandatanganan berita acara serah terima oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P kepada Danlanud Iswahjudi Marsma TNI Widyargo Ikoputra, S.E., M.M melalui prosesi acara Roll Out Ceremony Pesawat F-16 Falcon Star-eMLU TS-1601 dan TS 1610.



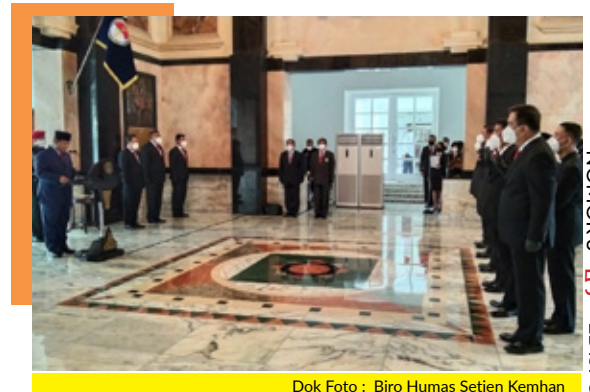
Dok Foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Menteri Pertahanan RI Memimpin Sertijab Enam Pejabat Eselon I di Lingkungan Kemhan.

(Kamis, 1 Oktober 2020)

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto Memimpin Upacara Serah Terima Jabatan dan Pelantikan 6 (Enam) Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertahanan, Kamis (1/10) di Kantor Kementerian Pertahanan Jakarta.

Enam Pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan dan pelantikan tersebut antara lain Marsda TNI Dody Trinus kepada Mayjen TNI Budi Prijono, S.T.,M.M. sebagai Dirjen Renhan Kemhan, Pembina Utama IV/e Prof. Dr.Ir. Bondan T.S., M.Si. kepada Brigjen TNI Dadang Hendra Yudha sebagai Dirjen Pothan Kemhan, Mayjen TNI Budi Prijono, S.T.,M.M. kepada Marsma TNI Yusuf Jauhari, S.Sos., M.Eng. sebagai Kabarannya Kemhan, Pembina Utama IV/e Dr. Ir. Anne Kusmayati, M.Sc. kepada Marsda TNI Julexi Tambayong sebagai Kabalitbang Kemhan, Laksda TNI Benny Rijanto Rudi S., M.B.A. kepada Mayjen TNI (Mar) Joko Supriyanto, S.H. sebagai Kabadiklat Kemhan, Mayjen TNI (Mar) Joko Supriyanto, S.H kepada Brigjen TNI Yulius Selvanus sebagai Kabainstrahan Kemhan.



Dok Foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Wamenhan dan Jajaran Kemhan Ikuti Upacara HUT ke-75 TNI Secara Virtual.

(Senin, 5 Oktober 2020)



Dok Foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., mengikuti Upacara HUT ke-75 TNI yang dilaksanakan secara virtual, Senin (5/10) di Aula Bhineka Tunggal Ika, Kemhan.

Pada Peringatan HUT Ke-75 TNI tahun 2020 yang mengambil tema "Sinergi Untuk Negeri", Presiden RI Joko Widodo dalam amanatnya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada prajurit TNI yang selalu berada di garda terdepan dalam misi kemanusiaan. Presiden lebih lanjut juga menekankan kepada TNI agar terus meningkatkan kemampuan, profesionalisme, dan kesiapsiagaan untuk menerima penugasan.

Menhan Memeriksa Kesiapan Penyerahan Rantis Maung Produksi PT. Pindad.

(Kamis, 8 Oktober 2020)



Dok Foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto, Kamis (8/10) memeriksa kesiapan kendaraan taktis 4x4 Maung buatan PT. Pindad yang akan diserahkan secara simbolis dari Kementerian Pertahanan kepada Mabes TNI. Kendaraan taktis Maung ini akan digunakan dalam operasi-operasi TNI di seluruh Indonesia. Rencananya penyerahan kendaraan taktis Maung ini akan diserahkan secara simbolis kepada Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Sebelumnya, pada bulan Juli (12/7) di sirkuit Sentul Bogor, Menhan RI telah melakukan uji coba kendaraan taktis ini yang pada saat itu langsung diberi nama Maung oleh Menhan RI. Direktur Utama PT Pindad (Persero), Abraham Mose pada saat itu mempresentasikan kendaraan taktis Maung yang ditujukan untuk pasukan infantri.

Korpri Kemhan Mendukung Kesuksesan Program dan Kebijakan Kemhan.

(JRabu, 14 Oktober 2020)



Dok Foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., menghadiri Rapat Dewan Pengurus Korpri Kemhan Periode 2020-2025, Rabu (14/10), di Kantor Kemhan, Jakarta. Dalam sambutannya Sekjen Kemhan mengatakan bahwa Korpri Kemhan semakin berperan aktif untuk selalu memberikan kontribusi terhadap keberhasilan tugas Kemhan dalam menyelenggarakan tugas pokok pertahanan negara.

Dalam sambutannya Sekjen Kemhan mengatakan bahwa Korpri Kemhan semakin berperan aktif untuk selalu memberikan kontribusi terhadap keberhasilan tugas Kemhan dalam menyelenggarakan tugas pokok pertahanan negara.





MINISTRY OF DEFENSE OF
REPUBLIC OF INDONESIA

ENGLISH

ISSN 1693-0231



WIRA

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN



Independence of the Defense Industry

EDITION OF OCTOBER - NOVEMBER 2020 NOMOR 3

7.8.9.10
APRIL 2021

**JIEXPO KEMAYORAN
JAKARTA-INDONESIA**



INDO DEFENCE
2021 EXPO & FORUM

INCORPORATING WITH

INDO
AEROSPACE
2021 EXPO & FORUM

INDOMARINE
2021 EXPO & FORUM

THE 9th INDONESIA'S OFFICIAL TRI-SERVICE DEFENCE, AEROSPACE, MARITIME, AND SECURITY EVENT

*"Building Peace, Stability, and Prosperity Through Defence
Industry Cooperation"*



www.indodefence.com

 **Indo Defence Expo & Forum**

 **@IndoDefence**

 **@Indo_Defence**

For further information, please contact

Ms. Lisa Rusli

Senior Project Manager
Mobile : +62 815-1822-716
E-mail : yulisa@napindo.com

Ms. Lizananda Prihutami

Senior Project Executive
Mobile : +62 852-8287-8868
E-mail : nanda@napindo.com

**Official And Exclusive
Show Daily**



Organised by

Showing The Way!



PT Napindo Media Ashatama

Telp. : +6221 8644756/85 8650962
Fax : +6221 8650963
Email : info@napindo.com

EDITORIAL TEAM

Advisor:

Secretary General of MoD/Air Marshal Donny Ermawan T., M.D.S.

Editor in Chief:

Head of Public Relation Bureau of the Sec.Gen of MoD/Brig. Gen TNI Ignatius Eko Djoko P, S.E., M.M.

Managing Editor:

Chief of Public Information and Library of Public Relation Bureau of The Sec. Gen of MoD/ Col. Hadi Prayitno

Editors:

M. Adi Wibowo, M.Si./Captain Lindu Baliyanto-

Graphic Designer:

Imam Rosyadi/Mandiri Triadi, S.Sos.

Photo:

Photografers of Public Relations Bureau

Distribution Staff:

Dian Ayu Ningtyas, M.M.

Published by:

Public Relation Bureau of the Sec.Gen of MoD
- Jl. Merdeka Barat No. 13-14, Jakarta -Telp. 021-3829151, Fax. 3452457



Dear WIRA readers,

Praise be to the presence of Almighty God, because with His permission, Wira Kemhan Magazine greets WIRA readers again through the October-November 2020 Edition Number 3. In this edition, the editorial team will present some information and articles that are worthy of being listened to by readers WIRA.

The information we provide is related to the activities of the Ministry of Defense leadership which are summarized in the Leadership Focus rubric starting from the Minister of Defense, Deputy Minister of Defense, Secretary General of the Ministry of Defense and Inspector General of the Ministry of Defense. Besides that in this edition, we also present all the defense news.

There is an article that the editorial team presents regarding some of The Minister of Defense's Concern Towards the Disable Person, an Elementary School Student From Kupang Through the Defense Rehabilitation Centre, The Role of Culture in Manifesting The Independence of the Defense Industry, The Important Role of Flying Boat Towards the Condition of Indonesia's Geographic Region And National Defense Aspects, and Enhancing the Defense Industry and Empowering Strong Fishermen to Deal with the Natuna Crisis.

Meanwhile, in the column for defense news, the editorial staff broadcasts about The Deputy Minister of Defense Work Meeting with Commission I DPR RI To Discuss the Financial Reports of the Ministry of Defense FY 2019, The Secretary General of the Ministry of Defense attended the eMLU F-16 Falcon Star Aircraft Roll Out Ceremony, The Indonesian Minister of Defense Leads Handover of Six Echelon I Officials in the Ministry of Defense, The Deputy Minister of Defense and the officials of the Ministry of Defense Participate in Virtual TNI 75th Anniversary Ceremony, Minister of Defense Checks Readiness to Handover Rantis Maung Production of PT. Pindad, Korpri Kemhan Supports the Success of Kemhan's Programs and Policies.

To enrich this WIRA magazine article, we always expect the participation of readers to send writing, whether in the form of articles, opinions, information, feedback or criticism and suggestions, via email redaksi.wira@kemhan.go.id. WIRA Magazine can also be accessed in the online network on the page www.kemhan.go.id.

Happy reading...!!!

Head of Public Relation Bureau of the Sec.Gen of MoD,

Brig. Gen I.E. Djoko Purwanto, S.E., M.M.



LEADERS FOCUS>>

MINISTER

6-15

The Indonesian Minister of Defense Receives Honorary Visit from the Chinese Minister of Defense

Joint Statement Regarding the Defense Minister's Meeting Dr. Mark T. Esper with Minister of Defense Prabowo Subianto

Indonesian Minister of Defense Meets the Austrian Minister of Defense to Discuss Defense Cooperation

The Indonesian Minister of Defense and the French Minister of Defense Discuss the National Defense Industry Partnership

VICE MINISTER

16-23

Deputy Minister of Defense Gives PT DI Direction for the Advancement of the Defense Industry

Deputy Minister of Defense reviews PT Pindad's readiness in the Food Security Program

The Indonesian Deputy Minister of Defense Reviewed Potential Locations for Food Estate in West Java

Ministry of Defense Builds Digital Document Filing System

SEC. GEN

24-29

Secretary General of the Ministry of Defense Leads the Socialization of the Establishment of Defense Industry BUMN Holding

Secretary General of the Ministry of Defense: Defence Industry independence is important in creating a strong national defense system

The Secretary General of the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia: The Youth Spirit of Achievement Through Profession to Defend the State



Maung Tactical Vehicle Product of PT. Pindad

Source : PT. Pindad

ARTICLE



28-31

The Minister of Defense's Concern Towards the Disabled Person, an Elementary School Student From Kupang Through the Defense Rehabilitation Centre (Writer: Erlin Sudarwati, SKM,MM)



32-37

The Role of Culture in Manifesting The Independence of the Defense Industry (Writer: Dr. Ernalem Bangun, M.A.)

38-46

The Important Role of Flying Boat Towards the Condition of Indonesia's Geographic Region and National Defense Aspects (Writer: Brig. Gen W. Jati Wahono)

48-54

Enhancing the Defense Industry and Empowering Strong Fishermen to Deal with the Natuna Crisis (Writer: Col. Darwin Saputra S.IP.,M.Han)

ANY ALL NEWS

55-56

The Deputy Minister of Defense Work Meeting with Commission I DPR RI To Discuss the Financial Reports of the Ministry of Defense FY 2019

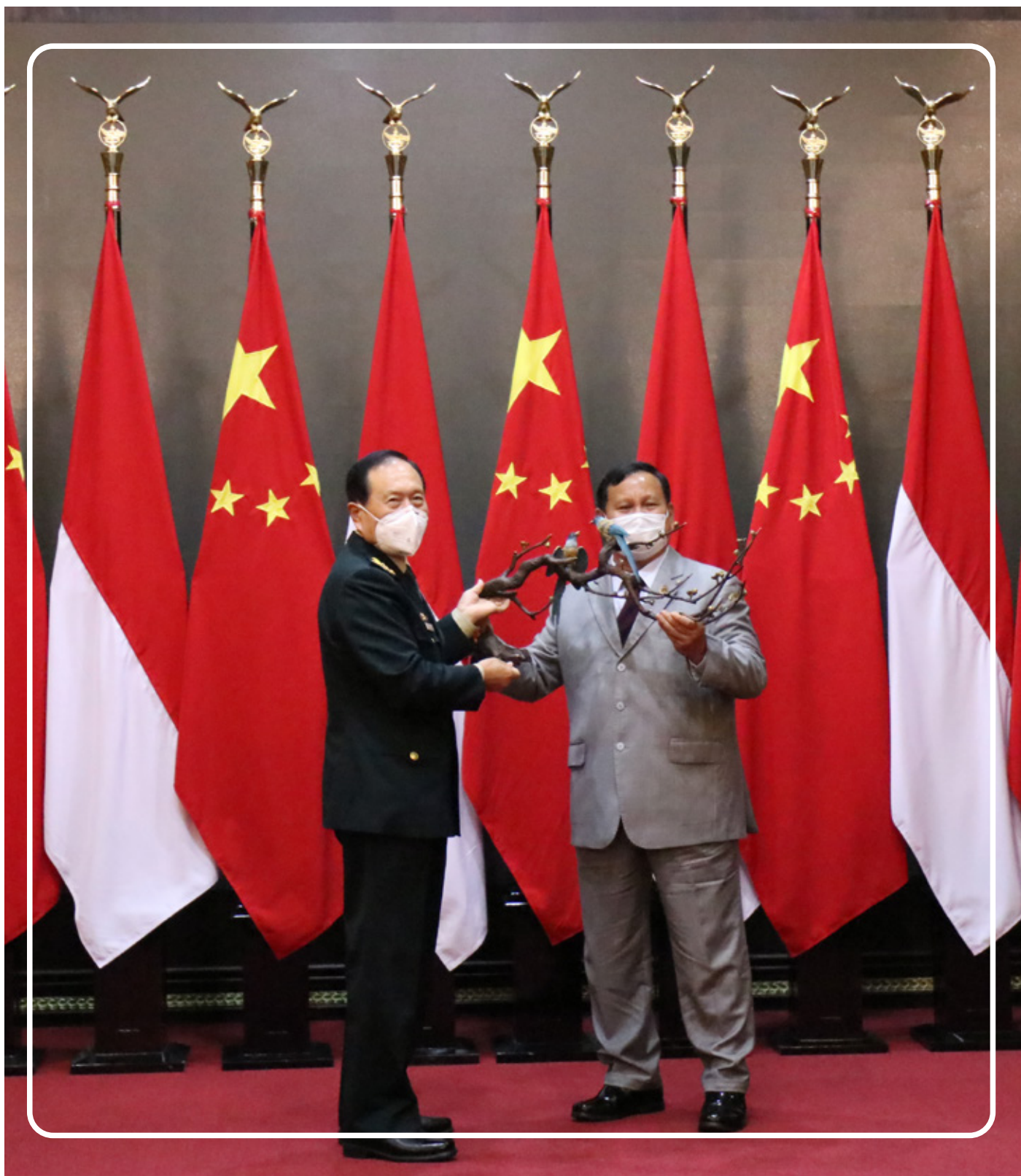
The Secretary General of the Ministry of Defense attended the eMLU F-16 Falcon Star Aircraft Roll Out Ceremony

The Indonesian Minister of Defense Leads Handover of Six Echelon I Officials in the Ministry of Defense

The Deputy Minister of Defense and the officials of the Ministry of Defense Participate in Virtual TNI 75th Anniversary Ceremony

Minister of Defense Checks Readiness to Handover Rantis Maung Production of PT. Pindad

Korpri Kemhan Supports the Success of Kemhan's Programs and Policies



THE INDONESIAN MINISTER OF DEFENSE RECEIVES HONORARY VISIT FROM THE CHINESE MINISTER OF DEFENSE



Source : Public Relations Bureau of the Secretariat General MoD

The Minister of Defense of the Republic of Indonesia Prabowo Subianto received an honorary visit from the Chinese State Councilor and Defense Minister HE General Wei Fenghe, Tuesday (8/9), at the Ministry of Defense Office, Kemhan, Jakarta. When receiving the visit of the Chinese Defense Minister and his entourage, the Indonesian Minister of Defense was accompanied by the Deputy Minister of Defense Sakti Wahyu Trenggono along with the TNI Commander in Chief Marshal TNI Hadi Tjahjanto, Deputy Chief of Staff of the Indonesian Army Lieutenant General TNI Moch. Fachrudin, Chief of Navy Staff Admiral TNI Yudo Margono, and Chief of Air Force Staff Marshal TNI Fadjar Prasetyo.

Meanwhile, the Chinese Defense Minister was accompanied by the Chinese Ambassador to Indonesia HE Xiao Qian, Deputy Commander of the Southern Theater Command Lieutenant General (Air Force) Jia Zhigang, Deputy Chief of the Office for International Military Cooperation of Central Military Commission (OIMC) Major General Song Yanchao, Director General of Research Bureau of General Office of Central Military Commission Major General Liu Yantong.

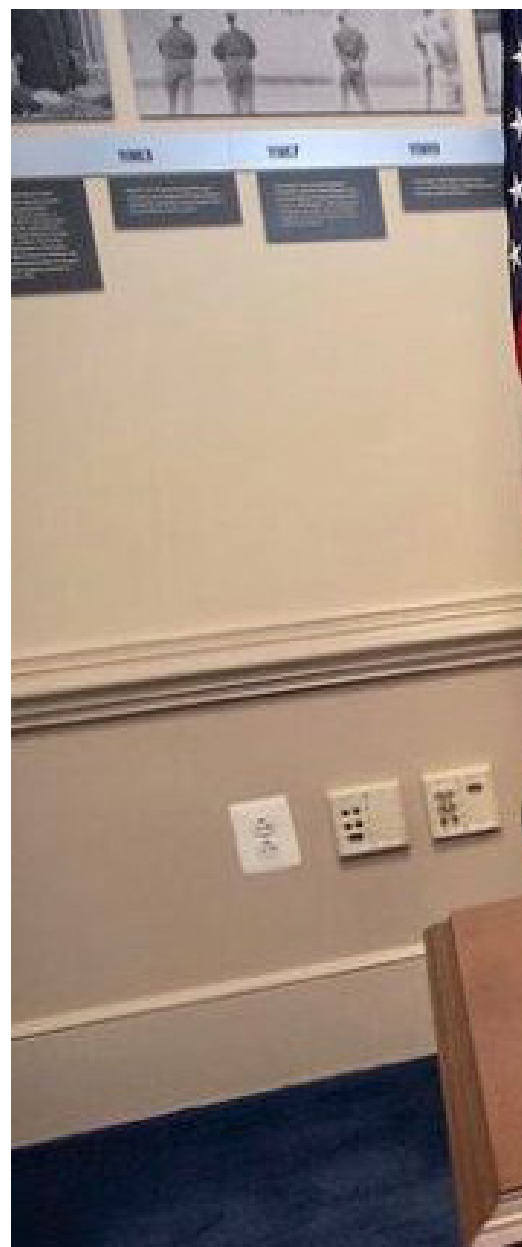
The Chinese Defense Minister and his delegation arrived in Indonesia on Tuesday, September 8, 2020 at Halim Perdanakusuma International Airport using a special PLA Airplane from Beijing to hold several meetings with the Indonesian Defense Minister. The meeting of the Defense Ministers of the two countries consisted of a bilateral meeting in the Bhineka Tunggal Ika Hall which was preceded by a

preliminary meeting with the Indonesian Defense Minister, the TNI Commander, and the Chiefs of Staff of the Services.

In the bilateral meeting between the Ministries of Defense of the two countries, various important matters relating to national defense were discussed, among others; The strategy of the Indonesian government in preventing the spread/transmission of Covid-19 in society and the strategy of the Indonesian Ministry of Defense in dealing with it, the development of cooperation in handling Covid-19 between Indonesia and China, cooperation between the Indonesian and Chinese Defense Industries, educational cooperation and the latest issues in the Asian region Pacific. Furthermore, a meeting was also held between the Defense Ministers of the two countries and the Coordinating Minister for Maritime Affairs in the Indonesian Defense Minister's Workroom, which was followed by dinner.

Also attending the meeting were Secretary General of the Indonesian Ministry of Defense, Air Marshal TNI Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., Inspector General of the Ministry of Defense, Lt. Gen TNI. Ida Bagus Purwalaksana S.I.P, MM, Rector of the Defense University, Vice Admiral TNI Dr. Amarulla Octavian, ST, M.Sc., DESD., Special Assistant to the Minister of Defense Bid. Jemenhan Sjafrie Sjamsoeddin, Special Assistant to the Minister of Defense Bid. Lingstra and Hubtarlem Marsda TNI (Ret.) Bambang Eko Suhariyanto, SH, MH, and Echelon I officials of the Ministry of Defense. ***

Joint Statement Regarding the Defense Minister's Meeting Dr. Mark T. Esper with Minister of Defense Prabowo Subianto



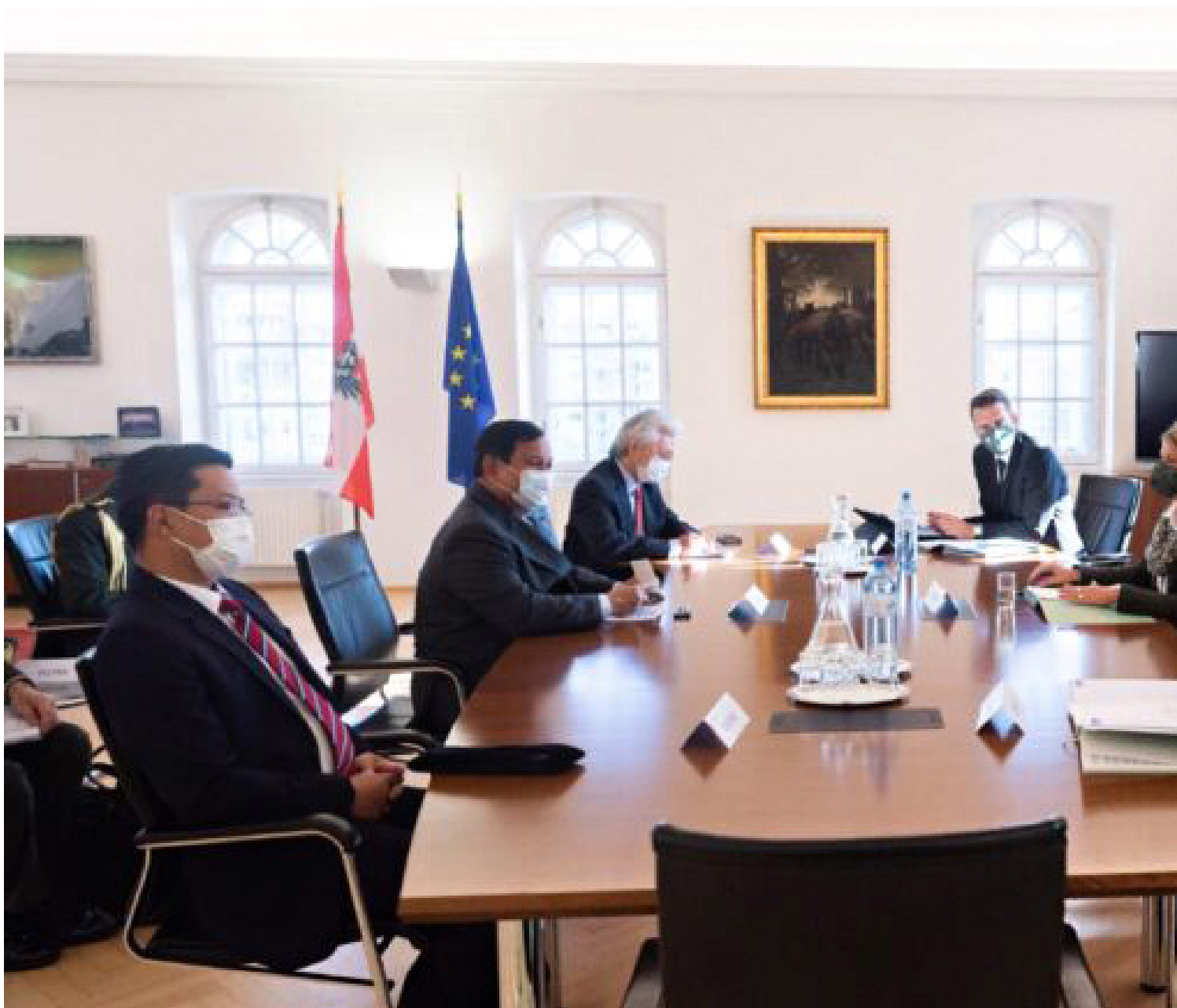


Source : Public Relations Bureau of the Secretariat General MoD

The US Secretary of Defense, Dr. Mark T. Esper met with the Indonesian Minister of Defense, Prabowo Subianto, at the Pentagon, Washington, DC, United States, to discuss regional security, bilateral defense priorities, and defense acquisitions.

Defense Minister Esper conveyed the importance of upholding human rights, rule of law, and professionalization when the two countries expand their cooperation. Defense Minister Prabowo stated the importance of military involvement at all levels, and expressed his appreciation for the support of the United States for the modernization of Indonesia's defense.

The two leaders share a desire to increase bilateral military-to-military activities and cooperate on maritime security. Defense Minister Esper and Defense Minister Prabowo signed a Memorandum of Intent to advance the Defense Prisoner of War/ Missing in Action Accounting Agency efforts to restart their work in Indonesia to repatriate the bodies of US personnel who disappeared in Indonesia during World War II. The two Defense Ministers expressed their sympathy for those affected by COVID-19 in the United States and Indonesia. ***



The Indonesian Minister of Defense, Prabowo Subianto, Tuesday (20/10), made a visit to Vienna, Austria, to meet with the Austrian Minister of Defense, Klaudia Tanner. The visit of the Indonesian Minister of Defense was intended to enhance bilateral cooperation in the defense sector between the two countries.

The arrival of the Indonesian Minister of Defense Delegation accompanied by the Indonesian Ambassador to Austria, Dr. Darmansjah Djumala,

member of the Indonesian House of Representatives Commission I, Sugiono, and, Berlin Defense Attache, Col. Kav. Rio Hendrawan Alin Putra, at the Austrian Ministry of Defense Office, was greeted with a military tribute ceremony by the Austrian Armed Forces of Honor.

On the occasion of the meeting which lasted for about an hour, the two Defense Ministers discussed opportunities to increase bilateral cooperation in the defense sector which could be further explored



Source : Public Relations Bureau of the Secretariat General MoD

INDONESIAN MINISTER OF DEFENSE MEETS THE AUSTRIAN MINISTER OF DEFENSE TO DISCUSS DEFENSE COOPERATION

through the formation of a Memorandum of Understanding (MoU) as an umbrella agreement for defense cooperation between the two countries in the future. Apart from discussing defense issues, the two Ministers also shared information on developments in the handling of the Covid-19 pandemic in their respective countries. ***

THE INDONESIAN MINISTER OF DEFENSE AND THE FRENCH MINISTER OF DEFENSE DISCUSS THE NATIONAL DEFENSE INDUSTRY PARTNERSHIP



Source : Public Relations Bureau of the Secretariat General MoD



The Indonesian Minister of Defense Prabowo Subianto, Wednesday (21/10) held a bilateral meeting with the French Minister of Defense, Florence Parly, at the French Defense Ministry Office in Paris, France. At the meeting, the Indonesian Defense Minister was accompanied by Indonesian Ambassador Arrmanatha Nasir, Special Assistant to the Indonesian Minister of Defense, and the Indonesian Defense Attaché.

In the meeting, the two Defense Ministers discussed the development of the situation and dynamics of the Indo-Pacific region. In this case, France pays special attention to the Indo-Pacific region, considering that apart from owning territories, around 1.6 million people are in the Indo-Pacific Region. In this context, the two Ministers emphasized the importance of continuing to contribute in maintaining the stability and security of the Region.

The two Defense Ministers specifically discussed the framework for future defense cooperation. The various advances that have been made in strengthening defense cooperation between the two countries this year, including efforts to advance Indonesia's defense industry, were welcomed by the two Defense Ministers.

"I have recorded quite rapid progress from the strategic partnership between Indonesia and France in the defense sector in this year. Indonesia wants to continue to develop cooperation with France in various defense sectors including strengthening the

TNI defense system and advancing the capacity of the Indonesian defense industry as part of the global production chain for defense equipment products," said Defense Minister Prabowo at the meeting.

As is known, at a meeting last January, the two Defense Ministers agreed to make a Defense Cooperation Agreement (DCA). The agreement will cover comprehensive defense cooperation, such as cooperation in the fields of education and military training, maritime security, eradicating terrorism, developing the defense industry to strengthening capacity in disaster management such as

the Covid-19 pandemic currently hitting the two countries. In this regard, the two Defense Ministers requested that the negotiating team immediately complete the DCA, to be signed by the two Ministers at the end of this year, as part of the 70th anniversary of the diplomatic relations between the two countries.

The second meeting of the Defense Ministers, which is the second time this year, shows the intensification of communication and defense cooperation between the two countries. "In the midst of the Covid-19 pandemic, which requires various activities to be postponed, Indonesia-France cooperation in the defense sector is getting closer, not only seen from the intensity of communication between the two Defense Ministers but also with the activities of the Strategic Defense Equipment Cooperation working group which has met twice this year. "Concluded the Indonesian Ambassador, Arrmanatha Nasir.

The Indonesian-French cooperation in the defense sector has been based on an agreement between the two countries in 2017 through a Letter of Intent (LoI) or a Statement of Intent to increase defense cooperation including maritime cooperation and maritime security. Every year since 2013, bilateral defense cooperation in several fields such as training and education, mutual visits, and the eradication of terrorism have been discussed through the Indonesia-France Defense Dialogue forum (Indonesia-France Defense Dialogue / IFDD).***

DEPUTY MINISTER OF DEFENSE ADVANCEMENT OF THE DEFENSE



Source : Public R

GIVES PT DI DIRECTION FOR THE INDUSTRY



The Indonesian Deputy Minister of Defense Sakti Wahyu Trenggono, Friday (28/8), paid a working visit to the Defense Industry of PT Dirgantara Indonesia (PT DI), which is located in Bandung, West Java. The Deputy Minister of Defense's first visit to PT DI was to provide direction for the future progress of PT DI which was followed by an explanation as well as a discussion and question and answer.

In his direction, the Deputy Minister of Defense hoped that PT DI could actively contribute to the fulfillment of the TNI's defense equipment and make improvements to facilities and infrastructure in the next four years, after the end of the 2024 Strategic Plan.

To the officials of PT DI, the Deputy Minister of Defense reminded to strengthen or support the micro industries involved in it in order to realize the independence of the domestic defense industry.

In his presentation, President Director of PT DI Elfen Goentoro conveyed the readiness of PT DI to meet the needs of the Ministry of Defense/TNI in realizing the independence of domestic defense equipment. PT. DI hopes to be given the opportunity to fulfill the Indonesian Ministry of Defense Strategic Plan 2020-2024 which can then be used as a foundation in building PT DI's

capabilities through strategic partners to acquire technology transfer earlier.

PT DI hopes that there will be an optimal implementation of local content and/or offsets in accordance with Presidential Regulation Number 54 of 2010 and Law Number 16 of 2012.

The existence of PTDI will be very meaningful if every product and service it produces is utilized maximally by all agencies and state institutions in Indonesia including the Ministry of Defense / TNI, which has been PTDI's biggest customer.

On this occasion, the Deputy Minister of Defense who was accompanied by the Director General of Strong Defense and Head of The Defense Facilities had the opportunity to visit aircraft production facilities, such as CN235, NC212i and N219 as well as helicopters.

The Deputy Minister of Defense also witnessed several products produced by the nation's children including the display of the PTTA Wulung ground control station and products from the consortium of the Ministry of Defense, BPPT, Indonesian Air Force, Lapan, PT DI, LEN and ITB. After visiting PT DI, on the same day, the Deputy Minister of Defense continued his visit to PT Pindad.***

DEPUTY MINISTER OF DEFENSE REVIEWS PT PINDAD'S READINESS IN THE FOOD SECURITY PROGRAM



Deputy Minister of Defense Sakti Wahyu Trenggono paid a working visit to PT Pindad in Bandung, Friday (28/8). This visit was to see the readiness of PT Pindad in supporting government programs, especially in realizing food security in which the Ministry of Defense is the leading sector. The plan to develop the "Food Estate" area in Central Kalimantan which was announced by the President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, is a collaboration between the Ministry of Defense, the Ministry of PUPR, the Ministry of Agriculture, the Ministry of Environment and Forestry and the Ministry of BUMN. To make the program successful, the Deputy Minister of Defense saw firsthand the readiness of PT. Pindad



Source: Public Relations Bureau of the Secretariat General MoD

in producing Excava Agricultural System Equipment and other supporting tools.

Upon arrival at PT. Pindad Wamenhan was received by the President Director of PT. Pindad Abraham Mose, followed by a factory visit or plant tour.

The Deputy Minister of Defense and his entourage's plant tour began by reviewing the agro innovation of a multipurpose tractor farming system (excava), the Assy and testing room, the mechanical Assy sub room and the 4 × 4 production line, Komodo, Medium Tank, 6 × 6 Canon 20 mm armored vehicles

and armored vehicles. anoa 6 × 6 logistic type fuel . After conducting a survey of various divisions, the Deputy Minister of Defense had the opportunity to test the latest production vehicle of Pindad Maung accompanied by the Managing Director of PT Pindad. Also present on the occasion were Head of The Defense Facilities the Ministry of Defense Maj. Gen. TNI Budi Prijono, ST, MM and the Director General of Strong Defense, Air Vice Marshal TNI N. Ponang Djawoto. (Ministry of Defense Secretariat Public Relations Bureau) ***

THE INDONESIAN DEPUTY MINISTER OF DEFENSE REVIEWED POTENTIAL LOCATIONS FOR FOOD ESTATE IN WEST JAVA

The Ministry of Defense (*Kemhan*) really concerns about developing the Food Estate Program by reviewing several potential land locations for planting strategic commodities. This was shown by a working visit from the Deputy Minister of Defense of the Republic of Indonesia Sakti Wahyu Trenggono who was accompanied by Inspector General of the Ministry of Defense Lieutenant General TNI Ida Bagus Purwalaksana, S.I.P, M.M. and the ranks of the Ministry of Defense to inspect one of the candidates for Food Estate land in the Gombor area, Subang District, West Java, Monday (19/10).

The activity begins with an aerial survey using a helicopter belonging to the Air Force to see the situation and potential land conditions, including Manyingsal Village, Kec. Cipunagara Kab. Subang, Sumurbarang Village Kec. Cibogo Kab. Subang, Kiarasari Village Kec. Compreng Kab. Subang, Bojongkeding Village Kec. Tambakdahan Kab. Subang, Cikamurang Village, Kec. Filled with Kab. Indramayu, Ujungjaya Village Kec. Ujungjaya Kab. Sumedang, and





Source : Public Relations Bureau of the Secretariat General MoD

Mekarjaya Village Kec. Kertajati Kab. Majalengka. Next, there are also locations in Karawang Regency which are located in several villages in Pangkalan District, Teluk Jambe Timur District, Tegal Waru District, and Ciampel District.

After the visit, Deputy Minister of Defense Sakti Wahyu Trenggono admitted that he was happy with the positive response from the public and the private sector in supporting the Food Estate. "I am pleased with the enthusiasm from the private sector and the public who want to participate in the Food Estate program," he said at the 7th Air Squadron Hangar, West Java.

Trenggono suggested that private parties who want to join the community in the Food Estate program have a number of things to pay attention to, especially the problem of land ownership data collection. "The owner of the land must be recorded, then invited to manage the land together. After that we provide technical assistance, farming methods, and so on in order to run Modern Farming, which ends up being corporate farming . We have to be sure that their rights (land) still belong to them, and they can still fulfill their lives while maintaining the land," he said. As is known, the Ministry of Defense is trusted to develop strategic commodities such as cassava for the Food Estate program.***

Deputy Minister of Defense Sakti Wahyu Trenggono, officially opened builds and implements the Ministry of Defense's Manuscript Digitization (Takah) system.



MINISTRY OF DEFENSE BUILDS DIGITAL DOCUMENT FILING SYSTEM



The Ministry of Defense through the Ministry of Defense's Data and Information Center (Pusdatin) builds and implements the Ministry of Defense's Manuscript Digitization (Takah) system. With this system, the document filing process within the Ministry of Defense has been done digitally.

Implementation of the system begins with the Ministry of Defense's Manuscript Digitalization Socialization activity which is carried out virtually and officially opened by Deputy Minister of Defense Sakti Wahyu Trenggono, Tuesday (3/11) in Jakarta.

In his speech, the Deputy Minister of Defense, who was delivered virtually, welcomed the digitalization of the Ministry of Defense's Manuscript Procedure. According to him, the digital document archiving process can be used for the authority to use documents and can be distributed quickly to certain parties.

With the Manuscript Digitization system, the data flow of incoming and outgoing mail documents is digitally sorted by type of letter to be passed and distributed from top management to flow gradually to staff to be implemented according to disposition.

"With this system, the Ministry of Defense has a centralized and integrated document archive database, and can support the assessment of the SPBE (Electronic Based Government System) Kemhan, because it already has a system that can share with the same system", added the Deputy Minister of Defense.

Also attending virtually at the Ministry of Defense's Manuscript Digitalization socialization event were Inspector General of the Ministry of Defense, Lt. Gen. Ida Bagus Purwalaksana, S.I.P, M.M and all Echelon I and II officials within the Ministry of Defense.***

Source : Public Relations Bureau of the Secretariat General MoD

SECRETARY GENERAL OF THE MINISTRY OF DEFENSE LEADS THE SOCIALIZATION OF THE ESTABLISHMENT OF DEFENSE INDUSTRY BUMN HOLDING



Source : Public Relations Bureau of the Secretariat General MoD

The Secretary General of the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia Air Marshal TNI Donny Ermawan Taufanto, M.D.S led the Socialization of the Establishment of the Defense Industry BUMN Holding TA. 2020, Wednesday (21/10) at the Urip Sumohardjo Building, Kemhan Jakarta. Strategic Industrial SOEs, consisting of PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, PT LEN, PT Dahana and PT PAL Indonesia participated in the Socialization of the Establishment of Defense Industry BUMN Holding at the Indonesian Ministry of Defense, Jakarta. The formation of the Defense Industry BUMN Holding in the Indonesian Industrial Defense Branding (DEFEND ID) is a form of collaboration between BUMN in the BUMN Sub-Cluster Defense Industry to realize the independence of the defense industry.

In his remarks, the Secretary General of the Ministry of Defense said that the Grand Design of the formation of BUMN Holding was to become the Top 50 Defense Industry (Indhan) at the global level, therefore the integration of strategic steps must be started in a comprehensive planning process up to feasible production. If we are faced with Indhan's current capabilities, one of the challenges we must answer in the future is to improve the professionalism of Indhan's human resources to support innovations that can compete at the international level. Furthermore, the Secretary General conveyed that this socialization had certainly provided a very important and crucial understanding and description regarding the defense industry. Each component, namely the government, users, especially the TNI and the Defense Industry, have a fundamental and active role.

In accordance with the vision, mission and objectives of its establishment, Indhan BUMN Holding has the capability to realize and improve the economy of the domestic defense industry so that it becomes more advanced, strong, independent and competitive. The Secretary General of the Ministry of Defense also emphasized that PT LEN Industri as the Lead Integrator of interested parties to focus and provide input on the plan to form the Defense Industry BUMN Holding in order to provide maximum benefits for the advancement of the domestic defense industry. To the Defense Industry BUMN in order to provide sound and relevant input on conditions in the field related to the implementation of the defense industry implementation rules so as to create good competition and financial health in the defense industry.

The event was attended by the Director General of Defense Planning the Ministry of Defense, Maj. Gen. Budi Prijono, Director General of Strong Defense of the Ministry of Defense, Air Vice Marshal, TNI N Ponang Djawoto, Director of PT LEN Zakky Gamal Yasin, Managing Director of PT Pindad Abraham Mose, Managing Director of PT Dahana Budi Antono, Managing Director of PT DI Elfen Goentono, Managing Director of PT PAL Budiman Saleh, Special Staff of the Minister of Defense Bid. Institutional Cooperation, Special Staff of the Deputy Minister of Defense Bid. Analysis of Indhan Financing, Asrenum for the TNI Commander, logistics assistant for the Commander of the TNI, logistics assistant Kasad, Deputy logistics assistant Kasal and Waasrena Kasau.***

Secretary General of the Ministry of Defense: Defence Industry independence is important in creating a strong national defense system



Source : Public Relations Bureau of the Secretariat General MoD



and technology have a direct effect on increasing the capability of the defense industry which is needed for defense and security purposes". The visit of the Secretary General of the Ministry of Defense is expected to further reinforce the Ministry of Defense's commitment to empowering domestic industries to strengthen national defense.

Previously, President Director of PT Dahana (Persero) Budi Antono in his remarks said that so far the Indonesian Ministry of Defense had greatly encouraged the advancement of the domestic defense industry, in the future it is hoped that this support can continue because the propellant industry is expected to be continuously worked on by the Domestic Defense Industry. The theme of PT Dahana (Persero) 's 54th Anniversary in 2020 this time is "Rise Together with AKHLAK for Advanced Indonesia".

This theme means that PT Dahana (Persero) as a state-owned company will be serious in implementing AKHLAK to advance Indonesia, namely Mandate, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive and Collaborative. This is implemented in the form of income for the state and to better serve this country as well as being a partner of the government in developing the defense industry in the country.

The Secretary General of the Ministry of Defense in this series of visits also carried out a plant tour or visited the buildings of PT Dahana where they were carried out. According to attending and giving his remarks at this event, the President Commissioner of PT Dahana Vice Admiral TNI (Ret) Dr. Agus Setiadji. While the Ministry of Defense officials who accompanied the Secretary General of the Ministry of Defense in this visit, the Director General of Defense Potential of the Ministry of Defense, Brigadier General of the TNI Dadang Hendrayudha, Head of The Defense Facilities of the Ministry of Defense First Marshal TNI Yusuf Jauhari, S.Sos., M.Eng, Ses Secretary of Research and Development of the Ministry of Defense Brigadier General TNI Abdullah Sani, Head of Public Relations Bureau Secretariat General of the Ministry of Defense Brigadier General TNI IE Djoko Purwanto, S.E., M.M.***

The Secretary General of the Ministry of Defense Air Marshall TNI Donny Ermawan T, M.D.S, Thursday (22/10), conducted a working visit to PT. Dahana (Persero), Subang, West Java, to attend PT. 54th Dahana. In his remarks, the Secretary General emphasized that the independence of the defense industry is very important in realizing a strong, advanced and independent national defense system. A strong industry is expected to be able to provide a multiplier effect both on economic development and mastery of technology for the Indonesian nation. The independence of the Defense Industry is also expected to realize a shift in understanding from defense spending to defense investment, as directed by the President of the Republic of Indonesia at the TNI Anniversary addressed to the Ministry of Defense and the Defense Industry. The Secretary General of the Ministry of Defense continued, PT Dahana (Persero) is one of Indonesia's strategic industries, especially in producing the propellant industry to support the independence of the defense industry.

"Increasing the capability of the national defense industry is necessary to meet and support the needs and support the independence of the TNI's Main Defense System (Alutsista). The more rapid advances in science



Source : Public Relations Bureau of the Secretariat General MoD

the Secretary General of the Indonesian Ministry of Defense, Air Marshal TNI Donny Ermawan Taufanto, M.D.S. as a resource person at the Talk Show on INews TV

The Secretary General of the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia: The Youth Spirit of Achievement Through Profession to Defend the State

The Secretary General of the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia emphasized that the future of a nation is determined by the younger generation, because the younger generation is the spearhead of the progress and development of a nation. The younger generation who have a strong physique, innovative knowledge and high creativity can be called development actors.

This statement was conveyed by the Secretary General of the Indonesian Ministry of Defense, Air Marshal TNI Donny Ermawan Taufanto, M.D.S. as a resource person at the Talk Show “The Spirit of Achieving Youth Through Profession for State Defense” in commemoration of Youth Pledge Day October 28, 2020 at INews TV Studio Jakarta, Tuesday (27/10).

In addition, the Secretary General also explained that State Defense is one of the efforts to defend and defend the state and play an active role in advancing the nation and state both in facing physical and non-physical attacks that can threaten the country's sovereignty and the progress of the nation.

The awareness of State Defense for the younger generation is intended to become a foundation in the life of the nation, society and state. Increased awareness of State Defense must crystallize in the souls of the entire Indonesian nation, including the younger generation.

The Secretary General further explained that the younger generation must be able to compete with the younger generations of other countries, have good soft skills, have a creative, active and innovative personality so that they are able to face the dynamics of increasingly fierce global competition.

“The young generation who currently have expertise and achievements in their fields are also a form of State Defense,” he explained.

The Secretary General of the Ministry of Defense also conveyed a message to the younger generation that they should be open-minded, master the world's technology and civilization, widen the network and global insight, achieve maximum achievements in accordance with their fields without leaving the national identity, because in the future anyone who is able to master these three things will become the winner rules the world.

Also accompanying the event was Director of MNG TV Hendri Suparman, Director of Corporate Secretary Syafril Nasution, Director of State Defense, Directorate General of Politics, Ministry of Defense, Brigadier General Jubei Levianto, S.sos., M.M., Head of Public Relations Bureau Secretariat General of the Ministry of Defense Brigadier General IE Djoko Purwanto, S.E., M.M., Host Ichsan Akbar, CO Host Chica Jessica, Guest Star Thomas Djorghi and Selfi Yamma.***



Source : Public Relations Bureau of the Secretariat General MoD

THE MINISTER OF DEFENSE'S CONCERN PERSON, AN ELEMENTARY SCHOOL KUPANG THROUGH THE DEFENSE



TOWARDS THE DISABLED STUDENT FROM REHABILITATION CENTRE

Erlin Sudarwati, SKM,MM

Kasubbid OPD Bid. Rehabmedik Pusrehab Kemhan



The Ministry of Defense's Rehabilitation Center (Pusrehab Kemhan) has the task of providing substantive support to all units within the Ministry of Defense in the fields of medical rehabilitation, vocational rehabilitation, social rehabilitation, and hospitalization. In the field of medical rehabilitation, one of the services provided is making prosthetic limbs and/or hands, which are commonly called prostheses (body replacement tools). More precisely in the OP (Prosthetic Orthotics) Unit, which provides services for the provision and or manufacture of orthoses (body aids) and prostheses (body replacement tools) by prosthetic orthotics who are experts in their fields.

Routine Medical Rehabilitation services are provided to persons with disabilities, TNI personnel and Civilian of MoD as participants of Integrated Rehabilitation along with Vocational Rehabilitation, Social Rehabilitation and Hospitalization services. However, Medical Rehabilitation services, especially the provision of Orthoses Prostheses, are also provided to persons with general disabilities. One example is Stenly Yessi Ndun, a child with a disability aged 6 years, an elementary school student in Kupang, East Nusa Tenggara, who does not have perfect legs from her birth. Yessi Stenly Ndun always walks to school by using a walker cane. Due to his enthusiasm for going to school by walking using a wooden stick for about a kilometer, Yessi has caught public attention and has gone viral on social media.

Source : Public Relations Bureau of the Secretariat General MoD

Yessi Ndun's viral news on social media was also heard and became the attention of the Minister of Defense, Mr. Prabowo Subianto and he provides assistance in the form of prosthetic limbs to Yessi Ndun.

Not for a long time, the Minister of Defense immediately ordered the Minister of Defense Rehabilitation Centre Team to carry out the process of making prosthetic limbs for Yessi. This is a form of Defense Minister's concern for persons with disabilities who have the same rights as citizens to get convenience in daily life and in studying.

Based on the orders of the Minister of Defense, the Minister of Defense Rehabilitation Centre Team then coordinated with the local TNI Unit to be able to communicate with Yessi's family who is a student of SDN Bijaesahan, Dortiana Karice Mau, East Nusa Tenggara Province with a residential address in Tuapanaf Village, Takari, Kupang Regency, Nusa Tenggara Province East. Then Yessi, who was accompanied by his family along with the Minister of Defense Rehabilitation Centre Team entourage, was facilitated to go to the Minister of Defense Rehabilitation Centre, Jakarta .

On October 9, 2020, Yessi arrived at the Minister of Defense Rehabilitation Centre, Bintaro, South Jakarta, hoping to get a quality prosthetic leg. While at the site, Yessi received excellent service from the Minister of Defense Rehabilitation Centre Team. Regarding the plan to make prosthetic limbs, it begins with an assessment/physical examination by a Specialist in Physical Medicine and Rehabilitation dr. Rifqi Averrouza Hasbiandra, Sp.KFR, who is accompanied by the Head of the Medical Rehabilitation Division Colonel Kes dr. Budi Satriyo Utomo, Sp.KFR., MARS, and the Head of the Ministry of Defense Rehabilitation Center Brigadier General dr. Budiman, SpBP-RE (K), MARS. Furthermore, the process of making a prosthesis/artificial leg at the start of the measurement, printing, modification, fabrication, fitting up, fitting runs, until the finishing is done by Team Orthotics Prosthetic.

While waiting for the manufacturing process, Yessi was given double custom axillar crutches for her daily activities before wearing her prosthetic legs. In addition, Yessi also received psychological guidance and motivation from the Psychoses Team for Social Rehabilitation, as well as mentoring from other teams. To increase motivation and her spirit,



Source : Public Relations Bureau of the Secretariat General MoD

Minister of Defense Rehabilitation Centre Team also took her to know better about Jakarta as the capital of Indonesia by visiting the National Monument (Monas), TMII and surrounding areas.

Finally, on Tuesday, November 3, 2020, Yessi, accompanied by the Head of Medical Rehab Section and Minister of Defense Rehabilitation Centre Commander had the opportunity to meet the Minister of Defense, Mr. Prabowo Subianto. On the occasion of his meeting with Mr. Prabowo Subianto, Yessi expressed his immeasurable gratitude for the assistance in providing his prosthetic leg. Now Yessi feels more confident and will be more eager to learn to achieve her goals.

Yessi's series of trips to get prosthetic assistance was completed on November 5, 2020. Yessi, accompanied by prosthetic orthotics and the Head of Head of Medical Rehab Section returned to Kupang, to go to her residence.

Upon arrival in Kupang, Yessi Ndun was welcomed and given appreciation and motivation by Danlanud El Tari Kupang, Dan Lantamal VII Kupang, and also Dandenkesyah Kupang, before finally being escorted back to his family.

El Tari Air Base Commander, Colonel Pnb Bambang Juniar D., S.Sos., MM., Accompanied by Karumkit Lanud El Tari, Captain dr. Hendra and Kadiskesal Lantamal VII Kupang, Lt. Col. Kes Haris Benu, welcomed the arrival of Stenly Yessi Ndun at El Tari Kupang Airport.

On that occasion Danlanud El Tari advised to Yessi that she should keep the spirit and continue to reach the dreams and to remain in school like her other friends, and never give up studying because God has been with us and has created the lives of the people in their best way.

In addition, the Commander of the Navy Main Base (Danlantamal) VII First Admiral TNI IG. Kompiang Aribawa and accompanied by Wadan Lantamal VII along with Assistant Danlantamal VII and members of Jalasenastri also welcomed the arrival of Stenly Yessi Ndun, at the VIP Room Mako Lantamal.

When welcoming the arrival, Yessi was also introduced to marine life. Yessi was invited to tour the waters around Lantamal VII Jetty by using KAL Kembang.

On that occasion, Danlantamal VII thanked to the Minister of Defense for giving attention in the form of prosthetic assistance for Yessi, and while in Kupang, Lantamal VII would continue to monitor the health development of Stenly Yessi Ndun.

During the activities in Kupang, the Pusrehab Kemhan Team was also supported and facilitated by the Kupang Regional Health Detachment (Dan Denkesyah) Commander Lt. Col. Ckm. Agus Saptiady, Sp.An, especially in establishing a very good coordination process so that the implementation of activities can run smoothly.

Finally, Yessi was officially handed over to the family by the Head of the Medical Rehabilitation Division of the Ministry of Defense and Research, Colonel Kes, dr. Budi Satriyo Utomo, Sp.KFR., MARS. However, in the future, Yessi will continue to be monitored until she is able to fully adapt to her new leg.

This program of providing prosthetic limb assistance to Yessi is a tangible form of Defense Minister's concern for persons with disabilities, which is not only for persons with disabilities, TNI personnel and Ministry of Defense civil servants, but also for persons with general disabilities. Just like Yessi, a child who needs a prosthetic of East Nusa Tenggara Kupang area also becomes the attention of the Defense Minister, Mr Prabowo.

Hopefully Yessy will be successful in the future in achieving her goals and achievements that make her family, Kupang community, nation and country proud. Furthermore, the Minister of Defense Rehabilitation Centre Team will continue to monitor the physical development related to the prosthetic limb.***



Source : Public Relations Bureau of the Secretariat General MoD

The Role of Culture in Manifesting the Independence of the Defense Industry

Dr. Ernalem Bangun, M.A.

Lecturer at Defense University



Talking about the defense industry, it is worth looking at the South Korean for a moment in developing their defense industry. As is known, the Seoul defense industry has now become a competitor of similar industries from Europe which had already been established. In fact, it is not uncommon for the European defense industry to fall down in international tenders because it cannot compete with its competitors from the Land of Ginseng. The question is, why is the South Korean defense industry able to compete internationally?

Samuel P. Huntington in his book "The Rise of the Role of Culture, How Values Shape Human Progress" places culture as the main role that shapes the progress of a society which is called the revival of cultural roles. Samuel P. Huntington, one of the world's leading scientists, paid high respect to the role of culture, when comparing Ghana and South Korea,

which was followed by the question, "How to explain the extraordinary differences in this development?". Then he answered himself, "There are no doubt many factors that play a role, but in my opinion, culture plays a big role. South Koreans value a frugal life, investment, hard work, education, organization, and discipline. Ghanaians have different values. In short, culture has a share. "

Huntington tells how similar economic data were from Ghana and South Korea in the early 1960s. These two countries have equal levels of Gross Domestic Product (GDP) per capita; their similar economic share between primary products, manufacturing and services; and an abundance of primary product exports, with South Korea producing a small number of manufactured goods. They also receive balanced economic assistance. Thirty years later, South Korea became the world's 14th largest economic industrial giant, the company multinational companies, exports of cars, electronic equipment, and other high-end manufactured goods, and per capita income approaching Greece (now far beyond Greece, ed.). There is no change like this in Ghana, which GDP per capita is now around one-fifteen from South Korea ".

South Korea (South Korea) is currently growing as a country with a developed economy, especially in the industrial sector. Innovation in the technology sector is key to South Korea becoming a developed country. Although South Korea is not a large country, it could be the 6th largest exporter in the world. The transformation of economic development has transformed South Korea into a country with technological innovation.

South Korea has a culture that supports innovation for the progress of the country where the main element is the foundation of education. According to the 2014 Economist Intelligence Unit, South Korea is ranked first as the best country in the education system in the world.

In 2017, South Korea had more than 400 thousand researchers, an increase of 2.5 times the number compared to 1997 and became one of the countries with a high commitment to research at 4.55%. In 2009 South Korea was recorded to have 38,651 theses, more than double the number of theses completed in 1997. In addition, South Korean people are known to have a very high work ethic.



Source : Public Relations Bureau of the Secretariat General MoD

In 2012, this country was known to have the longest working time among OECD countries (Organization for Economic Co-operation and Development). The culture of hard work is accompanied by a culture of innovation. South Korea is known to have a tendency to become a World Pioneer compared to being a Fast Follower. On a scale of 0-100, South Korea has a value of 76.5 in terms of the level of industrial technology. In macro terms, South Korea spends around 4.1% of its GDP on research and development activities. “

South Korea is also known for strong nationalism. The South Korean government has a major role in shaping the nationalism of its people and a high entrepreneurial spirit. This allows several South Korean business groups to survive in global competition for quite a long period of time”.

Mochtar Lubis in his book “Cultural Transformation for the Future” also saw that in the process of industrialization the Chinese culture group was superior compared to the Malay culture group. Chinese culture contains the value of hard work, clever and persistent save, willing to undergo suffering to achieve success, respect for ancestors and parents who provide stability of self-identification and social relations.

Now we look for a moment to Indonesia which stretches from Sabang to Merauke, consisting of

17,508 islands, with an area of 1,922,570 km² and inhabited by more than 260 million people from various different ethnic groups, religions and backgrounds. A country like this requires a very strong defense effort to protect the people, territory and sovereignty by deploying all abilities so as not to fall into the control and occupation of other countries.

To fulfill this obligation, the State needs the main defense system (defense equipment) which is quite good in terms of quantity and quality, because the defense equipment is one of the pillars of the capabilities of the armed forces. However, based on the reality, the condition of the defense equipment owned by the TNI in terms of quality has largely exceeded the operational maximum limits and the numbers have been limited. Therefore, the role of the domestic defense industry is very important.

Indonesia has determined to be independent in the national defense industry by producing its own needs for the main weaponry system. On various occasions President Joko Widodo provided direction to reform the defense industry ecosystem as a whole. Jokowi wants, the defense equipment development program can strengthen Indonesia's defense industry. Jokowi views, the improvement of the defense industry ecosystem needs to be done, in order to reduce Indonesia's dependence on imported goods for weapons owned by Indonesia.



Source : Public Relations Bureau of the Secretariat General MoD

If we understand about the independence of the defense industry, we will see how many benefits can be obtained if the independence of the defense industry can be achieved. One of them will be able to improve the position of Indonesia's bargaining power in the international world, secrecy defense equipment is maintained, and can improve the Indonesian economy. Why is that, because the advancement of the defense industry will be able to absorb labor, be able to meet the needs of defense equipment internally, it is even possible to export abroad. This can also provide the benefits of efficient use of the state budget, and can even increase the country's foreign exchange.

Technically, using domestic defense equipment consistently will make it possible to continuously improve the products so that they become more perfect every day.

On the other hand, no less important is the availability of the spare parts that are easily and quickly obtained. In addition to the speed in repairing if there are damaged defense equipment. Most prominent is our avoidance of the embargo policies by producing countries.

Complementing all the benefits that have been mentioned, the independence of the defense industry indirectly increases the sense of nationalism, because it will show the ability of the state in preparing the need to protect the country. This will give pride to all the people of Indonesia.

With the enactment of Law no. 16/2012 then formally there are guidelines for realizing an independent defense industry. KKIP (Defense Industry Policy Committee) together with 3 stakeholders such as Policy Makers, Industries and Users that are expected to be able to build synergy that can bring the defense industry in the direction it aspires to, the industries that are able to meet the needs of domestic defense equipment and even are able to meet the world's needs.

The above concept is an integrated and concentrated partnership relationship in the development of the defense industry, where the defense industry is a system with elements that are interrelated and influence one another. These elements, between Universities as well as Research and Development communities that have the potential to develop defense science and

technology from within. Besides, Industries that have the potential to utilize science and technology by BUMNIP, namely PT PAL which deals in the field of Navy Defense Equipment, PT Pindad in the field of Army Defense Equipment, PT DI handles combat iron birds and all kinds of supporters, PT Krakatau Steel which handles metals and chemicals, PT LEN Industri handles electronic components specifically for combat equipment, and PT Dahana takes care of explosives and warheads. The State-Owned Enterprise of the Defense Industry (BUMNIP) is of course also supported by several private companies engaged in defense.

Based on the principle of partnership between users, industry and government, the TNI (Army, Navy and Air Force) as users also participate in the development of designs to produce prototypes.

Thus, the TNI does not only function as the project giver, but also participates in developing products as needed. This means that the problem of ergonomics can be applied and attached to every product design.

On the other hand, the Government as a policy maker has also made a road map for the main weapons system (defense equipment), which is called the 7 priority defense equipment programs, namely combat aircraft, tanks, submarines, propellants, rockets, radars and missiles.

Law No. 16/2012 on the Defense Industry explicitly demands that Indonesia must be ready to produce its own domestic weapons. The import process can only be carried out specifically for weapons and defense equipment that cannot be produced domestically, and even then there must be a condition for the transfer of technology so that within a certain time everything can be produced domestically.

The independence of the national defense industry will ensure the ability to guarantee the availability of defense equipment so that the independence of the national defense and the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia will be maintained. In addition, there are three things that can be achieved when Indonesia is independent in the defense industry, like the ability to create / integrate defense equipment, freedom to choose Material Sources / Systems / Technology, and dependence on various bonds.

The Role of Cultural Values Can Support the Realization of Independence

Referring to Law Number 16 of 2012, the realization of the independence of the defense industry is just a matter of time. The problem now lies in the culture developed by each stakeholder.

This is consistent with what was conveyed by Huntington who saw how big the role of culture in achieving a success. South Korea with its culture makes it superior compared to Ghana. Likewise, Mochtar Lubis saw how the Chinese culture family was able to bring their country ahead in the industrialization process compared to the Malay family.

A culture that needs to be developed that can support the realization of the independence of the defense industry must be explored and revitalized. The defense industry element consisting of the opportunities for The State-Owned Enterprises of the Defense Industry (BUMNIP) and supported by private companies, needs to develop a culture of "mutual cooperation" which is actually a cultural value of the Indonesian nation that has existed since time immemorial, but is currently experiencing degradation, heading towards individualism. Cooperation that starts with openness and honesty will create a mutualistic symbiotic relationship between BUMNIP and private companies.

At the level of cultural values "hard work" and "smart work" are values that must also be upheld and continue to be maintained and developed. For the reason that, with hard work and smart work, the defense industry will be able to increase its productivity both in quantity and quality effectively and efficiently.

The existence of these values will also be able to increase up to 70% of the technological, financial and production capacity of weapons systems, so that overall independence can be realized.

Likewise, academics and R&D institutions must abandon the "nerabas" culture which is symptomatic. The culture that needs to be built is a culture that is "quality-oriented" so that R&D institutions conduct research by following scientific principles both in terms of methodology and researcher's competence.

Research and Development resources are always filled with high curiosity, which enables it to conduct a proper analysis of phenomena in the strategic environment both national, regional and international. Theoretical knowledge is deepened to enable it to have the right knife of analysis. "Studying up to China" is an expression that supports the value of "continuing learning" that enables researchers to explore knowledge and strive to create something useful for the nation and state.

Another element that is no less important is the Policy Makers. How do policy makers, in this case Ministry of Finance, make fiscal and monetary policies that can help provide budgets and minimize production costs so as to create low-cost (economic) products. Likewise, with the Ministry of industry which provides the possibility of promotion and marketing, as well as the Ministry of Defense with its policy to carry out cooperation with other countries, make use of policies by the TNI (Army, Navy and Air Force).

Cultural values of "helping each other" can be developed so that each apparatus involved in this activity is always driven by cultural values which are the mindset that guides when behaving. Likewise,



Source : mik-newsblogspot.co.id

the value of “being proud of Indonesian products” must be believed and developed, so that although today it is financially uneconomical, the hope is that it is a process leading to results better, enable it to make policies that are pro to the products of domestic Defense Industry.

The third element is the user like the Army, the Navy and the Air Force. If all this time we hear “western-minded” that feel proud of foreign (Western) products, then it's time we rise to be “proud of Indonesian Products”. This is actually not difficult in a country that is paternalistic and oriented upward. Leaders, elder people become role models and orientation centres. If the leaders use the product, the strata beneath it mindlessly follow it. That means leaders within the TNI must be sure that using domestic defense equipment is good.

Maybe in terms of the quality of the products used are still lacking compared to foreign products. However, with the belief that through the use of these products, weaknesses can be identified so that further improvements can be made towards the perfection of the product to provide optimal benefits.

The value of “patience” which is often considered outdated, enables users to look carefully at their weaknesses and try to theoretically and technically provide input to the industry and R&D institutions to make improvements.

On the basis of the value of “being proud of Indonesian products” it prevents officials from determining policy of purchasing from vested interests, personal interests both material and non-material.

By looking at the working mechanism of the defense industry, it needs a revitalization process and the acculturation of cultural values that are considered capable of supporting the realization of the independence of the defense industry.

The author in this matter refers to it as revitalization, because in fact those values are already owned by the Indonesian people, but have declined. Whereas new values such as “hard work and smart work” are needed to civilize so that every individual involved in the defense industry mechanism has those values, which will guide him in acting and working.

The process of revitalization and acculturation (enculturation) can be done in various ways.

Dissemination with various media, formal and informal education, modeling, implementation of systems and work norms. All of these things can serve as a means of creating and developing a culture that will be able to achieve what is expected.

Since actually from the 3 elements of culture (value system, behavior system and work system), which influences human behavior and work and the longest surviving is the value system. Therefore, if the values mentioned above are used as a guideline to encourage the realization of the independence of the defense industry, then Law Number 16 of 2012 (which is the norm of guidance in carrying out the independence of the defense industry as outlined in Government Regulation) can be implemented properly by each stakeholder interests with awareness and belief. If something is done based on awareness and belief, it will undoubtedly provide optimal results.***

Bibliography

- Koentjaraningrat,
1974 Culture, Mentality and Development, Jakarta, Gramedia.
1988 Human and Indonesian Culture, Jakarta, Djambatan.
- Lubis, Mochtar
1988 Cultural Transformation for the Future, Jakarta, CV Haji Masagung
Huntington, Samuel P.
2006 Awakening of the Role of Culture. How Values Shape Progress Public.
- Republic of Indonesia Law No. 16 of 2012 concerning the Defense Industry

Papers:

- Dedy, Arfians. 2013. Defense R&D activities and their implementation against the independence of the defense industry.
- Ministry of Research and Higher Education. 2017. National Research Master Plan for 2017-2045.

Brig. Gen TNI W. Jati Wahono

THE IMPORTANT ROLE OF FLYING BOAT

TOWARDS THE CONDITION OF INDONESIA'S GEOGRAPHIC REGION AND NATIONAL DEFENSE ASPECTS

Introduction

Indonesian Geography

Generally, it has been widely understood, after waiting for three years, Indonesia finally has the latest reference data for the Indonesian maritime region. The data is an update for the marine data in the archipelago. The work has been carried out by the Coordinating Ministry for Maritime Affairs since 2015 involving the Geo-Spatial Information Agency (BIG) and the Navy's Hydrographic and Oceanographic Centre (Pushidros).

The Indonesian geographical condition is the archipelago state, which has around 17,504 large and small islands, (those which have been standardized and submitted to the United Nations are 16,056 islands) with an area of NKRI (land and water) at about 8,300,000 km² and the total area of the Indonesian waters is 6. 400,000 km².

In the Djuanda Declaration, which was formalized as Law No.4/PRP/1960 on Indonesian Waters,

states that Indonesia adheres to the principles of the Archipelagic State which at that time was subject to major opposition from several countries, so that inter-island seas were also the territory of the Republic of Indonesia and not the free zone. As a result, the territory of the Republic of Indonesia doubled in size 2.5 times from 2,027,087 km² to 5,193,250 km² with the exception of Irian Jaya which, although it was Indonesian territory, was not recognized internationally at that time. Based on the calculation of 196 straight baselines (straight baselines) from the outermost point of the island (except Irian Jaya), the creation of a virtual boundary line around RI is about 8069.8 nautical miles.

The Juanda Declaration which was made on December 13, 1957 by the then Prime Minister of Indonesia, Djuanda Kartawidjaja, stated to the world that the Indonesian sea was one of the seas around, between and within the Indonesian archipelago as a unified territory of the Republic of Indonesia. Before the Djuanda's declaration, the territory of

the Republic of Indonesia was referred to the 1939 Netherlands Indies Ordinance, namely the Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939). In the Dutch East Indies regulations, islands in the archipelago were separated by the surrounding sea and each island only had a sea around a distance of 3 miles from the coastline.

After a long struggle, this declaration in 1982 was finally accepted and adopted at the 1982 UN Third Law of the Sea (United Nations Convention On The Law of the Sea / UNCLOS 1982). Furthermore, this declaration was reaffirmed by Law No. 17 of 1985 concerning the ratification of the 1982 UNCLOS that Indonesia was an island nation.

In 1999, President Suharto declared December 13 as Nusantara Day. The inauguration day is reinforced by the issuance of Presidential Decree No. 126 of 2001, so that

December 13 officially became a national celebration day, where the contents of the Juanda Declaration, December 13, 1957: 1) That Indonesia declared as an archipelagic country that has its own style, 2) That since a long time ago this archipelago has been a unity, 3) Provisions of the 1939 Ordinance on Ordinance, can divide the territorial integrity of Indonesia from the declaration containing a purpose: (a) To realize the form of the territory of the Republic of Indonesia as a whole and round, (b) To determine the territorial boundaries of the Republic of Indonesia, in accordance with the principles of the islands, and (c) To regulate the peaceful traffic of shipping that better guarantees the security and safety of the Republic of Indonesia.

Looking at the number of Indonesian islands as many as 92 outer islands consisting of 31 inhabited islands and 61 uninhabited islands. This position also places Indonesia directly adjacent to other countries such as Malaysia, Singapore, Papua New Guinea, Timor Leste, the Philippines, Palau, Vietnam, Australia. (Director of Small Islands Utilization of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries/KKP)

These conditions increase the vulnerability of crime rates, security stability and integrity of the Unitary Republic of Indonesia (NKRI). In this regard, in order to preserve and maintain the integrity of the border region, it is necessary to manage and develop the outer small islands by taking into account the integrated development of facilities and infrastructure in the social, economic, cultural, legal, human resources, defense and security areas.

The existence of



Indonesia will be greatly influenced by the condition and geographical location of Indonesia itself, so that the management of natural resources is very much needed in Indonesia to be utilized to maintain environmental sustainability and protection as well as the welfare of society. In the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in Article 33 paragraph (3) which states that "Earth, water, including the natural resources contained therein are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people". Therefore, efforts

optimizing the management of natural resources does need to be improved strategically.

However, now the problem is the facilities and infrastructure, such as telecommunications, trade, sea and airports, especially in the outermost and remote islands.

Therefore, the concern and needs to be examined are in the form of threats, violations, conflicts and illegal exploitation of natural resources (SDA), which have the potential to occur inside or around these islands by outsiders.

National Defense

The realization of a strong National Defense is the answer to shape a nation and state conditions that are needed. As an essential form of National Defense, all universal defense efforts are carried out based on an awareness of the rights and obligations of citizens as well as confidence in their own strength (Law Number 3 of 2002 concerning National Defense, Article 2).

In this regard, the management of the national defense system is oriented to the integration

between military defense and non-military defense as a manifestation of the totality in the national defense system based on strategic goals and objectives and national defense policy. (Manuscript attached to Decree of the Minister of Defense Number: KEP/104/M/I/2020 concerning the National Defense Policy of 2020).

Meanwhile, in relation to the strategic objectives of national defense, there are several aspects which must be achieved, one of them is maintaining the sovereignty and integrity of the Unitary Republic of Indonesia and protecting the safety of all nations from all forms of threats through maintaining the sovereignty of the state in the land, sea and air including in border areas (Manuscript attached to Decree of the Minister of Defense Number: KEP/104/M/I/2020 concerning 2020 National Defense Policy Chapter II Jakhanneg 2020 Point a Number 1).

Besides that, there are aspects related to the realization of the Management of National Resources (PSDN) for national defense, by creating a national defense industry that is strong, independent, and competitive to support the needs of national defense. Another strategic target aspect is the



implementation of defense area management by realizing strengthening defense in choke points or strategic straits. (Manuscript attached to Decree of the Minister of Defense Number: KEP/104/M/I/2020 concerning 2020 National Defense Policy Chapter II Jakhanneg in 2020 point letter c number 4 and point letter d number 4).

One of the implementation form in achieving these strategic goals can be to increase the professionalism of the TNI forces, which is supported by equipment in accordance with conditions, ranging from handling natural disasters, humanitarian assistance and the task of world peace missions and other emergencies.

Besides that, the other forms of implementation is done through increasing the efficiency of the national defense industry. This of course requires a form of commitment from the Ministry of Defense and TNI to prioritize the use of national defense industry products.

National and International Paradigms

Moreover, various national and international paradigms, including the threat paradigm shift and

the development of science and technology as well as the impact of the influence of the Industrial Revolution 4.0 have touched on all aspects of life including defense and security issues.

This paradigm clearly has significant positive and negative impacts. Besides facilitating interaction between countries, the Industrial Revolution 4.0 also presents a multidimensional challenge, namely the emergence of new threats. One of them is through cyberspace (cyber space) that can be done by state and non-state actors, which is difficult to anticipate, difficult to predict (unpredictable), dynamic, and fast-changing, and full of uncertainties, because of their non-conventional nature, frontless and the target dimensions are very broad.

On the other hand, the constellation of Indonesia's geographical location which is at the crossing of two continents makes Indonesian waters as a navigation route and sea and air transportation for the international world. In addition, Indonesia's position is bordered by 10 (ten) neighbouring countries in Southeast Asia, making it vulnerable to potential border disputes and security threats to the existence of national security, territorial integrity and the safety of all nations.

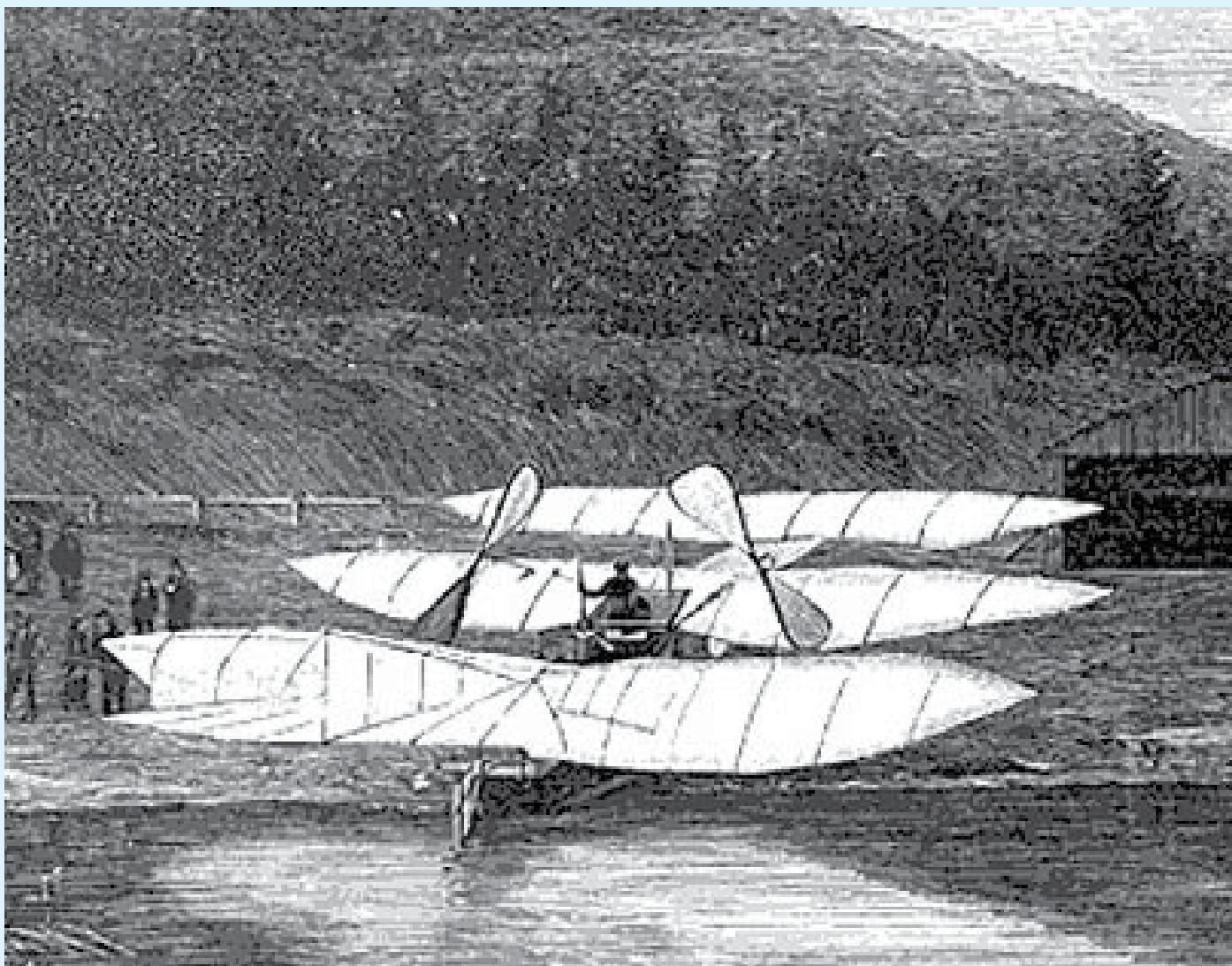
In connection with this phenomenon, the TNI as the main pillar of national defense certainly requires operational preparedness. Both the readiness of the scope of Military Operations for War (OMP) and Military Operations Other Than War (OMSP) in maintaining the safety of the nation, the integrity of the region and the safety of the whole nation. These TNI duties are mandated by Law No. 34 of 2004 in article 7. In paragraph (2) number 12, number 13 and number 14 in the Act also explained the task of assisting the TNI on handling natural disasters, humanitarian assistance and other emergencies. So it is very necessary to complete the defence/supporting equipment so that it is expected to carry out the duties and functions optimally.

The existence of the the Flying Boat History

The Flying Boat is an amphibious fixed wing with a hull, which allows it to land on water and does not have the type of landing gear to allow the operation on the ground. It is different from the normal aircraft



Source : militermeter.com



Source : civilianmilitaryintelligencegroup.com

as it uses device that is specifically designed to float and provide aircraft buoyancy.

The History of Flying Boat is one of the largest types of aircraft from the first half of the 20th century, developed during World War II. In the 21st century, a float or flying boat type was developed, namely amphibious plane, which has landing mode or floatation mode so that they could be used for landing and taking off.

The first pioneer in 1876 was the Frenchman Alphonse Pénaud who filed the first patent for flying machines with ship hulls and retractable landing equipment . But Austrian Wilhelm Kress is credited with building the first Drachenflieger seaplane in

1898. On June 6, 1905 Gabriel Voisin took off and landed on the Seine River with a kite pulled on a float. On March 28, 1910, the Frenchman Henri Fabre had successfully flown the first seaplane, the Gnome Omega -powered Hydravion , and in 1911-1912 François Denhaut built the first seaplane with the fuselage forming a hull.

In its journey, the Flying Boat model continues to be developed in various countries. One such as in England, Captain Edward Wakefield and Oscar Gnosspelius began exploring the feasibility of flight from water in 1908 using Windermere in the Lake District (the largest lake in England). In Switzerland, Emile Taddéoli completed the Dufaux 4 biplane with swimmers and successfully took off in 1912.

Meanwhile, the birth of the Flying Boat industry sector since 1913 Curtiss Airplane and Motor Company designed and built aircraft capable of flight. John Cyril Porte, who is a retired British Royal Navy Lieutenant an aircraft designer as well as a test pilot who will be a pioneer of British aviation, realized that many early accidents were caused by poor understanding of temporary handling in contact with water.

At the same time the British ship building company J. Samuel White of Cowes on the Isle of Wight established a new aircraft division and produced aircraft in England. This was shown at the London Air Show in Olympia in 1913. In the same year, a collaboration between the SE Saunders East Cowes shipyard and the Sopwith Aviation Company produced the "Bat Boat ", a plane with a consular hollow hull that could operate from land or above water, which we today call seaplanes (<https://en.wikipedia.org> , on 25 February 2020).

Meanwhile in Indonesia, the Flying Boat was successfully designed by the Indonesia Maritime Institute (IMI) and made it the first Flying Boat in Indonesia. Erid Rizky (IMI Expert Council), said, Flying Boat can fly as high as 150 meters above sea level, so that it can facilitate the flow of sea transportation in Indonesia ([en.wikipedia.org/wiki / https://www.liputan6.com](https://www.liputan6.com) , October 14, 2013).

The Role of the Flying Boat Existence for National Interest

By looking at the condition of Indonesia's geographical area which is an archipelago and relying on several issues or forms of national-scale threats that affect the welfare of the community as well as the integrity and sovereignty of the Unitary Republic of Indonesia, facilities or infrastructure are needed as a means of connecting or connecting. The infrastructure includes transportation equipment that meets the aspects of speed, effectiveness and has other multi functions.

Here the author wants to give an overview of some of the important roles of the existence of airships which are expected to answer the needs of transportation infrastructure to support national

interests. The various important roles possessed by Flying Boat can be stated as follows:

First , as a means of transportation. The distribution of small islands, remote and outermost contains abundant natural wealth values, so they need to be managed and can be used as fulfilment of people's welfare. However, the limitations of supporting infrastructure for transportation make its own problems in realizing the management of these natural resources.

Therefore Flying Boat Transportation can be used as an alternative solution to help smooth the flow of transportation between small and remote islands in order to optimize the management of natural resources for the benefit of community welfare.

Second , it can function as a means of national defense to support the TNI in carrying out War Military Operations (OMP) and Military Non-War Operations (OMSP) activities, for example the TNI's activities as the main component in overcoming threats, violations, conflicts and illegal exploitation of natural resources and handling vulnerability to natural disasters quickly and accurately. For such reason, a support equipment is needed to carry out the task.

Another function is in the disaster management, this type of system in the form of Flying Boat is used to drop water in forest fires. Or it could also be useful as air transportation, which can access to areas around small undeveloped islands for the logistics distribution process.

Whereas from the military's point of view, Flying Boat is recognized as having good value for carrying out OMP tasks. Some bordering water countries operate it in military capacity. They are used from anti-submarine patrols to air-sea rescue and firing of weapons for warships.

Third , as a means of transportation, logistical support and a liaison for the interests of TNI units or units as the main component of national defense. Through the military posture development policy in the border region that has OMP and OMSP operational readiness optimally, the Flying Boat

can be used as a tool for military to support the distribution of logistics or the transportation of personnel as well as a liaison between units or units assigned to remote and outermost island areas.

Because currently the means of transportation to support logistics for units assigned to border areas, the outer and remote islands are still dependent on sea transportation that is vulnerable to extreme weather.

From the description in the form of data and facts above it can be concluded that the need for inter-island transportation is very necessary both for the benefit of welfare and defense equipment.

Therefore, it is ideal if the flying boat transportation is accommodated and developed so that the welfare aspects of the community are fulfilled. Whereas in the aspect of national defense, it can be used as a defense tool for military to carry out their duties and functions optimally.

Authority of K/L Responding to Flying Boat

From a series of previous explanations, the next question is: "What is the authority of the Ministry/Institution and how is the role of the National Defense Industry in responding to Flying Boat transportation facilities ?

Relying on some of the roles they have, it is suitable that the Flying Boat can be accommodated. However, when viewed from the aspect of the principle of benefits, roles, duties and functions as well as the technical operational of the Flying Boat , the environment of the most appropriate and ideal Ministry/Institution to respond is in the Ministry of Defense (in this case the TNI organization).

This is because, when we are talking about the integrity and sovereignty of the territory of the Republic of Indonesia, certainly cannot be separated from the role of the Ministry of Defense (Kemhan) in carrying out its duties and responsibilities. In



addition, the Ministry of Defense also continues to improve, organize and modernize the Main Weapon System (Alutsista), Primary System (Alut) and equip other equipment for TNI personnel as the core force of defense in maintaining and guarding the integrity of the Unitary Republic of Indonesia.

As for the reviews and other considerations that can be described, are as follows:

- a) Aspects of benefits and uses can be implemented to support the implementation of TNI's tasks in maintaining the integrity of the Unitary Republic of Indonesia and various forms of antidote for violations occurring in Indonesian territory.
- b) Strategic aspects, having speed and can be landed in territorial waters and grass platforms and narrow, so that it is more effective to prevent and prevent the initial occurrence of violations or threats to Indonesia's territorial borders. Or it can also be useful in handling

natural disasters as well as search and help in accidents.

- c) Aspects of the vulnerability of violations, whether or not they are aware of the form of supervision in maintaining the sovereignty of the Republic of Indonesia are still optimizing the limited TNI fleet. In addition to the small islands and the outer with shallow waters are often overlooked and not infrequently the occurrence of illegal exploitation of natural resources.

Realizing Flying Boat in Indonesia through the Defense Industry

A special design is needed about the existence of a Flying Boat that can accommodate the role, duties and functions of the TNI in carrying out Military Operations for War (OMP) and Military Operations Other Than War (OMSP).

As a step to realize the design, construction and procurement can be carried out in collaboration with several agencies/other institutions. In the end, Flying Boat can accommodate in accordance with the conditions of Indonesia's geographical area, the condition of the aspects of the benefits/ usefulness, and is able to accommodate the implementation of the tasks of the OMP and OMSP TNI optimally.

At the moment the most important thing is a form of commitment and attention in supporting the realization of meeting the needs of defense and security equipment by prioritizing national defense industry products. In connection with this, in implementing the presence of aircraft can optimize and utilize the existence of the national defense industry.

Why do we have to involve the national Defense Industry? Because the domestic defense industry is one of the spearheads of a country's efforts to develop a defense system independently. This is related to the fulfilment of needs, both in the context of providing quality and quantity of defense equipment in accordance with regional characteristics. In addition, the defense industry



Source : youtube.com

is able to adjust the needs to the characteristics of the users of the defense equipment namely the TNI, specifically the Flying Boat user. No less important, the empowerment of the national defense industry is aimed at eliminating the dependency on the needs of spare parts or the content of its defense equipment politically towards other countries.

The development of the domestic defense industry has proven to be the backbone for the development of the defense system and the modernization of the defense equipment of China and India which are currently growing into major military forces in Asia. Reflecting on this, Indonesia is also accelerating a program to meet the minimum needs of its military power through Law Number 16 of 2012 concerning the Defense Industry (Rachmat, 2014).

From a number of explanations, it is clear that the issue of completeness of the Flying Boat is urgent and requires special consideration. Therefore it is also necessary to have a strategic policy to realize the realization as the implementation of TNI operational preparedness in carrying out its tasks and functions optimally.

Then it was reiterated, that the existence of the Flying Boat as a defense equipment in the body of the TNI organization was seen as very vital and urgent. Specifically, in order to realize the national goal to improve the welfare of the community, as well as to maintain the integrity of the sovereignty and integrity of the Unitary Republic of Indonesia. ***

REFERENCE

- Angga Nurdin Rachmat. 2014. Challenges and Opportunities for the Development of Global Defense Technology for the Development of Indonesia's Defense Forces. He is a Lecturer in the Department of International Relations, University of General Achmad Yani in the field of Global Security Studies and Public Diplomacy. p.199-212
- Decree of the Minister of Defense Number: KEP/104/M/I/2020 concerning National Defense Policy Year 2020

WEBSITE

- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/719647/salut-indonesia-mampu-buat-flying-boat-karya-anak-bangsa> .
- https://en.wikipedia.org/wiki/Flying_boat
- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/719647/salut-indonesia-mampu-buat-flying-boat-karya-anak-bangsa?page=2>



KENDARAAN TAKTIS MAUNG



Defence - Gunnery Firing Range (GFR)

Defence - Target Drone



Enhancing the Defense Industry and Empowering Strong Fishermen to Deal with the Natuna Crisis

Col. Darwin Saputra S.IP., M.Han.

Senior Administrator of Procurement of Goods and Services Centre of
Defense Equipment Defense Facility Agency Ministry of Defense

Introduction

Region is one of the important aspects for a country as one of the conditions for the establishment of a country. Indonesia as an archipelago has a territory that is 12 miles from the coastline of the outer islands. Based on the identification results, Indonesia has 17,508 islands, of which 67 islands are directly adjacent to the neighbouring countries. The Islands that directly adjacent to the neighbouring countries require special attention from the government. This is because national borders are one source of disputes between countries. One of the islands which borders directly with neighboring countries and often triggers disputes is Natuna Island in Riau Islands.

Disputes often arise as a result of applying different principles to the establishment of continental shelf boundaries between the neighbouring countries, giving rise to "overlapping" territories. Like China which has different views about the boundaries of the waters. On February 25, 1992, the Chinese government announced the Law of the Territorial Sea and its Additional Zone, where the Natuna Islands were included in its Territorial Jurisdiction. Chinese interests in the South China Sea region also

extended to the fishing areas of the Natuna Islands (Tampi, 2017). This certainly makes incur loses and threatens Indonesia's maritime security.

The maritime security threat of Indonesia as an archipelagic country that sea area borders directly with other countries such as Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU Fishing). This threat has become an international problem and has even been classified as transnational crime which is commonly referred to as transnational organized crime because it involves many actors from various countries. IUU Fishing is an official name issued by the Food and Agriculture Organization (FAO) through the Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF). Illegal fishing can be briefly interpreted as fisheries activities that are carried out illegally, which are not regulated by regulations, and fisheries activities that are not reported to the authorized institutions that manage the world of fisheries (A.Sinulingga, 2009).

Based on data from the Indonesian Navy, from January to October 2017 there were 64 Foreign Fish Ships (KIA) conducting the IUU Fishing in the Indonesian Exclusive Economic Zone (Asops, 2017). The government took a firm stand against the



Sumber foto : cmp.com

perpetrators of IUU Fishing both from other countries and from in Indonesia, until the end of 2017 based on Law 45 of 2009, the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries has sunk 317 illegal fishing vessels consisting of 304 MCHs and 13 Indonesian fishing vessels (Kosatgas, 2017)

The boundary violations that occur must receive serious attention from the government and the people of Indonesia. Today, the problems in Natuna are heating up due to the presence of the Chinese Coast Guard in Natuna waters. The problem that occurs is the existence of the Chinese Coast Guard in Natuna waters is not just to cross the border area but to escort Chinese fishing vessels who want to commit theft of Indonesian Natural Resources in Natuna (illegal fishing).

The existence of the Chinese Coast Guard in Natuna waters makes Indonesian fishermen afraid to go to the sea in Natuna. Indonesian fishermen are afraid that they will even be kicked out by foreign fishing vessels in the Natuna Sea, which incidentally are in the Indonesian EEZ. Some fishermen even claimed that they did not dare to rest because they were worried that their ship would be hit by the foreign fishermen. The fear of these local fishermen is not baseless, considering the vessels used by foreign fishermen to steal fish are more sophisticated than boats owned by local fishermen (Detiknews, 2020).

This situation certainly reflects the maritime security of Indonesia which is very threatened. Local fishermen who should have triumph at the sea of the Republic of Indonesia Republic of Indonesia (NKRI) actually feel displaced and afraid of external threats. Even the fishermen hope to be escorted by the Coast Guard Indonesia or at least can be equipped with special communication tools while at sea to be monitored by law enforcement officials and feel safe. This of course is the state's obligation to protect the entire Indonesian nation and all Indonesian bloodshed as mandated in the opening of the 1945 Constitution. Indonesia lose and threatens Indonesia's maritime security.

A Latin proverb that is said to be quoted by the Roman military writer, Publius Flavius Vegetius Renatus "Si Vis Pacem Para Bellum," means "If you crave peace, prepare to face war," said Defense Minister Prabowo Subianto at the inaugural meeting

with the House of Representatives Commission I on Monday (11/11/2019). To preserve and create peace, prepare for war, Likewise the Defense and Security Doctrine is Defensive rather than Offensive. Which means it does not intend to disturb other countries but also will not allow our territory to be disturbed. Besides, Defense is an investment in achieving prosperity. Because, without peace there will be no stability, without stability there will be no economic growth and development, without economic growth and development there is no prosperity and prosperity will be directly proportional to the Defense of a country. (Prabowo S, 2019)

To overcome this, the Government must empower and build resilience of Indonesian fishermen through increasing the capacity of fishermen in the form of training and supplies of defense equipment. Based on the Law of the Republic of Indonesia No. 23 of 2019 one of the efforts in the Management of National Resources (PSDN) is by structuring the Support Components and forming the Reserve Components. Fishermen in Indonesia's border regions have the potential to become a Reserve Component in protecting Indonesia's sea borders. The National Defense Industry can also be developed to support strong military empowerment. Therefore, the author will discuss the development and improvement of the defense industry in order to deal with the border crisis in Natuna waters by empowering powerful fishermen.

The Role of Indonesia's Defense Industry Supporting the Reserves Component

The domestic defense industry is one of the spearheads of a country's efforts to develop a defense system independently. This is related to the fulfillment of needs both in the context of providing quality and quantity of defense equipment in accordance with regional characteristics and eliminating political dependence on other countries. The development of the domestic defense industry has proven to be the backbone for the development of the defense system and the modernization of Chinese and Indian defense equipment which are currently growing into major military forces in Asia. Reflecting on this, Indonesia is also accelerating a program to meet the minimum needs of its military strength through Law Number 16 of 2012 concerning the Defense Industry (Rachmat, 2014)

The defense industry is an industry both state-owned and national private, which is capable or potential, individually or in groups for part and all, producing defense and security equipment and maintenance services to fulfill strategic interests in the defense and security sector (Kina, 2012). Indonesia has a Defense Industry which is divided into two, sourced from State-Owned Enterprises (BUMN) and Private-Owned Enterprises (BUMS).

BUMN that produces Defense Industry products, are:

1. PT PAL as a main agency especially in warship engineering
2. PT Dirgantara Indonesia supports the manufacture of rockets / missiles, helicopters and fix wing aircraft
3. PT PINDAD fulfill the needs of weapons, cannons, ammunition and armored vehicles
4. PT Dahana developed Ammonium Nitrate and Propellant for explosives
5. PT Krakatau Steel prepares a steel plate according to the specifications required for the production of a combat vehicle platform defense equipment.

The Indonesian Defense Industry, which currently exists in Indonesia, has not functioned optimally due to the lack of attention and trust from the Indonesian government itself in the ability of these industries.

The arms embargo imposed by the US in the early 1990s opened the eyes of the Indonesian government to the importance of the existence of various strategic industries for the defense system. In fact, the reliability of Indonesia's defense industry products has long been recognized by other countries. For example, PT DI which has manufactured maritime reconnaissance aircraft for several countries. The reliability of the domestic defense industry products began to be recognized by the use of SS gun variants produced by PT. Pindad as an organic rifle in the environment of the TNI and Polri (Rachmat, 2014).

Since the awareness of the importance of the domestic defense industry emerged, PT. Pindad has



Source : Public Relations Bureau of the Secretariat General MoD

produced several innovations. One of them is the success of producing a combat vehicle in the form of an armored vehicle named Anoa. This has become one of the starting points for the development of PT. Pindad in the future will be able to produce defense equipment needed by the TNI such as tanks and other weapons technology. Currently PT. Pindad continued to innovate in developing SS rifles into several types for the interests of the TNI. Anoa Panzer and SS rifles made by PT. Pindad has stolen the attention of several countries which later gave contracts to procure armored vehicles and rifles from the company to meet the needs of their armed forces (Rachmat, 2014)

PT. PAL was not inferior to the success of producing several patrol ships used by the ranks of the Navy. In addition, PT. PAL also succeeded in developing a warship with Sigma-class stealth technology which was named KRI Klawang. Although at the trial session the ship made by PT. PAL caught fire and there were still a number of items that still had to be imported from abroad, but this did not dampen the development of the new ship which would later strengthen the ranks of the Navy. (Rachmat, 2014).

These successes show that the ability of the Indonesian Defense Industry is actually sufficient to strengthen Indonesia's defense. Considering the current border crisis in Indonesia's territorial waters, the development of the defense industry, especially related to the sea dimension, is very much needed. PT. PAL in this case must continue to be encouraged to produce and develop marine weaponry. PT PAL has the potential to create ships that will support the reserve component to contribute to Indonesia's marine defense.

The reserve component that has the most potential to assist the Navy's task in upholding Indonesia's sea sovereignty is the fishermen. This is because fishermen already know the geographical seas of Indonesia. PT PAL as a national defense industry in the shipping sector has the potential to create fishing boats which can also function as a means of Indonesian sea defense. The ship can be equipped with defense equipment that can be functioned by fishermen as a backup component that has been certified and received training. This can also be a solution to the problem of Indonesia's sea border crisis. Besides being able to increase the strength

of Indonesia's marine defenses, fishermen equipped with defense vessels can sail more productively without having fear of threats from foreign vessels.

Formation of Reserve Components Through Natuna Island Fishermen

At present the Navy does not have enough fleets to secure Indonesian territorial waters. The Indonesian Navy's equipment is still gave place to old production warships from ex-East Germany and the Netherlands. Even for the maritime countries like Indonesia, the Navy only has four submarines, which of course are not sufficient to fortify Indonesia's marine territories. This condition clearly makes Indonesia's sea areas very vulnerable to intruders both with economic motives such as fish theft and piracy as well as those related to foreign intelligence missions.

According to Professor Hasjim Djalal, the current weakness of law enforcement at sea has become a national problem for Indonesia such as IUU Fishing, all forms of smuggling, piracy, shipping safety and so on. These problems are not only limited to law enforcement responsibilities but also involve good marine management. One of the steps that can be done in conducting good marine management is to include the role of fishermen (Nasution, 2018).

If referring to the applicable law in Indonesia, especially the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia the 2nd amendment in article 30 explains that every Indonesian citizen has the right and obligation to participate in the defense and security of the state, where the people can be placed as a reserve component if have received military training and registered themselves as a backup component and are placed as a supporting component. If it is more focused on marine defense and security, fishermen are the most suitable community to be a reserve component for marine law enforcement agencies.

Whereas Law No. 23 of 2019 concerning Management of National Resources for National Defense states that the Reserve Component is a National Resource that has been prepared to be deployed to enlarge and strengthen the strength and capability of the main components. One of the efforts to manage the National Resources is the formation of a Reserve component. The Reserve Component

consists of Citizens, Natural Resources, Artificial Resources, and National Facilities and Infrastructure. The citizen reserve component consists of land, sea and air dimensions. Recruitment of the reserve component consists of registration, selection, basic military training, and determination. Basic military training is carried out for 3 months. After graduating from the reserve component, the service period for the backup component is divided into two, namely the active period (during training and refreshment and mobilization) and the inactivity period (can return according to the profession).

Meanwhile, specifically of the profession regarding to the Fishermen based on the Law No. 45 of 2009 is a person whose livelihood is fishing. Of course, fishermen know the sea better than people who live on the land. So that the role of fishermen to prevent the threat of sea defense becomes a great potential to comprehend Indonesia's sea sovereignty.

The involvement of fishermen to defend the territorial sea of the Republic of Indonesia as a reserve component of the Indonesian Navy is a profitable solution for all parties. This is because the Indonesian naval fleet has not been sufficient to maintain maritime security coupled with violations of maritime boundaries committed by China making local fishermen afraid to go to sea. Making fishermen a backup component makes local fishermen more resilient.

Military training given for 3 months to the reserve component can increase the capacity of fishermen in guarding Indonesia's sea borders. In addition, as a backup component, fishermen must also be equipped with equipment in the form of ships that have the capacity for defense so that they can cope with things that are not desirable or can coordinate directly with marine law enforcement. The ship can be developed from the domestic defense industry such as PT. PAL so that the design and function are in accordance with the needs of fishermen to protect Indonesia's maritime security. The increase in self-capacity and equipment can create strong Indonesian fishermen.

The resilience of Indonesian fishermen who already have the capacity in the form of capabilities and tools can certainly provide deterrence effects for other countries. This of course also makes foreign vessels and fishing vessels become reluctant to defend Indonesia.

Reflecting from China, which in fact is also a continental country, it has first involved the role of fishermen to help their marine law enforcement agencies. China has formed a Maritime Militia consisting of trained and neatly organized fishermen. They are also referred to as hybrid civilian-naval force because they are indirectly integrated as unofficial law enforcers and naval auxiliary components. In addition to China, Japan has also planned to involve its fishermen to patrol along with coast guards in



Source : Public Relations Bureau of the Secretariat General MoD

order to protect their fish resources which are often illegally taken by North Korean fishermen.

REPUBLIKA.CO.ID, SUNGAILIAT - The Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) will distribute 3,450 units when traditional fishermen with the capacity of the boat are adjusted.

Closure

Empowering fishermen in an effort to maintain Indonesia's maritime security is a solution that benefits all parties. The border crisis that occurred made fishermen afraid to go to sea in the Unitary Republic of Indonesia. The formation of fishermen as a reserve component in maintaining Indonesia's sea sovereignty is one form of state defense.

Likewise, with the Indonesian defense industry sector, in this case PT PAL is considered capable of creating ships that can support Indonesian fishermen as a backup component in carrying out their duties to safeguard Indonesian sea sovereignty. Increasing the capacity of fishing vessels designed for Indonesian sea defense can have a deterrence effect on foreign vessels wishing to enter Indonesian waters while at the same time providing a sense of security for fishermen when they are sailing in the Unitary Republic of Indonesia. This is a form of resilience of Indonesian fishermen. The resilience of fishermen is a reflection of the resilience of the Indonesian people and the resilience of the Indonesian people.***

REFERENCES

- Angga Nurdin Rachmat. 2014. Challenges and Opportunities for the Development of Global Defense Technology for the Development of Indonesia's Defense Forces. Is a Lecturer in the Department of International Relations, University of General Achmad Yani in the field of Global Security Studies and Public Diplomacy. H.199-212
- Detik news. 2020. Natuna Fishermen Fear of Sailing Since China's Coast Guard Entered Indonesian Waters. Retrieved on 07 February 2020 from <https://m.detik.com/news/berita/d-4846035/nelayan-natuna-takut-melaut-sejak-coast-guard-china-masuk-perairan-ri>

- Japan's Ministry of Fisheries Allocates 12 Billion Yen to Help Fishermen Face North Korea ", 12 December 2017, Retrieved on <http://www.tribunnews.com>, accessed on February 20, 2018.
- Losses covered reach the 2016 National Fish Resource Assessment Commission in the Scientific Oration of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries, 10 November 2017, Airlangga University. Make a chart of fish theft.
- Nasution, Anta. 2018. The Role of Fishermen in Assisting Sea Law Enforcement Agencies to Prevent Maritime Security Threats. Journal of Defense & National Defense April 2018, Volume 8 Number 1.
- Presentation Navy Chief of Staff Operations Assistant at the Seminar "Law Enforcement on Illegal Fishing by Foreign Vessels at ZEEI", 24 October 2017, University of Indonesia.
- Presentation of Task Force Coordinator 115 at the Seminar "Law Enforcement on Illegal Fishing by Foreign Ships at ZEEI", 24 October 2017, University of Indonesia.
- Sinulingga, "Handling Illegal Fishing in Indonesian Waters, Case Study: Illegal Fishing Period 2009-2014", Thesis, Postgraduate Program, Faculty of Defense Management, Indonesian Defense University, 2016
- Tampi, Butje. 2017. The Natuna Islands Conflict Between Indonesia and China (a Juridical Study). Journal of Legal Unsrat. Vol. 23 / No. 10 / July-December / 2017
- This article has been published on Tribunnews.com with the title "Si Vis Pacem Para Bellum", <https://www.tribunnews.com/tribunners/2018/11/28/si-vis-pacem-para-bellum>.
- Editor: Hasanudin Aco
- Defense Minister Prabowo Subianto at the inaugural meeting with the House of Representatives Commission I on Monday (11/11/2019)

The Deputy Minister of Defense Work Meeting with Commission I DPR RI To Discuss the Financial Reports of the Ministry of Defense FY 2019.

(Wednesday, September 2, 2020)

The Deputy Minister of Defense Sakti Wahyu Trenggono accompanied by the Secretary General of the Ministry of Defense, Air Marshal TNI Donny Ermawan Taufanto, M.D.S, Inspector General of the Ministry of Defense, Lt. Gen. Ida Bagus Purwalaksana, S.I.P, M.M. along with the ranks of the Ministry of Defense, held a meeting with Commission I DPR RI, Wednesday (02/9), at the Komplek DPR RI. The meeting this time discussed the Financial Report of the Ministry of Defense of TA. 2019.

On this occasion the Deputy Minister of Defense submitted the Financial Report of the Ministry of Defense of TA. 2019 in the form of a Budget Realization Report, Balance Sheet, Operational Report, Change in Equity Report and Notes to Financial Statements for the period ended 31 December 2019. This report is a presentation of the Ministry of Defense's management based on Transaction Reporting and Government Accounting Standards as well as an adequate Internal Control System.



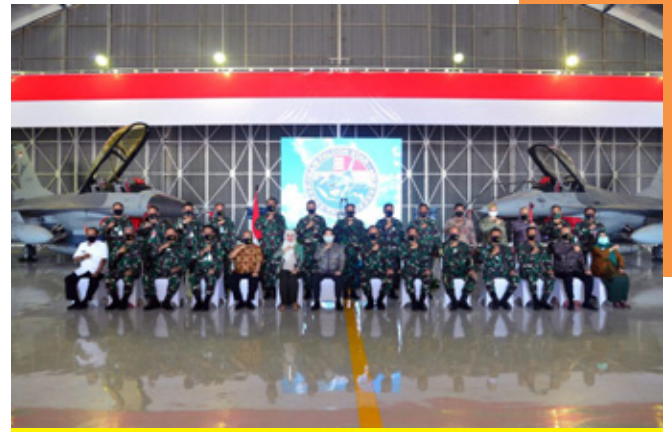
Source : Public Relations Bureau of the Secretariat General MoD

The Secretary General of the Ministry of Defense attended the eMLU F-16 Falcon Star Aircraft Roll Out Ceremony

(Friday, September 28, 2020)

The Secretary General of the Indonesian Ministry of Defense Air Marshal TNI Donny Ermawan Taufanto, MDS attended the Roll Out Ceremony of the eMLU F-16 Falcon Star Aircraft, Friday (28/9) at the 3rd Squadron Hangar of Iswahjudi Madiun Air Base, East Java.

Two upgraded F-16 A / B fighters through the Falcon Star -eMLU program added to the strength of Air Squadron 3 at Iswahjudi Base. The two planes were officially operated in Air Squadron 3 after the signing of the handover ceremony by the Air Force Chief of Staff Marshal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., MPP to Danlanud Iswahjudi First Marshal TNI Widyargo Ikoputra, SE, MM through a procession of the F-16 Aircraft Roll Out Ceremony Falcon Star-eMLU TS-1601 and TS 1610.



Source : Public Relations Bureau of the Secretariat General MoD

The Indonesian Minister of Defense Leads Handover of Six Echelon I Officials in the Ministry of Defense

(Thursday, October 1, 2020)

The Indonesian Minister of Defense Prabowo Subianto leads the ceremony for handover of positions and the inauguration of 6 (six) Echelon I officials in the Ministry of Defense, Thursday (1/10) at the Ministry of Defense Jakarta office.

The six officials who carried out the handover of positions and inaugurations included Air Vice Marshal TNI Dody Trinusu to Major General TNI Budi Prijono, ST, MM as Director General of Defense Planning the Ministry of Defense, Main Supervisor IV / e Prof. Dr.Ir. Bondan TS, M.Si. to Brig. Gen. TNI Dadang Hendra Yudha as Director General of Defense Potential the Ministry of Defense, Major General TNI Budi Prijono, ST, MM to First Marshal TNI Yusuf Jauhari, S.Sos., M.Eng. as a message from the Ministry of Defense, the Main Advisor IV / e Dr. Ir. Anne Kusmayati, M.Sc. to Marsda TNI Julexi Tambayong as Head of Research and Development the Ministry of Defense, Rear Admiral TNI Benny Rijanto Rudi S., MBA to Major General TNI (Mar) Joko Supriyanto, S.H. as Head of the Education and Training of the Ministry of Defense, Major General TNI (Mar) Joko Supriyanto, SH to Brigadier General Yulius Selvanus as Head of the Strategic Defense Installations the Ministry of Defense.



Source : Public Relations Bureau of the Secretariat General MoD

The Deputy Minister of Defense and the officials of the Ministry of Defense Participate in Virtual TNI 75th Anniversary Ceremony

(Monday, October 5, 2020)



Source : Public Relations Bureau of the Secretariat General MoD

The Deputy Minister of Defense Sakti Wahyu Trenggono together with the Secretary General of the Ministry of Defense (Sekjen Kemhan) Air Marshal TNI Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., participated in the TNI 75th Anniversary Ceremony which was held virtually, Monday (5/10) at the Bhineka Tunggal Ika Hall, the Ministry of Defense.

At the Commemoration of the 75th Anniversary of the TNI in 2020 which took the theme "Synergy for the Country", President of the Republic of Indonesia Joko Widodo in his mandate expressed his highest appreciation to TNI soldiers who have always been at the forefront of humanitarian missions. The President further emphasized that the TNI should continue to improve its capabilities, professionalism and readiness to accept assignments.

Minister of Defense Checks Readiness to Handover Rantis Maung Production of PT. Pindad

(Thursday, October 8, 2020)



Source : Public Relations Bureau of the Secretariat General MoD

The Minister of Defense of the Republic of Indonesia Prabowo Subianto, Thursday (8/10) examined the readiness of the 4 x 4 Maung tactical vehicle made by PT. Pindad which will be handed over symbolically from the Ministry of Defense to TNI Headquarters. This Maung tactical vehicle will be used in TNI operations throughout Indonesia. It is planned that the handover of Maung's tactical vehicle will be symbolically handed over to TNI Commander, Marshal TNI Hadi Tjahjanto.

Previously, in July (12/7) at the Sentul Bogor circuit, the Indonesian Defense Minister had tested this tactical vehicle which at that time was immediately named Maung by the Indonesian Minister of Defense. President Director of PT Pindad (Persero), Abraham Mose at that time presented the Maung tactical vehicle aimed at infantry troops..

Korpri Kemhan Supports the Success of Kemhan's Programs and Policies

(Wednesday, October 14, 2020)



Source : Public Relations Bureau of the Secretariat General MoD

The Secretary General of the Ministry of Defense (Sekjen Kemhan) Air Marshall TNI Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., attended the Kemhan Korpri Management Board Meeting for the 2020-2025 Period, Wednesday (14/10), at the Ministry of Defense office, Jakarta. In his remarks the Secretary General of the Ministry of Defense said that the Korpri Kemhan was increasingly playing an active role in always contributing to the success of the Ministry of Defense's task in carrying out the main tasks of national defense.

In his remarks the Secretary General of the Ministry of Defense said that the Korpri Kemhan was increasingly playing an active role in always contributing to the success of the Ministry of Defense's task in carrying out the main tasks of national defense.

